

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 27 April 2017  
Kepala,

**Surya Chandra Surapaty**

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	100
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	109
F. Pengungkapan Penting Lainnya	115
VI. Lampiran dan Daftar	

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Audited yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 27 April 2017  
Kepala,

**Surya Chandra Surapaty**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Audited Per 31 Desember 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.43.998.599.312,00 atau mencapai ∞ persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp.2.620.199.415.129,00 atau mencapai 73,07 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp.3.585.836.349.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.751.999.620.106,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.1.066.761.081.552,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.667.460.949.609,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.158.265.016,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.17.619.323.929,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.4.088.460.656,00 dan Rp. 1.747,911.159.450,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.408.601.513,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.2.257.860.870.445,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.2.257.452.268.932,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.12.899.789.601,00 dan Rp.0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 2.244.552.479.331,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp.1.419.302.308.647,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp.2.244.552.479.331,00, ditambah dengan koreksi-koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.8.837.427.287,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp.2.581.998.757.421,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.1.747.911.159.450,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>B.1</b>	-	43.998.599.312,00	0,00	7.041.296.891,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	43.998.599.312,00	0,00	7.041.296.891,00
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	409.630.613.000,00	387.616.473.982,00	94,63	337.714.880.224,00
Belanja Barang	B.2.2	3.123.871.011.000,00	2.197.851.552.903,00	70,36	2.212.110.665.577,00
Belanja Modal	B.2.3	52.334.725.000,00	34.731.388.244,00	66,36	74.887.011.104,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		3.585.836.349.000,00	2.620.199.415.129,00	73,07	2.624.712.556.905,00

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan**

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
**NERACA AUDITED**  
**PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.058.400.673,00	4.231.553.016,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	1.641.122.015,00	6.018.061.479,00
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.3	-	35.033.993.658,00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.4	567.795.361,00	1.576.478.193,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	(2.838.977,00)	-
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		<b>564.956.384,00</b>	<b>1.576.478.193,00</b>
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.6	38.804.280,00	51.860.880,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.7	(194.021,00)	(259.304,00)
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi (Netto)</i>		<b>38.610.259,00</b>	<b>51.601.576,00</b>
Persediaan	C.8	1.063.457.992.221,00	666.877.937.048,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.066.761.081.552,00</b>	<b>713.789.624.970,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.9	371.193.673.956,00	368.748.205.366,00
Peralatan dan Mesin	C.10	378.686.213.215,00	366.818.286.540,00
Gedung dan Bangunan	C.11	304.683.725.802,00	290.848.130.308,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.12	25.105.750.410,00	24.571.657.281,00
Aset Tetap Lainnya	C.13	2.893.797.140,00	2.865.600.871,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.14	4.406.373.000,00	4.855.304.933,00
Akumulasi Penyusutan	C.15	(419.508.583.914,00)	(382.894.649.801,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>667.460.949.609,00</b>	<b>675.812.535.498,00</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.16	159.060.318,00	204.007.998,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	(795.302,00)	(1.020.040,00)
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>		<b>158.265.016,00</b>	<b>202.987.958,00</b>
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.18	8.427.673.414,00	8.499.808.374,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.19	(8.427.673.414,00)	(8.499.808.374,00)
<i>Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto)</i>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>158.265.016,00</b>	<b>202.987.958,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.20	32.297.196.201,00	37.939.703.660,00
Aset Lain-Lain	C.21	17.975.214.997,00	12.140.035.243,00
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(32.653.087.269,00)	(10.523.754.215,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>17.619.323.929,00</b>	<b>39.555.984.688,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.751.999.620.106,00</b>	<b>1.429.361.133.114,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	2.793.367.866,00	5.405.878.401,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.23	236.692.117,00	421.393.050,00
Uang Muka dari KPPN	C.24	1.058.400.673,00	4.231.553.016,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>4.088.460.656,00</b>	<b>10.058.824.467,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>4.088.460.656,00</b>	<b>10.058.824.467,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.25	1.747.911.159.450,00	1.419.302.308.647,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.747.911.159.450,00</b>	<b>1.419.302.308.647,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.751.999.620.106,00</b>	<b>1.429.361.133.114,00</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
 LAPORAN OPERASIONAL AUDITED  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016  
 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		408.601.513,00	2.284.303.606,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		408.601.513,00	2.284.303.606,00
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	388.355.673.395,00	337.960.084.202,00
Beban Persediaan	D.3	22.648.328.417,00	59.342.592.630,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	798.821.573.582,00	1.160.505.887.346,00
Beban Pemeliharaan	D.5	28.400.584.090,00	26.791.245.958,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	372.365.494.976,00	321.650.076.277,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	598.907.587.371,00	473.777.720.563,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	48.359.079.658,00	46.903.784.700,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	2.548.956,00	(3.761.305,00)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		2.257.860.870.445,00	2.426.927.630.371,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.257.452.268.932,00)	(2.424.643.326.765,00)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		804.843.178,00	362.206.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(136.202.537,00)	(907.635.890,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		48.926.124.471,00	5.847.998.566,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(36.694.975.511,00)	(93.491.239,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		12.899.789.601,00	5.209.077.437,00
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		(2.244.552.479.331,00)	(2.419.434.249.328,00)
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		(2.244.552.479.331,00)	(2.419.434.249.328,00)

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	1.419.302.308.647,00	1.169.339.201.202,00
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	E.2	(2.244.552.479.331,00)	(2.419.434.249.328,00)
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	11.979.353.967,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	7.580.777.221,00	67.552.323,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	(16.616.187.608,00)	1.914.656.886,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	197.983.100,00	(3.700.000,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>(8.837.427.287,00)</b>	<b>13.957.863.176,00</b>
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>			
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.5.1	2.595.038.317.330,00	2.598.683.878.980,00
Diterima Dari Entitas Lain	E.5.2	(43.998.599.312,00)	(7.299.209.494,00)
Transfer Keluar	E.5.3	(1.114.780.775.657,00)	(623.790.641.850,00)
Transfer Masuk	E.5.4	1.120.446.551.343,00	662.151.224.320,00
Pengesahan Hibah Langsung	E.5.5	25.293.263.717,00	25.694.241.641,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.581.998.757.421,00</b>	<b>2.655.439.493.597,00</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.6	<b>328.608.850.803,00</b>	<b>249.963.107.445,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.7	<b>1.747.911.159.450,00</b>	<b>1.419.302.308.647,00</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan**

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) terutama pada Agenda Prioritas Nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia yang di dalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggungjawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental. Hal ini sesuai dengan Agenda Prioritas Nomor 8 (delapan) yaitu “Melakukan revolusi karakter bangsa”. Selain itu BKKBN berpartisipasi aktif dalam mendukung Agenda Prioritas Nomor 3 (tiga) yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan” melalui program pengembangan Kampung KB yang berintegrasi dengan program pembangunan dari lintas sektor.

Terkait dengan integrasi kependudukan dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka BKKBN turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan

kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Perjalanan pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (*youth dependency ratio*) di Indonesia membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia telah menurun dari 54/100 pada tahun 2000 menjadi 51/100 pada tahun 2011 dan turun menjadi 50/100 tahun 2012. Kondisi ini akan menurun terus mencapai angka terendah pada tahun 2020 sampai 2030, dimana angkanya berkisar 44 per 100, dengan catatan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Bonus demografi, jika dimanfaatkan akan menghasilkan jendela peluang atau *window of opportunity* untuk memicu pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Pada saat bersamaan akan menghasilkan kualitas penduduk usia produktif yang tinggi sehingga menjadi modal pembangunan bangsa dengan karakter keuletan dan ketangguhan sebagai unsur utama dalam mewujudkan ketahanan nasional guna mengantisipasi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren telah dibagi menjadi 4 (empat) Sub Urusan yang telah diatur pembagian kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan pada Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 juga harus dapat mengakomodir berbagai kegiatan prioritas yang mempertimbangkan sinergitas

dari 4 (empat) Sub Urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; <sup>1)</sup> Pengendalian Penduduk, <sup>2)</sup> Keluarga Berencana (KB), <sup>3)</sup> Keluarga Sejahtera, serta <sup>4)</sup> Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Pengembangan detail pelaksanaan Sub Urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, diperlukan kebijakan, strategi dan upaya yang optimal dalam mencapai tujuan tersebut melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran strategis BKKBN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15 – 49 tahun);
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet-Need*);
5. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun);
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Ke-6 (enam) Sasaran Strategis yang tercantum didalam Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 tersebut kemudian akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasi upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Secara garis besar maka arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan adalah : <sup>1)</sup> Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, <sup>2)</sup> Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, <sup>3)</sup> Menguatkan advokasi dan KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi) tentang KB dan KR di seluruh wilayah, <sup>4)</sup> Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, <sup>5)</sup> Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan

keluarga berencana, <sup>6)</sup> Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah, <sup>7)</sup> Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu serta <sup>8)</sup> Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 7 Eselon I yaitu :

1. Sekretariat Utama  
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN;
2. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk  
Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
3. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi  
Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
4. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga  
Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
5. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi  
Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
6. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan  
Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
7. Inspektorat Utama  
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN

Rincian jumlah Satker BKKBN adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Satker	Jumlah Satker	Kewenangan
1	Sekretariat Utama	1	KP
2	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	1	KP
3	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1	KP
4	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	1	KP
5	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	1	KP
6	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	1	KP
7	Inspektorat Utama	1	KP
8	Perwakilan BKKBN Propinsi Se-Indonesia	33	KD
9	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta	1	DK

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data , pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

*Basis Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis

akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

#### **(1) Pendapatan – LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan – LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagai berikut:
  - ⊙ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - ⊙ Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) diakui pada saat timbul pendapatan jasa giro dalam rekening koran bendahara pengeluaran pada periode saat itu.
  - ⊙ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

### (6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### Ekuitas

### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

### (8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Tahun Anggaran 2016, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan sumber dana yang berasal dari hibah langsung (dalam dan luar negeri), adanya penambahan anggaran atas perekrutan pegawai baru non PNS, adanya program penghematan belanja barang pemerintah serta adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2016	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan PNPB Lainnya	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	387,513,893,000.00	409,630,613,000.00
Belanja Barang	3,425,551,892,000.00	3,123,871,011,000.00
Belanja Modal	51,591,957,000.00	52,334,725,000.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3,864,657,742,000.00</b>	<b>3,585,836,349,000.00</b>

Sedangkan apabila dilihat dari program BKKBN maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Uraian Program	2016	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>068.01 - Rupiah Murni</b>		
068.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya BKKBN	676,264,415,000.00	678,702,305,000.00
068.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	18,500,000,000.00	16,663,748,000.00
068.01.04 Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	286,701,063,000.00	250,059,797,000.00
068.01.06 Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	2,883,192,264,000.00	2,614,143,866,000.00
<b>068.10 - Hibah Langsung Dalam Negeri</b>		
068.10.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	0.00	35,590,000.00
068.10.06 Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	0.00	23,664,410,000.00
<b>068.11 - Hibah Langsung Luar Negeri</b>		
068.11.06 Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	0.00	2,566,633,000.00
<b>Total Belanja</b>	<b>3,864,657,742,000.00</b>	<b>3,585,836,349,000.00</b>

Berdasarkan tabel diatas, selama Tahun Anggaran 2016 BKKBN memperoleh sumber dana dari APBN dan Hibah. Sumber dana Hibah BKKBN terdiri dari :

1. Hibah Langsung Dalam Negeri

1.a) Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat (Satker 017393)

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 No.978.3/26-VA/KBKK/2016 dan 589/HK.102/J.5/2016 tertanggal 15 Februari 2016, yang kemudian dilakukan Addendum pada tanggal 02 November 2016 berdasarkan Naskah Addendum No. No.978/Kep.86-VA/KBKK/2016 dan 5729/HK.109/JS/2016 terdapat kesepakatan untuk melaksanakan Perjanjian Belanja Hibah Daerah/Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) berupa uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Barat senilai Rp.23.200.000.000,00. HLDN ini telah disahkan oleh Kementerian Keuangan RI sesuai Surat No.S-1245/PR.8/2016 tanggal 06 April 2016 dengan Register HLDN No.

2RBRLUTA dan telah disahkan dalam DIPA No.DIPA-068.01.2.017393/2016 Revisi ke-5 Tanggal 25 Nopember 2016.

Dana hibah tersebut digunakan untuk peningkatan kinerja program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana Propinsi Jawa Barat berupa Belanja Operasional, Evaluasi dan Monitoring Tenaga Penggerak Desa/Keluarahan (TPD/K) yang dianggarkan dengan menggunakan MAK 521219 (Belanja Barang Non-Operasional Lainnya) pada program 068.01.06 Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

1.b) Perwakilan BKKBN Prop. Banten(Satker 631610)

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perwakilan BKKBN Propinsi Banten tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Perwakilan BKKBN Tahun 2016 No.978/1658-BPPMD/2016 dan 1727/RC.002/J1/2016 tertanggal 26 Mei 2016 terdapat kesepakatan untuk melaksanakan Perjanjian Belanja Hibah Daerah/Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) berupa uang dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Perwakilan BKKBN Propinsi Banten senilai Rp.500.000.000,00. HLDN ini telah disahkan oleh Kementerian Keuangan RI dengan Register HLDN No. 2BTZTNZA dan telah disahkan dalam DIPA Revisi No.068.01.2.631610/2016 Rev.5 Tanggal 28 November 2016.

Pemberian hibah uang tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Prop. Banten dan bertujuan untuk mendukung pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Prop. Banten, yang dianggarkan dalam Program 068.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN sebesar Rp.35.590.000,00 dan dalam Program 068.01.06 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Prop. Banten Tahun 2016 sebesar Rp.464.410.000,00.

2. Hibah Langsung Luar Negeri

Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR – Satker 649505)

Berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor 1088/RC-201/E3/2016 tanggal 30 Desember 2016, telah digulirkan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) UNFPA pada Kedeputian Bidang KBKR senilai Rp.2.566.633.000,00 berdasarkan Register/Perjanjian Hibah Nomor 27KR7AMA tanggal 29 Maret 2016 untuk kegiatan <sup>1)</sup> IDN09RFP, *Right Based Family Planning Cooperation* dan <sup>2)</sup> IDN09PDA, *Population Dynamics and Data Analysis*.

HLLN UNFPA kepada BKKBN di TA 2016 telah disahkan dalam Revisi Anggaran sesuai Surat DJPB Kanwil - Kementerian Keuangan dan termuat dalam DIPA Petikan Revisi ke-04 Nomor DIPA-068.01.1.649505/2016 tanggal 15 November 2016.

## B. 1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.43.998.599.312,00 atau mencapai ∞ persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. BKKBN tidak menetapkan estimasi pendapatan di tahun 2016, sehingga persentase realisasi terhadap estimasi pendapatan adalah ∞ persen.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

MAP	Uraian	2016		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	122,050,000.00	∞
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	-	682,793,178.00	∞
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	126,109,059.00	∞
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	4,663,019.00	∞
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	85,917,181.00	∞
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	713,785,660.00	∞
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	-	115,832,908.00	∞
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	628,919,420.00	∞
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	39,511,535,916.00	∞
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	352,350,197.00	∞
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	-	72,134,960.00	∞
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	439,812.00	∞
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	1,582,068,002.00	∞
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>43,998,599,312.00</b>	<b>∞</b>

Realisasi Pendapatan periode 1 Januari s/d 31 Desember TA 2016 dibandingkan dengan periode 1 Januari s/d 31 Desember TA 2015 terdapat kenaikan sebesar 524,86 persen.

Hal ini disebabkan :

1. Kenaikan pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya terhadap asset tetap yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp.417.913.178,00;
2. Kenaikan pendapatan penyelesaian tuntutan ganti rugi non bendahara (TGR) yang disetorkan pada TA.2016 sebesar Rp.712.256.320,00;
3. Kenaikan penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp.35.803.971.831,00;
4. Kenaikan Penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar Rp.284.081.091,00;
5. Kenaikan Penerimaan kembali belanja bantuan sosial TAYL sebesar Rp.72.134.960,00;
6. Kenaikan pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp.1.380.120.123,00.

### Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

MAP	URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK/TURUN	%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	122,050,000.00	97,326,000.00	24,724,000.00	25.40
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	682,793,178.00	264,880,000.00	417,913,178.00	157.77
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	126,109,059.00	607,997,330.00	(481,888,271.00)	(79.26)
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan instansi Kesehatan lainnya	-	1,147,768.00	(1,147,768.00)	∞
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	4,663,019.00	7,694,993.00	(3,031,974.00)	(39.40)
423319	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	-	1,420,403.00	(1,420,403.00)	(100.00)
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	85,917,181.00	290,038,614.00	(204,121,433.00)	(70.38)
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	713,785,660.00	1,529,340.00	712,256,320.00	46,572.79
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	115,832,908.00	990,313,201.00	(874,480,293.00)	(88.30)
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	25,900.00	(25,900.00)	(100.00)
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	628,919,420.00	757,702,144.00	(128,782,724.00)	(17.00)
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	39,511,535,916.00	3,707,564,085.00	35,803,971,831.00	965.70
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	352,350,197.00	68,269,106.00	284,081,091.00	416.12
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	-	1,076,128.00	(1,076,128.00)	(100.00)
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	72,134,960.00	-	72,134,960.00	∞
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	-	42,500,000.00	(42,500,000.00)	(100.00)
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	439,812.00	-	439,812.00	∞
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,582,068,002.00	201,811,879.00	1,380,256,123.00	683.93
	<b>Jumlah</b>	<b>43,998,599,312.00</b>	<b>7,041,296,891.00</b>	<b>36,957,302,421.00</b>	<b>524.86</b>

Rincian pendapatan per satker dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (MAP 423122) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423122
1	Kalimantan Tengah	1,950,000.00
2	Sulawesi Tenggara	1,700,000.00
3	Sumatera Utara	79,700,000.00
4	Sulawesi Selatan	38,700,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>122,050,000.00</b>

2. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya (MAP 423129) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423129	No	Satker	MAK 423129
1	Aceh	103,200,000.00	10	Kalimantan Selatan	152,773,178.00
2	Riau	16,100,000.00	11	Kalimantan Timur	61,860,000.00
3	Sumatera Barat	15,600,000.00	12	Gorontalo	101,500,000.00
4	Jambi	33,680,000.00	13	Sulawesi Tengah	32,250,000.00
5	Bangka Belitung	2,450,000.00	14	Maluku Utara	1,500,000.00
6	Bengkulu	26,000,000.00	15	Papua Barat	600,000.00
7	Lampung	50,080,000.00	16	Jawa Tengah	71,250,000.00
8	Banten	7,200,000.00			
9	Jawa Timur	6,750,000.00		<b>TOTAL</b>	<b>682,793,178.00</b>

3. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (MAP 423141) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423141	No	Satker	MAK 423141
1	Aceh	420,000.00	14	Kalimantan Tengah	6,284,272.00
2	Riau	3,025,532.00	15	Kalimantan Selatan	684,000.00
3	Sumatera Barat	942,400.00	16	Kalimantan Timur	13,642,653.00
4	Jambi	1,079,601.00	17	Sulawesi Utara	1,023,132.00
5	Sumatera Selatan	591,923.00	18	Sulawesi Tengah	4,725,000.00
6	Bengkulu	1,785,104.00	19	Sulawesi Tenggara	2,640,000.00
7	Lampung	1,158,924.00	20	Papua	1,955,862.00
8	D.I Yogyakarta	7,015,901.00	21	Sumatera Utara	130,000.00
9	Jawa Timur	680,013.00	22	Jawa Tengah	821,699.00
10	Bali	2,036,400.00	23	Sulawesi Selatan	464,600.00
11	NTB	2,308,497.00	24	Sekretariat Utama	68,533,778.00
12	NTT	1,087,788.00			
13	Kalimantan Barat	3,071,980.00		<b>TOTAL</b>	<b>126,109,059.00</b>

4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan(Jasa Giro) (MAP 423221) pada beberapa satker sebagai berikut :

No	Satker	MAK 423221
1	Sulawesi Selatan	1,523,134.00
2	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Program	2,129,308.00
3	KBKR	1,010,577.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,663,019.00</b>

Pendapatan ini merupakan pendapatan jasa giro pada Rekening Bendahara Pengeluaran satuan kerja BKKBN yang belum terdaftar TNP (*Treasury Notional Pooling*), sehingga jasa giro yang terbentuk pada rekening korannya tidak secara otomatis terdebit ke Kas Negara dan harus disetor secara manual ke kas negara. BKKBN sudah mengusulkan pendaftaran TNP tersebut ke Dirjen Perbendaharaan pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Hal tersebut saat ini masih menunggu konfirmasi dari Direktorat PKN pada bulan Maret 2017.

5. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (MAP 423752) pada beberapa satker sebagai berikut :

No	Satker	MAK 423752	Keterangan
1	Jambi	453,980.00	dari SPM
2	Bengkulu	6,088,968.00	Denda keterlambatan penyedia atas retensi kontrak pengadaan rehab gudang
3	Jawa Timur	3,661,167.00	dari SPM
4	Bali	10,719,515.00	- Denda keterlambatan penyedia atas penyelesaian Rehab gudang arsip dan rumah dinas Rp.3.057.642,00 - Denda keterlambatan penyedia atas pengadaan cetak kartu/formulir pelayanan kontrasepsi Rp.4.203.743 - SPM Rp.3.458.130,00
5	NTB	1,727,730.00	dari SPM
6	Gorontalo	10,195,680.00	dari SPM
7	Jawa Barat	25,070,600.00	- Kelebihan pengembalian perjalanan dinas senilai Rp.220.600,00 - Kelebihan pembayaran narasumber dan moderator senilai Rp.24.850.000,00
8	Sumatera Utara	13,149,811.00	Denda keterlambatan penyedia atas pengadaan buku 7 dimensi lansia tangguh
9	KBKR	14,849,730.00	Denda keterlambatan penyedia atas penyelesaian pekerjaan ADS senilai Rp.14.849.730,00
<b>TOTAL</b>		<b>85,917,181.00</b>	

Untuk Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat terdapat kesalahan penyetoran MAP yang akan dilakukan ralat akun pada KPPN setempat dan diperbaiki pada saat penyusunan Laporan Keuangan Audited TA 2016.

6. Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara (MAP 423921) pada beberapa satker sebagai berikut :

No.	Satker	MAK 423921	No.	Satker	MAK 423921
1	Sulawesi Utara	15,092,160.00	4	Ditvokkom	650,000,000.00
2	Kepulauan Riau	31,193,500.00			
3	Sestama	17,500,000.00		<b>TOTAL</b>	<b>713,785,660.00</b>

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara dijelaskan sebagai berikut :

- MAP 423921 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulut merupakan Tagihan TGR yang sudah terbentuk piutang TGR di Neraca dengan berdasarkan SKTJM;
- MAP 423921 pada Satuan Kerja Sestama merupakan Tagihan TGR yang sudah terbentuk piutang TGR di Neraca dengan berdasarkan SKTJM;

- c. MAP 423921 pada Satuan Kerja Ditvokom merupakan TGR Pihak Ketiga (Penyedia) atas Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA TV TA 2013 sebagai tindak lanjut dari Temuan BPK terhadap pemeriksaan LK BKKBN TA 2013.
- d. MAP 423921 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Kepulauan Riau merupakan pengembalian kelebihan belanja perjalanan dinas, honor kegiatan, honor tim dan panitia, penggandaan/ATK, konsumsi dan belanja operasional lainnya sebagai tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan aparat pengawasan internal BKKBN.
7. Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (MAP 423922) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423922	No	Satker	MAK 423922
1	Sumatera Barat	3,631,000.00	6	Sumatera Utara	5,056,710.00
2	NTT	21,405,050.00	7	Sestama	3,000,000.00
3	Sulawesi Utara	23,412,120.00	8	KSPK	3,855,000.00
4	Sulawesi Tengah	14,724,028.00	9	KBKR	3,300,000.00
5	Jawa Barat	37,449,000.00		<b>TOTAL</b>	<b>115,832,908.00</b>

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dijelaskan sebagai berikut :

- a. MAP 423922 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sumatera Barat merupakan pengembalian gaji dan tunjangan kinerja pegawai sebagai tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan aparat pengawasan internal BKKBN.
- b. MAP 423922 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. NTT sebesar Rp.7.344.250 merupakan kelebihan bayar atas pengadaan rehabilitasi gedung asrama balai diklat BKKBN NTT sedangkan sisanya yang sebesar Rp.14.060.800,00 merupakan pengembalian kelebihan belanja barang sebagai tindak lanjut dari hasil temuan audit kinerja aparat pengawasan internal BKKBN;
- c. MAP 423922 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulut merupakan Tagihan TGR yang sudah terbentuk piutang TGR di Neraca dengan berdasarkan SKTJM;
- d. MAP 423922 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulteng, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Kedeputusan KBKR merupakan pengembalian kelebihan belanja barang sebagai tindak lanjut dari hasil temuan audit kinerja aparat pengawasan internal BKKBN;
- e. MAP 423922 pada Satuan Kerja Sestama terdiri dari Tagihan TGR yang

sudah terbentuk piutang TGR di Neraca dengan berdasarkan SKTJM sebesar Rp.2.000.000,00 dan TGR kehilangan Laptop merk Lenovo sebesar Rp.1.000.000,00;

- f. MAP 423922 pada Satuan Kerja KSPK merupakan pengembalian kelebihan belanja perjanan dinas dan honor narasumber sebagai tindak lanjut dari hasil temuan audit kinerja aparat pengawasan internal BKKBN.

8. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (MAP 423951) pada beberapa satker berikut ini:

No	Satker	MAK 423951	No	Satker	MAK 423951
1	Riau	3,353,221.00	17	Gorontalo	1,800,000.00
2	Sumatera Barat	42,450,904.00	18	Sulawesi Tengah	268.00
3	Sumatera Selatan	32,537,613.00	19	Sulawesi Tenggara	19,821,373.00
4	Bangka Belitung	14,425,195.00	20	Maluku	3,889,212.00
5	Bengkulu	10,322,616.00	21	Maluku Utara	14,758,165.00
6	Banten	6,127,289.00	22	Papua	4,968,118.00
7	D.I Yogya	38,626,841.00	23	Sulawesi Barat	3,596,336.00
8	Bali	752,210.00	24	Jawa Barat	38,198,397.00
9	NTB	16,850,881.00	25	Sumatera Utara	126.00
10	NTT	16,796,228.00	26	Jawa Tengah	17,318,260.00
11	Kalimantan Barat	30,600.00	27	Sulawesi Selatan	21,398,937.00
12	Kalimantan Selatan	37,280,000.00	28	Kepulauan Riau	178.00
13	Kalimantan Timur	150.00	29	Sestama	275,172,687.00
14	Sulawesi Utara	8,443,615.00		<b>TOTAL</b>	<b>628,919,420.00</b>

9. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (MAP 423952) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423952	No	Satker	MAK 423952
1	Sestama	42,648,600.00	20	Sulawesi Tenggara	232,441,850.00
2	Jawa Barat	413,849,496.00	21	Maluku	244,184,000.00
3	Jawa Tengah	240,662,680.00	22	NTT	175,266,300.00
4	D.I Yogyakarta	57,971,100.00	23	Bengkulu	6,792,500.00
5	Jawa Timur	80,409,135.00	24	Bangka Belitung	24,140,409.00
6	Aceh	32,664,000.00	25	Banten	270,000.00
7	Sumatera Utara	60,520,000.00	26	Gorontalo	2,690,000.00
8	Sumatera Barat	679,849,719.00	27	Maluku Utara	115,714,600.00
9	Sumatera Selatan	1,013,200.00	28	KBKR	34,998,286,762.00
10	Lampung	25,539,685.00	29	KSPK	76,481,254.00
11	Kalimantan Barat	46,732,961.00	30	Latbang	103,381,900.00
12	Kalimantan Selatan	27,268,300.00	31	Irtama	137,246,492.00
13	Sulawesi Utara	1,770,000.00	32	Sulawesi Barat	44,895,821.00
14	Sulawesi Selatan	432,624,065.00	33	Ditvokkom	270,175,000.00
15	Bali	20,835,850.00	34	Puslitbang	151,638,144.00
16	NTB	89,152,016.00	35	Adpin	66,469,000.00
17	Riau	153,791,441.00	36	Kependudukan	358,693,202.00
18	Jambi	40,032,534.00			
19	Kalimantan Tengah	55,433,900.00		<b>TOTAL</b>	<b>39,511,535,916.00</b>

10. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (MAP 423953) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423953	No	Satker	MAK 423953
1	Sestama	30,000,000.00	6	Banten	2,851,885.00
2	Sumatera Utara	195,000.00	7	Maluku Utara	38,675,047.00
3	Sumatera Barat	648,640.00	8	Adpin	259,590,000.00
4	Bali	100,000.00	9	Kependudukan	17,830,000.00
5	Riau	2,459,625.00		<b>TOTAL</b>	<b>352,350,197.00</b>

Penerimaan kembali belanja modal lainnya TAYL terbesar BKKBN terdapat pada satker ADPIN sebesar Rp.259.590.000,00 yang merupakan pengembalian kelebihan jasa konsultasi PT Mitra Integrasi Informatika pada pengadaan Data Basis Online TA 2008 atas hasil temuan pemeriksaan BPK TA 2009.

11. Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL (MAP 423957) pada Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah sebesar Rp.72.134.960,00. Pada Laporan Keuangan Audited BKKBN TA 2016, pendapatan ini akan dilakukan

transfer keluar ke satker KSPK untuk kemudian dicatat sebagai pengurang piutang jangka panjang, dimana aset piutang dana bansos terkait MAP 423957 tersebut diatas terdapat pada Neraca Satker KSPK;

12. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (MAP 423991) pada Satker Sekretariat Utama sebesar Rp.439.812,00. Saat ini sudah dilakukan pengajuan ralat akun menjadi MAP 423951 ke KPPN Jakarta V namun belum terbit pengesahannya, sehingga baru dapat diperbaiki pada Laporan Keuangan Audited TA 2016;

13. Pendapatan Anggaran Lain-lain (MAP 423999) pada beberapa satker berikut ini :

No.	Satker	MAK 423999	No.	Satker	MAK 423999
1	Sestama	4,495,459.00	8	NTT	737,558.00
2	Sulawesi Selatan	5,909.00	9	KBKR	1,576,478,193.00
3	Sulawesi Tengah	308.00	10	DKI	86,388.00
4	Maluku	187.00			
5	Papua	128,000.00		<b>TOTAL</b>	<b>1,581,932,002.00</b>

MAP 423999 pada Satker sestama merupakan kesalahan penyetoran akun yang seharusnya menggunakan MAP 423951 Sudah dilakukan pengajuan ralat akun ke KPPN Jakarta V namun belum terbit pengesahannya, sehingga baru dapat diperbaiki pada Laporan Keuangan Audited TA 2016.

Realisasi Belanja  
Rp.2.620.199.41  
5.129,00

## B.2. BELANJA

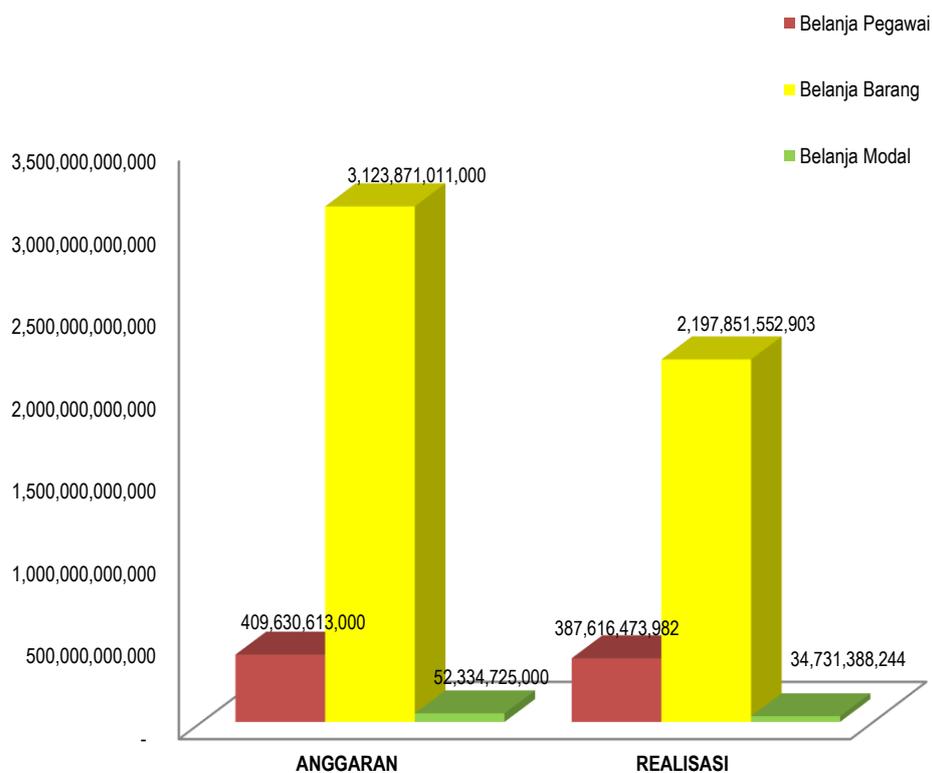
Realisasi belanja setelah pengembalian belanja BKKBN selama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.2.620.199.415.129,00 atau 73,07% dari anggaran belanja setelah revisi sebesar Rp.3.585.836.349.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
<b>Rupiah Murni</b>			
Belanja Pegawai	409,630,613,000.00	388,163,947,741.00	94.76
Belanja Barang	3,097,604,378,000.00	2,175,791,201,873.00	70.24
Belanja Modal	52,334,725,000.00	34,731,390,454.00	66.36
<b>Pinjaman dan Hibah</b>			
Belanja Barang	26,266,633,000.00	25,161,097,799.00	95.79
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3,585,836,349,000.00</b>	<b>2,623,847,637,867.00</b>	<b>73.17</b>
Pengembalian Belanja	0.00	(3,648,222,738.00)	∞
<b>Total Belanja</b>	<b>3,585,836,349,000.00</b>	<b>2,620,199,415,129.00</b>	<b>73.07</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016  
(dalam rupiah)**



Realisasi Belanja TA 2016 sebesar Rp.2.620.199.415.129,00, mengalami penurunan sebesar 0,17% dibandingkan pada TA 2015 sebesar Rp.2.624.712.556.905,00. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya ketentuan efisiensi pagu dan pemotongan anggaran beberapa kali sehingga menyebabkan program disesuaikan menunggu hasil revisi. Alibat dari adanya efisiensi, secara total pagu BKKBN mengalami penurunan sebesar Rp.305.088.026.000,00 yang terdiri dari efisiensi pagu BKKBN pusat dan propinsi masing-masing sebesar Rp.44.548.769.000,00 dan Rp.260.539.257.000,00;
2. Adanya ketentuan efisiensi dan surat edaran Dirjen Perbendaharaan pada bulan Oktober 2016 yang menyebutkan bahwa satuan kerja kementerian/lembaga tidak diperkenankan mengajukan TUP, meskipun ketentuan tersebut dicabut kembali pada bulan Desember 2016.
3. Bahwa diantara nilai pagu BKKBN sebesar Rp.3.585.836.349.000,00 terdapat/termasuk pagu dana blokir (*selfblocking*) sebesar Rp.774.261.269.000,00 yang berpengaruh sebagai pembanding terhadap realisasi belanja BKKBN. Nilai pagu BKKBN tanpa pagu *self blocking* adalah sebesar Rp.2.811.575.080.000,00, sehingga jika dihitung prosentase realisasi belanja terhadap pagu tanpa *self blocking* dapat mencapai 93,19 persen;
4. Rendahnya realisasi belanja barang pada TA 2016 antara lain :
  - a. Rendahnya realisasi Belanja Barang Non-Operasional dengan total capaian realisasi mata anggaran ini hanya sebesar 59,23 persen sebagai akibat dari rendahnya realisasi pengajuan klaim penggerakkan dan pemantapan pelayanan KB Baru MKJP yang menggunakan MAK 521219, rendahnya realisasi anggaran honor output kegiatan yang menggunakan MAK 521213 karena adanya ketentuan bahwa honor output kegiatan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi pekerjaan tidak dapat dibayarkan serta rendahnya realisasi anggaran belanja bahan terkait konsumsi, ATK yang melekat pada kegiatan, dokumentasi, percetakan dan penggandaan serta spanduk;
  - b. Penurunan realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp.34.660.178.442,00 atau hanya mencapai 48,76 persen, terutama pada belanja persediaan konsumsi. Adanya ketentuan dan syarat mengenai realisasi belanja persediaan konsumsi dan pencatatannya sehingga beberapa satuan kerja membatasi realisasi belanja tersebut;

- c. Rendahnya realisasi belanja langganan daya jasa telepon hanya mencapai 59,10 persen dikarenakan adanya ketentuan dari Biro Umum mengenai pembatasan penggunaan telepon kantor untuk keperluan pribadi dan penegasan penggunaannya untuk keperluan penting operasional kantor;
  - d. Rendahnya realisasi belanja jasa pos dan giro hanya mencapai 51,04 persen dikarenakan meningkatnya pengiriman surat melalui media elektronik (mengikuti perkembangan informasi dan teknologi);
  - e. Rendahnya realisasi belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin hanya mencapai 29,54 persen;
  - f. Menurunnya frekuensi perjalanan dinas dalam negeri sehingga realisasi belanjanya hanya mencapai 69,94 persen;
  - g. Rendahnya realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda antara lain :
    - Realisasi belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan ke masyarakat (MAK 526112) yang hanya mencapai 67,85%
    - Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526113) pada BKKBN Proponsi Jawa Barat yaitu untuk pembangunan tugu yang hanya mencapai 25 persen.
5. Rendahnya realisasi belanja modal dalam rangka mendukung rencana kerja strategis BKKBN antara lain :
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurun disebabkan karena tidak terealisasinya Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin (MAK 532112) sebesar Rp. 28.092.000,00 dan kurang optimalnya penyerapan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111) mencapai 58,27 persen;
  - b. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurun disebabkan karena kurang optimalnya penyerapan realisasi Belanja Modal Jaringan (MAK 534131) dari anggaran sebesar Rp.384.900.000,00 terealisasi sebesar Rp.129.541.200,00 atau terserap 33,66 persen;
  - c. Terdapat pengadaan belanja modal yang baru dilaksanakan pada akhir Triwulan III, kemudian mengalami gagal lelang sehingga belanja modal tidak direalisasikan;
  - d. Tingginya pagu *selfblocking* BKKBN pada anggaran belanja modal, dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai dan belanja barang.

## Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

Uraian Akun dan Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
	Periode 1 Jan s/d 31 Deseember 2016	Periode 1 Jan s/d 31 Deseember 2015	Rp	%
<b>I. TRANSAKSI KAS</b>				
<b>I.1. Rupiah Murni</b>				
51 Belanja Pegawai	387,616,473,982.00	337,714,880,224.00	49,901,593,758.00	14.78
52 Belanja Barang	2,172,690,455,104.00	2,186,081,987,652.00	(13,391,532,548.00)	(0.61)
53 Belanja Modal	34,731,388,244.00	74,887,011,104.00	(40,155,622,860.00)	(53.62)
<b>I.2. Pinjaman dan Hibah</b>				
52 Belanja Barang	25,161,097,799.00	26,028,677,925.00	(867,580,126.00)	(3.33)
<b>JUMLAH TRANSAKSI KAS</b>	<b>2,620,199,415,129.00</b>	<b>2,624,712,556,905.00</b>	<b>(4,513,141,776.00)</b>	<b>(0.17)</b>
<b>II. TRANSAKSI NON KAS</b>				
52 Belanja Barang	-	-	-	-
<b>JUMLAH TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2,620,199,415,129.00</b>	<b>2,624,712,556,905.00</b>	<b>(4,513,141,776.00)</b>	<b>(0.17)</b>

Belanja Pegawai

Rp.387.616.473.982,00

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.387.616.473.982,00 dan Rp.337.714.880.224,00 atau terjadi kenaikan sebesar 14,78% dari TA yang lalu. Begitupula jika dilihat dari prosentase capaian realisasi MAK 51, TA 2016 juga mengalami kenaikan dibandingkan TA 2015 (prosentase realisasi MAK 51 mencapai 88,38% di TA 2015, kemudian naik di TA 2016 menjadi 94,43%). Kenaikan realisasi sebesar 14,78% disebabkan karena meningkatnya kebutuhan belanja pegawai sebagai akibat dari :

1. Adanya kenaikan belanja pegawai untuk tunjangan khusus/kegiatan yang mengalami kenaikan selama periode di Tahun Anggaran 2016;
2. Adanya kebijakan promosi dan mutasi pegawai BKKBN Pusat dan Propinsi yang berpengaruh pada gaji pokok dan tunjangan selama periode Tahun Anggaran 2016;
3. Adanya kenaikan jumlah pegawai baru Non PNS BKKBN yang telah direkrut dengan periode mulai masa tugasnya di Tahun Anggaran 2016;
4. Adanya kenaikan belanja uang lembur pegawai BKKBN di Tahun Anggaran 2016 dengan kegiatan rapat di kantor diluar jam kerja (RDK).

## Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

Uraian	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2016	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	162,553,297,270.00	151,697,314,380.00	10,855,982,890.00	7.16
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,199,726.00	3,129,195.00	(929,469.00)	(29.70)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10,714,873,816.00	10,727,127,540.00	(12,253,724.00)	(0.11)
Belanja Tunj. Anak PNS	2,671,157,074.00	2,714,364,245.00	(43,207,171.00)	(1.59)
Belanja Tunj. Struktural PNS	12,261,220,000.00	12,413,200,000.00	(151,980,000.00)	(1.22)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,277,235,000.00	3,528,980,000.00	(251,745,000.00)	(7.13)
Belanja Tunj. PPh PNS	2,918,401,128.00	4,312,614,438.00	(1,394,213,310.00)	(32.33)
Belanja Tunj. Beras PNS	7,670,491,730.00	7,913,264,070.00	(242,772,340.00)	(3.07)
Belanja Uang Makan PNS	18,490,359,800.00	20,455,093,600.00	(1,964,733,800.00)	(9.61)
Belanja tunjangan khusus papua PNS	575,375,000.00	568,825,000.00	6,550,000.00	1.15
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	-	55,344,000.00	(55,344,000.00)	(100.00)
Belanja Tunj. Umum PNS	4,611,635,000.00	4,702,315,000.00	(90,680,000.00)	(1.93)
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS, TNI/POLRI	-	23,357,700.00	(23,357,700.00)	(100.00)
Belanja Pegawai Non PNS	71,500,000.00	40,150,000.00	31,350,000.00	78.08
Belanja Uang Lembur	184,504,800.00	150,148,000.00	34,356,800.00	22.88
Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Keg)	162,161,697,397.00	119,121,598,906.00	43,040,098,491.00	36.13
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>388,163,947,741.00</b>	<b>338,426,826,074.00</b>	<b>49,737,121,667.00</b>	<b>14.70</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	(547,473,759.00)	(711,945,850.00)	164,472,091.00	(23.10)
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>387,616,473,982.00</b>	<b>337,714,880,224.00</b>	<b>49,901,593,758.00</b>	<b>14.78</b>

Belanja Barang  
Rp.2.197.851.552.  
903,00

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.197.851.552.903,00 dan Rp.2.208.075.568.252,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan 0,65 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Rendahnya realisasi belanja barang pada TA 2016 disebabkan antara lain :

- a. Rendahnya realisasi Belanja Barang Non-Operasional dengan total capaian realisasi mata anggaran ini hanya sebesar 59,23 persen sebagai akibat dari rendahnya realisasi pengajuan klaim penggerakkan dan pemantapan

pelayanan KB Baru MKJP yang menggunakan MAK 521219, rendahnya realisasi anggaran honor output kegiatan yang menggunakan MAK 521213 karena adanya ketentuan bahwa honor output kegiatan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi pekerjaan tidak dapat dibayarkan serta rendahnya realisasi anggaran belanja bahan terkait konsumsi, ATK yang melekat pada kegiatan, dokumentasi, percetakan dan penggandaan serta spanduk;

- b. Penurunan realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp.34.660.178.442,00 atau hanya mencapai 48,76 persen, terutama pada belanja persediaan konsumsi. Adanya ketentuan dan syarat mengenai realisasi belanja persediaan konsumsi dan pencatatannya sehingga beberapa satuan kerja membatasi realisasi belanja tersebut;
- c. Rendahnya realisasi belanja langganan daya jasa telepon hanya mencapai 59,10 persen dikarenakan adanya ketentuan dari Biro Umum mengenai pembatasan penggunaan telepon kantor untuk keperluan pribadi dan penegasan penggunaannya untuk keperluan penting operasional kantor;
- d. Rendahnya realisasi belanja jasa pos dan giro hanya mencapai 51,04 persen dikarenakan meningkatnya pengiriman surat melalui media elektronik (mengikuti perkembangan informasi dan teknologi);
- e. Rendahnya realisasi belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin hanya mencapai 29,54 persen;
- f. Menurunnya frekuensi perjalanan dinas dalam negeri sehingga realisasi belanjanya hanya mencapai 69,94 persen;
- g. Rendahnya realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda antara lain :
  - Realisasi belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan ke masyarakat (MAK 526112) yang hanya mencapai 67,85%
  - Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526113) pada BKKBN Proponsi Jawa Barat yaitu untuk pembangunan tugu yang hanya mencapai 25 persen

## Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015

KODE AKUN	URAIAN AKUN	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2016	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Naik / Turun	%
5211	Belanja Barang Operasional	53.233.203.905,00	36.449.364.310,00	16.783.839.595,00	46,05
5212	Belanja Barang Non-Operasional	576.348.556.577,00	1.529.516.618.569,00	(953.168.061.992,00)	(62,32)
5218	Belanja Barang Persediaan	36.418.489.406,00	71.078.667.848,00	(34.660.178.442,00)	(48,76)
5221	Belanja Jasa	171.780.605.608,00	211.477.515.715,00	(39.696.910.107,00)	(18,77)
5231	Belanja Pemeliharaan	28.217.544.231,00	26.701.133.390,00	1.516.410.841,00	5,68
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	372.215.165.081,00	323.938.016.319,00	48.277.148.762,00	14,90
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.034.874.135,00	1.699.702.564,00	1.335.171.571,00	78,55
5261	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.687.160.550,00	3.406.916.643,00	(1.719.756.093,00)	(50,48)
5262	Belanja Barang Penunjang Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantu	88.160.000,00	0,00	88.160.000,00	∞
5263	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	957.928.540.179,00	11.704.688.851,00	946.223.851.328,00	8.084,14
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>2.200.952.299.672,00</b>	<b>2.215.972.624.209,00</b>	<b>(15.020.324.537,00)</b>	<b>(0,68)</b>
	Pengembalian Belanja Barang	(3.100.746.769,00)	(3.861.958.632,00)	761.211.863,00	(19,71)
	<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>2.197.851.552.903,00</b>	<b>2.212.110.665.577,00</b>	<b>(14.259.112.674,00)</b>	<b>(0,64)</b>

Berdasarkan tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016 pada halaman 20 dan 31, terdapat realisasi belanja barang yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp.2.598.686.540.068,00 dan dari Hibah sebesar Rp.25.161.097.799,00. Realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah terdiri dari :

1. Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)

1.a) Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat(Satker 017393)

Sesuai penjelasan sumber dana belanja barang pada hal.20-21, telah diterbitkan :

- ⊙ Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) No.160950000000006 tanggal 02 September 2016 atas realisasi belanja barang MAK 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) sebesar Rp.13.799.984.000,00;
- ⊙ Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) No. 160950500340001 tanggal 31 Desember 2016 atas realisasi belanja barang MAK 526311 (Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda) sebesar Rp.99.500.000,00 dan MAK 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) sebesar Rp.8.312.629.800,00
- ⊙ Dari total pagu HLDN Satker 017393 sebesar

Rp.23.200.000.000,00, telah terealisasi dengan menggunakan belanja barang sebesar Rp.22.212.113.800,00 sehingga terdapat sisa hibah sebesar Rp.987.886.200,00. Sisa hibah tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disahkan oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN setempat dengan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) No, 160950500340002 tanggal 31 Desember 2016.

1.b) Perwakilan BKKBN Prop. Banten (Satker 631610)

Sesuai penjelasan sumber dana belanja barang pada hal. 21, telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dibawah ini atas realisasi belanja barang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2HL / SPHL	Tanggal	Akun Realisasi Belanja	Nilai
	<b>Pagu Hibah Satker 631610.....</b>			<b>500,000,000.00</b>
1.	00494/631610/HLD/2016	30-12-2016	521211	4,200,000.00
	160200500390001	30-12-2016	522151	9,500,000.00
			524111	77,500,000.00
			524119	254,200,000.00
			526311	38,500,000.00
2.	00495/631610/HLD/2016	30-12-2016	521119	15,250,000.00
	160200500390002	30-12-2016	521211	14,000,000.00
			522141	5,760,000.00
			522151	16,750,000.00
			524114	26,250,000.00
3.	00496/631610/HLD/2016	30-12-2016	521119	1,600,000.00
	160200500390003	30-12-2016	521211	6,790,000.00
			522151	6,500,000.00
			524111	9,960,000.00
			524114	10,500,000.00
	<b>JUMLAH</b>			<b>497,260,000.00</b>
	<b>SISA HIBAH</b>			<b>2,740,000.00</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat sisa hibah sebesar Rp.2.740.000,00 yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN Banten berdasarkan Surat Pengembalian Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) Nomor 160200500390004 tanggal 31 Desember 2016 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2016.

## 2. Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN)

### 2.a) Kedeputan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Satker 649505)

Sesuai penjelasan sumber dana belanja barang pada hal.21, telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) No.161400000000066 tanggal 31 Desember 2016 atas realisasi belanja barang hibah langsung luar negeri yang menggunakan MAK 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) sebesar Rp.2.451.723.999,00.

Berdasarkan SPHL tersebut tercatat bahwa dari total anggaran HLLN Satker 649505 sebesar Rp.2.566.633.000,00 yang dilaporkan ke DJPU sebagai pendapatan hibah dan direncanakan akan ditarik adalah sebesar Rp.2.483.602.415,00, namun ternyata realisasinya hanya sebesar Rp.2.451.723.999,00 sehingga terdapat saldo dana hibah yang belum terealisasi sebesar Rp.31.878.416,00 dan tercatat di Neraca pada akun Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah.

Terhadap saldo dana hibah HLLN yang belum digunakan pada TA 2016 ini direncanakan akan digulirkan kembali dan dianggarkan dalam pagu anggaran Satker 649505 TA 2017.

*Belanja Modal*  
*Rp.34.731.388.244*  
*,00*

### **B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.34.731.388.244,00 dan Rp. 74.887.011.104,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rendahnya realisasi belanja modal dalam rangka mendukung rencana kerja strategis BKKBN antara lain :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurun disebabkan karena tidak terealisasinya Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin (MAK 532112) sebesar Rp. 28.092.000,00 dan kurang optimalnya penyerapan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111) mencapai 58,27 persen;
- b. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurun disebabkan karena kurang optimalnya penyerapan realisasi Belanja Modal Jaringan (MAK 534131) dari anggaran sebesar Rp.384.900.000,00 terealisasi sebesar

Rp.129.541.200,00 atau terserap 33,66 persen;

- c. Terdapat pengadaan belanja modal yang baru dilaksanakan pada akhir Triwulan III, kemudian mengalami gagal lelang sehingga belanja modal tidak direalisasikan;
- d. Tingginya pagu *selfblocking* BKKBN pada anggaran belanja modal, dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai dan belanja barang.

### Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

Kode Akun	Uraian Akun	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2016	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Naik (Turun)	%
531	Belanja Modal Tanah	-	2.391.331.000,00	(2.391.331.000,00)	(100,00)
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.360.709.584,00	21.979.623.063,00	(5.618.913.479,00)	(25,56)
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.205.145.150,00	16.346.126.977,00	(140.981.827,00)	(0,86)
534	Belanja Modal Jaringan	234.160.200,00	262.589.000,00	(28.428.800,00)	(10,83)
536	Belanja Modal Lainnya	1.931.375.520,00	33.963.634.340,00	(32.032.258.820,00)	(94,31)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>34.731.390.454,00</b>	<b>74.943.304.380,00</b>	<b>(40.211.913.926,00)</b>	<b>(53,66)</b>
	Pengembalian Belanja	(2.210,00)	(56.293.276,00)	56.291.066,00	(100,00)
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>34.731.388.244,00</b>	<b>74.887.011.104,00</b>	<b>(40.155.622.860,00)</b>	<b>(53,62)</b>

Belanja Modal  
Tanah Rp.0,00

#### B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 2.391.331.000,00. Berdasarkan tabel dibawah, terdapat penurunan sebesar Rp.2.391.331.000,00 atau sebesar 100% dikarenakan tidak adanya belanja atau hibah tanah di TA. 2016.

### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan 2015

Kode Akun	Uraian Akun	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2016	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Naik (Turun)	%
531115	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	-	2,391,331,000.00	(2,391,331,000.00)	(100.00)
	<b>Jumlah Belanja Modal Tanah (Bruto)</b>	<b>-</b>	<b>2,391,331,000.00</b>	<b>(2,391,331,000.00)</b>	<b>(100.00)</b>
	Pengembalian Belanja	-	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Nett)</b>	<b>-</b>	<b>2,391,331,000.00</b>	<b>(2,391,331,000.00)</b>	<b>(100.00)</b>

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp.16.360.707.374  
,00

#### B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.16.360.707.374,00 dan Rp.21.965.949.163,00. Berdasarkan tabel dibawah, secara nilai pada TA 2016 terdapat penurunan

sebesar Rp.5.604,241.789,00 atau sebesar 25,51% dibandingkan TA 2015.

Prosentase capaian Realisasi MAK 532, TA 2016 mengalami penurunan dibandingkan TA 2015 (prosentase realisasi MAK 532 mencapai 90,07% di TA 2015 kemudian turun menjadi 58,24% di TA.2016). Hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin (MAK 532112) sebesar Rp. 28.092.000,00 dan rendahnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111) mencapai 58,27 persen terhadap pagu anggarannya. Sebab lainnya adalah dikarenakan pada pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin masih terdapat pagu *self blocking* yang cukup tinggi dan tidak dapat direalisasikan.

### Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015

Kode Akun	Uraian Akun	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2016	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Naik (Turun)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,335,087,313.00	21,979,623,063.00	(5,644,535,750.00)	(25.68)
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	7,872,271.00	-	7,872,271.00	∞
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	17,750,000.00	-	17,750,000.00	∞
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Bruto)</b>	<b>16,360,709,584.00</b>	<b>21,979,623,063.00</b>	<b>(5,618,913,479.00)</b>	<b>(25.56)</b>
	Pengembalian Belanja	(2,210.00)	(14,673,900.00)	14,671,690.00	(99.98)
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Nett)</b>	<b>16,360,707,374.00</b>	<b>21,964,949,163.00</b>	<b>(5,604,241,789.00)</b>	<b>(25.51)</b>

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp.16.304.507.601  
,00

### B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.16.304.507.601,00 dan Rp. 16.205.145.150,00. Berdasarkan tabel dibawah, secara nilai pada TA 2016 terdapat penurunan sebesar Rp.99.363.351,00 atau sebesar 0,61% dibandingkan TA 2015.

Penurunan diatas disebabkan nilai perencanaan anggaran kebutuhan belanja modal aset gedung dan bangunan (MAK 533) TA 2016 juga mengalami penurunan dibandingkan TA 2015 (nilai anggaran MAK 533 di TA 2015 sebesar Rp.25.787.285.000,00 menurun menjadi Rp.17.879,226.000,00 di TA 2016).

Namun jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi MAK 533 pada TA 2016 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2015 (prosentase realisasi MAK 533 mencapai 63,39% di TA 2015 kemudian naik menjadi 90,64% di TA 2016)

dimana kenaikannya disebabkan karena telah terselesaikannya pembangunan gedung pusdiklat KKBPK yang proses pengerjaannya sudah selesai sampai dengan tanggal neraca. Pembangunan Gedung tersebut sesuai Kontrak No.2411/KU.804/B5/2016 tanggal 22 September 2016 dengan nilai Rp.5.793.820.000,00 , dengan sumber dana APBN TA.2016. Pada tanggal pelaporan penyelesaian gedung tersebut telah mencapai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) No.3840/I/TU.301/B5/2016 tanggal 30 Desember 2016.

### Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015

Kode Akun	Uraian Akun	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2016	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Naik (Turun)	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,580,369,250.00	5,610,259,000.00	(3,029,889,750.00)	(54.01)
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	10,200,000.00	(10,200,000.00)	(100.00)
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	-	24,930,000.00	(24,930,000.00)	(100.00)
533115	Belanja Modal Perancangan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	133,380,000.00	348,092,000.00	(214,712,000.00)	(61.68)
533121	Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	13,491,395,000.00	10,352,645,977.00	3,138,749,023.00	30.32
	<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Bruto)</b>	<b>16,205,144,250.00</b>	<b>16,346,126,977.00</b>	<b>(140,982,727.00)</b>	<b>(0.86)</b>
	Pengembalian Belanja	-	(41,619,376.00)	41,619,376.00	(100.00)
	<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Nett)</b>	<b>16,205,144,250.00</b>	<b>16,304,507,601.00</b>	<b>(99,363,351.00)</b>	<b>(0.61)</b>

Belanja Modal  
Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp.234.160.200,00

#### B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.234.160.200,00 dan Rp.262.589.000,00. Berdasarkan tabel dibawah, secara nilai pada TA 2016 terdapat penurunan sebesar Rp.28.428.800,00 atau sebesar 10,83% dibandingkan TA 2015.

Nilai perencanaan anggaran kebutuhan belanja modal aset gedung dan bangunan (MAK 533) TA 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2015 (nilai anggaran Rp. 279.551.000,00 di TA 2015 kemudian naik menjadi Rp.497.053.000,00 di TA 2016).

Namun jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi MAK 534, TA 2016

mengalami penurunan dibandingkan TA 2015 (prosentase realisasi MAK 534 mencapai 93,93% di TA 2015 kemudian turun menjadi 47,11% di TA 2016). Hal ini disebabkan rendahnya realisasi Belanja Modal Jaringan (MAK 534131) dari anggaran sebesar Rp.384.900.000,00 terealisasi sebesar Rp.129.541.200,00 atau terserap 33,66 persen dan dikarenakan pada pagu anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan masih terdapat pagu *self blocking* yang cukup tinggi dan tidak dapat direalisasikan.

### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan 2015

Kode Akun	Uraian Akun	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2016	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Naik (Turun)	%
534131	Belanja Modal Jaringan	129,541,200.00	171,589,000.00	(42,047,800.00)	(24.50)
534161	Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	104,619,000.00	91,000,000.00	13,619,000.00	14.97
	<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Bruto)</b>	<b>234,160,200.00</b>	<b>262,589,000.00</b>	<b>(28,428,800.00)</b>	<b>(10.83)</b>
	Pengembalian Belanja	-	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Nett)</b>	<b>234,160,200.00</b>	<b>262,589,000.00</b>	<b>(28,428,800.00)</b>	<b>(10.83)</b>

Belanja Modal  
Lainnya  
Rp.1.931.375.520,  
00

#### B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.1.931.375.520,00 dan Rp. 33.963.634.340,00.

Berdasarkan tabel dibawah, secara nilai pada TA 2016 terdapat penurunan sebesar Rp.32.032.258.820,00 atau sebesar 94,31% dibandingkan TA 2015.

Penurunan diatas disebabkan nilai perencanaan anggaran belanja modal aset lainnya (MAK 536) TA 2016 menurun sebesar 94,31% jika dibandingkan dengan TA 2015 (nilai anggaran Rp. 36.173.964.000,00,00 di TA 2015 kemudian menurun menjadi Rp. 5.868.038.000,00 di TA 2016). Dan jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi MAK 536, TA 2016 mengalami penurunan dibandingkan TA 2015 (prosentase realisasi MAK 536 mencapai 93,89% di TA 2015 kemudian turun menjadi 32,91% di TA 2016),

Nilai Realisasi Belanja Modal Lainnya di TA.2016 terdapat pada Satuan Kerja Kedepatian Advokasi, Penggerakan dan Informasi (682054) sebesar Rp.5.350.540.000,00; Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Barat (018398) senilai Rp.276.825.000,00; Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi

Kalimantan Tengah (433036) senilai Rp.231.173.000,00 dan Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah (017621) senilai Rp.9.500.000,00.

### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan 2015

Kode Akun	Uraian Akun	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2016	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Naik (Turun)	%
536111	Belanja Modal Lainnya	1,931,375,520.00	33,785,634,340.00	(31,854,258,820.00)	(94.28)
536121	Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	178,000,000.00	(178,000,000.00)	(100.00)
	<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Bruto)</b>	<b>1,931,375,520.00</b>	<b>33,963,634,340.00</b>	<b>(32,032,258,820.00)</b>	<b>(94.31)</b>
	Pengembalian Belanja	-	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Nett)</b>	<b>1,931,375,520.00</b>	<b>33,963,634,340.00</b>	<b>(32,032,258,820.00)</b>	<b>(94.31)</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.1.058.400.673,0  
0

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.1.058.400.673,00 dan Rp.4.231.553.016,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015

No.	Uraian Satuan Kerja	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1	Sestama	-	111,294,246.00
2	Kedeputan Bidang KBKR	-	(330,238.00)
3	Kedeputan Bidang KSPK	-	(67,796.00)
4	Kedeputan Bidang Latbang	-	295,571,103.00
5	Irtama	260,252,425.00	231,869,900.00
6	Ditvok dan KIE	-	835,971,303.00
7	Kedeputan Bidang ADPIN	-	302,556.00
8	Puslitbang	105,625,713.00	1,883,339,101.00
9	Kedeputan Bidang Kependudukan	658,070,535.00	3,546,524.00
10	Perwakilan BKKBN Prop. Jateng	-	5.00
11	Perwakilan BKKBN Prop. Kalbar	-	3.00
12	Perwakilan BKKBN Prop. NTT	34,452,000.00	175,693,471.00
14	Perwakilan BKKBN Prop. Papua	-	195,638.00
15	Perwakilan BKKBN Prop. Maluku Utara	-	694,167,200.00
	<b>J U M L A H</b>	<b>1,058,400,673.00</b>	<b>4,231,553,016.00</b>

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.058.400.673,00 merupakan sisa UP/TUP yang masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pertanggungjawaban sisa UP/TUP Bendahara Pengeluaran TA 2016.

Seluruh saldo kas di Bendahara Pengeluaran di atas telah disetor pada bulan

Januari 2017.

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp.1.641.122.015,0  
0

## C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.1.641.122.015,00 dan Rp.6.018.061.479,00 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

### Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015

Kode Akun	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.609.243.599,00	6.018.061.479,00
111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	31.878.416,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.641.122.015,00</b>	<b>6.018.061.479,00</b>

Berdasarkan tabel perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas diatas, informasi rincian masing-masing TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

1. Informasi rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah TA 2016
2. Informasi rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran TA 2016 berdasarkan hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
3. Informasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2015

### Informasi rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah TA 2016

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah	Rincian	Jenis Transaksi
649505	KBKR	Rp 31.878.416,00	Rp 31.878.416,00	Saldo Hibah UNFPA TA 2016 yang akan digulirkan kembali dalam anggaran TA 2017
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 31.878.416,00</b>	<b>Rp 31.878.416,00</b>	

Informasi rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran TA 2016 berdasarkan hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah TA 2016	Rincian TA 2015	Jenis Transaksi TA 2015
017326	Sekretariat Utama	Rp 11.488.350,00	Rp 11.488.350,00	Pengembalian Belanja 2016 di tahun 2017
631610	Banten	Rp 205.958.375,00	Rp 205.958.375,00	Koreksi kesalahan koreksi Beban Pegawai atas Tukin Desember yang belum dibayar.
649530	Inspektorat Utama	Rp 32.050.793,00	Rp 32.050.793,00	Pengembalian Belanja 2016 di tahun 2017
017393	Jawa Barat	Rp 24.476.704,00	Rp 1.283.200,00	Pengembalian Belanja 2016 di tahun 2017
			Rp 10.493.504,00	Pengembalian Belanja 2016 di tahun 2017
			Rp 12.700.000,00	Pengembalian Perjadin 2016 di tahun 2017
017621	Jawa Tengah	Rp 10.252.275,00	Rp 4.178.500,00	Pengembalian uang makan TA 2016 di TA 2017
			Rp 6.073.775,00	Pengembalian Tunkin Desember 2016 di TA 2017
017972	DIY	Rp 423.899.660,00	Rp 16.176.000,00	Pengembalian Sisa uang makan Desember 2016 di tahun 2017
			Rp 32.700.000,00	Pengembalian sisa belanja penggerakan Tahun 2016 di Tahun 2017
			Rp 375.023.660,00	koreksi salah akun utang
018381	Sumatera Utara	Rp 16.939.946,00	Rp 680.000,00	Pengembalian honor narasumber TA 2016 di tahun 2017
			Rp 936.000,00	Pengembalian Perjadin Pelayanan Mobile MOP di Medan
			Rp 491.446,00	Pengembalian Rehab Asrama
			Rp 300.000,00	Pengembalian Perjadin Pembinaan dan Penguatan Program KKBPK di Tapsel
			Rp 14.532.500,00	Pengembalian TGR dukungan Pengelolaan gudang dan Kepegawainan
668423	Puslitbang	Rp 315.384.730,00	Rp 315.384.730,00	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota
682061	Kependudukan	Rp 31.676.008,00	Rp 31.676.008,00	Pengembalian Belanja 2016 di tahun 2017
649512	KSPK	Rp 1.153.136,00	Rp 1.153.136,00	Pengembalian Belanja 2016 di tahun 2017
018398	Sumatera Barat	Rp 46.100.013,00	Rp 5.349.913,00	Pengembalian Tunkin Desember 2016 di TA 2017
			Rp 11.397.800,00	Pengembalian Sisa uang makan Desember 2016 di tahun 2017
			Rp 27.777.300,00	Pengembalian sisa kegiatan TA 2016 di TA 2017
			Rp 1.575.000,00	Pengembalian Belanja Perjalanan dinas
018403	Sumatera Selatan	Rp 6.047.000,00	Rp 5.183.000,00	Pengembalian Tunkin Desember 2016 di TA 2017
			Rp 864.000,00	Pengembalian Perjadin Biasa TA 2016 di TA 2017
018424	Kalimantan Barat	Rp 2.346.500,00	Rp 2.346.500,00	Pengembalian TGR Perjalanan Dinas
018431	Kalimantan Selatan	Rp 32.798.000,00	Rp 32.798.000,00	Pengembalian TGR temuan wasnal
018445	Sulawesi Utara	Rp 1.762.769,00	Rp 1.762.769,00	Pengembalian biaya evaluasi dan rapat
018452	Sulawesi Selatan	Rp 70.835.870,00	Rp 13.334.000,00	Pengembalian Biaya Hotel dan Uang Saku DIPA 2016 pada TA 2017

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah TA 2016	Rincian TA 2015	Jenis Transaksi TA 2015
			Rp 1.250.000,00	Pengembalian biaya liputan DIPA 2016 pada TA 2017
			Rp 12.977.000,00	Pengembalian Honor output keg. DIPA 2016 pada TA 2017
			Rp 5.988.500,00	Pengembalian biaya penulisan kajian DIPA 2016 pada TA 2017
			Rp 2.500.000,00	Pengembalian biaya pencetakan buku DIPA 2016 pada TA 2017
			Rp 4.080.000,00	Pengembalian honor pengelola satker DIPA 2016 pada TA 2017
			Rp 30.706.370,00	Pengembalian Sisa uang makan dan Tunkin Desember 2016 di tahun 2017
018466	Bali	Rp 4.369.680,00	Rp 1.461.200,00	Pengembalian Uang Makan bulan desember 2016
			Rp 2.908.480,00	Pengembalian Perjalanan Dinas
018562	NTB	Rp 27.698.928,00	Rp 27.698.928,00	Pengembalian belanja kegiatan Genre
433020	Riau	Rp 645.000,00	Rp 645.000,00	Pengembalian Perjadiin Biasa DIPA TA 2016 pada TA 2017
433020	Jambi	Rp 4.689.494,00	Rp 1.410.000,00	Pengembalian Perjadiin Biasa DIPA TA 2016 pada TA 2017
			Rp 1.065.000,00	Pengembalian Tunj. Struktural DIPA TA 2016 pada TA 2017
			Rp 2.214.494,00	Pengembalian biaya operasional kend.roda 4 DIPA TA 2016 pada TA 2017
433036	Kalimantan Tengah	Rp 7.497.900,00	Rp 7.497.900,00	Pengembalian gaji bulan Nop s/d Des 2016
433051	Sulawesi Tengah	Rp 2.260.000,00	Rp 2.260.000,00	Pengembalian honor narasumber TA 2016 di tahun 2017
433067	Sulawesi Tenggara	Rp 35.981.290,00	Rp 380.000,00	Pengembalian Belanja Narasumber
			Rp 35.601.290,00	Pengembalian belanja leaflet
433082	Papua	Rp 4.660.802,00	Rp 4.660.802,00	Pengembalian Tunkin Desember TA 2016 di Tahun 2017
433098	NTT	Rp 208.108.670,00	Rp 430.000,00	Pengembalian Belanja Perjalanan dinas
			Rp 350.000,00	Pengembalian Belanja bahan
			Rp 750.000,00	Pengembalian belanja sewa
			Rp 206.578.670,00	Pengembalian belanja barang non operasional
631606	Bangka Belitung	Rp 17.928.209,00	Rp 17.928.209,00	
631627	Gorontalo	Rp 181.200,00	Rp 181.200,00	Pengembalian uang makan TA 2016 ditahun 2017
649526	Latbang	Rp 51.553.175,00	Rp 51.553.175,00	Pengembalian belanja tahun 2016 ditahun 2017
666798	Kepulauan Riau	Rp 4.192.305,00	Rp 4.192.305,00	Pengembalian belanja tahun 2016 ditahun 2017
666798	Sulawesi Barat	Rp 2.204.540,00	Rp 2.204.540,00	Pengembalian Tunkin Desember TA 2016 di Tahun 2017
668419	DITVOKOM	Rp 2.192.277,00	Rp 2.192.277,00	Pengembalian belanja tahun 2016 ditahun 2017
682054	ADPIN	Rp 1.910.000,00	Rp 1.910.000,00	Pengembalian belanja tahun 2016 ditahun 2017
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 1.609.243.599,00</b>	<b>Rp 1.609.243.599,00</b>	

Informasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2015

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah TA 2015	Rincian TA 2015	Jenis Transaksi TA 2015
017326	Sekretariat Utama	Rp 2,907,218,672.00	Rp 12,379,000.00	Dana LS Kegiatan 2014 yang tidak digunakan dan baru disetor ke Kas Negara pada bulan Maret 2016 ( <i>dokumen terlampir</i> )
			Rp 438,040,000.00	Dana LS atas Belanja Uang Makan Pegawai bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
			Rp 2,178,245,273.00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
			Rp 6,018,944.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 4,250,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 268,285,455.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
631610	Banten	Rp 176,849,950.00	Rp 176,849,950.00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
649530	Inspektorat Utama	Rp 135,728,492.00	Rp 97,329,292.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 38,399,200.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
649505	KBKR	Rp 10,602,297.00	Rp 3,638,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 5,953,720.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 1,010,577.00	Saldo Kas di beberapa BPP dan BP yang baru disetor ke Kas Negara pada bulan Maret 2016 ( <i>dokumen terlampir</i> )
668423	Puslitbang	Rp 147,898,144.00	Rp 147,898,144.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
682061	Kependudukan	Rp 263,033,702.00	Rp 203,783,702.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 59,250,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
649512	KSPK	Rp 76,481,254.00	Rp 76,381,254.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 100,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
017393	Jabar	Rp 233,330,878.00	Rp 38,198,396.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 52,053,200.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 134,403,443.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 8,675,839.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pemeliharaan DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah TA 2015	Rincian TA 2015	Jenis Transaksi TA 2015
017621	Jateng	Rp 59,836,600.00	Rp 16,961,600.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 1,760,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 41,115,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
017972	DIY	Rp 357,815,739.00	Rp 260,933,800.00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
			Rp 65,856,000.00	Uang Makan Pegawai bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
			Rp 31,025,939.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
018398	Sumbar	Rp 665,847,535.00	Rp 42,450,865.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 257,167,240.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 366,229,430.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433011	Riau	Rp 8,027,343.00	Rp 2,495,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 5,532,343.00	Koreksi BPK atas kelebihan belanja barang diserahkan ke masyarakat DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433020	Jambi	Rp 13,258,734.00	Rp 7,262,100.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 5,996,634.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
018431	Kalsel	Rp 40,300,800.00	Rp 37,280,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 3,020,800.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
018452	Sulsel	Rp 371,544,987.00	Rp 21,398,937.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 322,311,100.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 27,834,950.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433067	Sultra	Rp 250,298,223.00	Rp 19,636,373.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 14,198,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 216,463,850.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah TA 2015	Rincian TA 2015	Jenis Transaksi TA 2015
018466	Bali	Rp 7,982,610.00	Rp 721,610.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 3,316,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 3,945,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433098	NTT	Rp 180,922,300.00	Rp 16,796,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 2,283,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 161,843,300.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
631627	Gorontalo	Rp 1,890,000.00	Rp 1,740,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 150,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433073	Maluku	Rp 85,050,000.00	Rp 85,050,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
631606	Babel	Rp 18,457,195.00	Rp 14,425,195.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 4,032,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
018455	Sulut	Rp 1,770,000.00	Rp 1,770,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
666803	Sulbar	Rp 3,916,024.00	Rp 3,596,024.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 320,000.00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 6,018,061,479.00</b>	<b>Rp 6,018,061,479.00</b>	

Belanja Dibayar  
Dimuka (prepaid)  
Rp.0,00

### C.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.35.033.993.658,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

### Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015

Kode Satker	Satuan Kerja	Jenis	TA 2016	TA 2015
018377	Aceh	Pembayaran Sewa Galeri UPPKS	-	42,677,596.00
433042	Kaltim	Pembayaran Sewa Kantor BKKBN Kalimantan Utara	-	53,272,670.00
649505	KBKR	Koreksi BPK atas adanya pencairan Pengembalian Selisih Pekerjaan yang sudah dibayar 100% pada tahun 2015 dan dikembalikan di 2016	-	34,938,043,392.00
666803	Sulbar	Pembayaran Sewa Rumah Dinas Pejabat Eselon II dan III	-	16,999,998.00
<b>Jumlah</b>			<b>-</b>	<b>35,050,993,656.00</b>

Untuk Tahun Anggaran 2016 per 31 Desember 2016 BKKBN tidak memiliki Belanja dibayar dimuka.

Belanja dibayar dimuka BKKBN per 31 Desember 2015 sebesar Rp.35.033.993.658,00 diatas antara lain :

#### 1. Perwakilan BKKBN Propinsi Aceh (Satker 018377)

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Toko antara Pemilik Toko dengan Perwakilan BKKBN Prop. Aceh tanggal 10 Desember 2015 dan bukti kuitansi pembayaran No.2095/2014 telah disepakati Sewa Toko/sewa tempat senilai Rp.44.000.000,00 yang akan digunakan oleh Perwakilan BKKBN Prop. Aceh untuk Galeri UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 20 Desember 2015 sd. 20 Desember 2016 (366 hari).

Periode sewa tersebut diatas dialami oleh 2 tahun anggaran yaitu TA 2015 dan 2016, sehingga pada saat periode tutup buku per 31 Desember 2015, Satker 018377 melakukan pemisahan pencatatan antara yang sudah dinikmati (sudah menjadi beban) di TA 2015 dan belum dinikmati (masih menjadi aset) di TA 2016. Dengan menerapkan metode pencatatan berbasis akrual, maka pada saat tutup buku tersebut dibuatlah jurnal penyesuaian. Hasil dari penerapan metode pencatatan berbasis akrual pada Satker 018377 atas transaksi tersebut diatas yaitu Aset Belanja Dibayar Dimuka tercatat mulai tanggal 01 Januari 2016 sd. 20 Desember 2016 (355 hari) sebesar Rp.42.677.000,00, sedangkan sisanya yang 11 hari (20 Desember 2015 sd. 31 Desember 2015) merupakan Beban Sewa Galeri UPPKS sebesar Rp.1.322.404,00 yang sudah dinikmati dan menjadi beban TA 2015.

## **2. Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Timur (Satker 433042)**

Berdasarkan bukti kuitansi pembayaran di Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Timur (Kaltim) pada tanggal 10 Juli 2015, 25 September 2015 dan Desember 2015 @sebesar Rp.40.750.000,00 dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.122.250.000,00 telah terjadi transaksi Sewa Rumah yang akan digunakan sebagai Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Utara, dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 21 Mei 2015 sd. 21 Juni 2016 (397 hari).

Periode sewa tersebut diatas dialami oleh 2 tahun anggaran yaitu TA 2015 dan 2016, sehingga pada saat periode tutup buku per 31 Desember 2015, Satker 422042 melakukan pemisahan pencatatan antara yang sudah dinikmati (sudah menjadi beban) di TA 2015 dan belum dinikmati (masih menjadi aset) di TA 2016. Dengan menerapkan metode pencatatan berbasis akrual, maka pada saat tutup buku tersebut dibuatlah jurnal penyesuaian. Hasil dari penerapan metode pencatatan berbasis akrual pada Satker 433042 atas transaksi tersebut diatas yaitu Aset Belanja Dibayar Dimuka tercatat mulai tanggal 01 Januari 2016 sd. 21 Juni 2016 (173 hari) sebesar Rp.52.272.670,00, sedangkan sisanya yang 224 hari (21 Mei 2015 sd. 31 Desember 2015) merupakan Beban Sewa Kantor Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Utara sebesar Rp.68.977.330,00 yang sudah dinikmati dan menjadi beban TA 2015;

## **3. Kedeputusan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Satker 649505)**

Berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan TA 2015 BKKBN mendapat rekomendasi untuk mencatat jurnal koreksi akrual Belanja Barang dibayar Dimuka atas Pengembalian Selisih Pekerjaan ke Kas Negara oleh Pihak Ke-3 di TA 2016 senilai Rp.34.938.043.392,00. Pengembalian selisih pekerjaan tersebut disebabkan oleh pencairan pengadaan pada Satker 649505 yang sudah dibayar 100,00% dengan menggunakan DIPA TA 2015, namun sampai dengan periode tutup buku per 31 Desember 2015 jumlah produksi barang yang disepakati sesuai dengan kontrak pengadaan tidak tercapai 100,00%, sehingga nilai selisih pekerjaan yang tidak tercapai dikembalikan oleh pihak ke-3 ke Kas Negara pada bulan Januari 2016.

*Piutang Bukan Pajak  
Rp.567.795.361,00*

### **C.4 Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-

masing adalah sebesar Rp.567.795.361,00 dan Rp.1.576.478.193,00.

### Perbandingan Piutang Bukan Pajak TA 2016 dan 2015

Kode Satker	Uraian Satker	TA 2016	TA 2015	Jenis
649505	KBKR	-	1,576,478,193.00	Koreksi BPK atas adanya pencairan jaminan pelaksanaan 2015 yang baru dicairkan tahun 2016 pada Satker KBKR (649505)
668423	Puslitbang	567,795,361.00	-	Klaim Pencairan Jaminan/Garansi Bank Nomor 020/BG-BMS/XII/2016 a.n. PERUM PERCETAKAN NEGARA RI TA 2016 pada Pengadaan Formulir SDKI TA 2016
		<b>567,795,361.00</b>	<b>1,576,478,193.00</b>	<b>Jumlah</b>

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Piutang Bukan  
Pajak  
Rp.2.838.977,00

### C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo penyisihan piutang tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp.2.838.977,00 dan Rp.0,00.

### Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak TA 2016 dan 2015

No.	KUALITAS	Jumlah Debitur (Orang)	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	567.795.361,00	0,50%	2.838.977,00
2	Kurang Lancar	-	-	10,00%	-
3	Diragukan	-	-	50,00%	-
4	Macet	-	-	100,00%	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>567.795.361,00</b>		<b>2.838.977,00</b>

Bag Lancar Tagihan  
TP/TGR  
Rp.38.804.280,00

### C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp.38.804.280,00 dan Rp.51.860.880,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi BKKBN terdiri dari:

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah Debitur (Orang)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2016 (Rp)
				Tambah	Kurang	
017326	SESTAMA	1	19,800,000.00	4,000,000.00	23,500,000.00	300,000.00
018445	BKKBN SULUT	1	32,060,880.00	38,504,280.00	32,060,880.00	38,504,280.00
	<b>JUMLAH</b>		<b>51,860,880.00</b>	<b>42,504,280.00</b>	<b>55,560,880.00</b>	<b>38,804,280.00</b>

Rincian Mutasi Bagian Lancar TGR sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	Rp. 51,860,880.00
Mutasi Tambah :	-
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR Satker Sestama dari Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)	Rp. 4,000,000.00
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR BKKBN Sulawesi Utara dari Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)	Rp. 38,504,280.00
Mutasi Kurang :	
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR Satker Sestama menjadi Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)	(23,500,000.00)
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR BKKBN Sulawesi Utara menjadi Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)	(32,060,880.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp. 38,804,280.00</b>

Kronologis Bagian Lancar TGR kedua debitur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan SKTJM Nomor 1481/I/KU.403/B3/2013 tanggal 22 Oktober 2013 satker SESTAMA terjadi kehilangan 1 unit kendaraan dinas roda empat berupa Toyota Kijang KF80 Long STD Tahun 2004 dengan nilai penetapan ganti rugi sebesar Rp.76.000.000,00 yang menjadi tanggung jawab sdr. SLBN dengan tempo penyelesaian Juli 2014.

Sampai dengan 31 Desember 2013 TGR tersebut telah disetor sebesar Rp.26.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- sebesar Rp.10.000.000,00 tgl. 23-10-2013 NTPN No. 1311021315011511
- sebesar Rp.16.000.000,00 tgl. 21-11-2013 NTPN No.1305071107140303
- Sehingga sisa bagian lancar Tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Rp. 76.000.000,00 - Rp. 26.000.000,00).

Selama periode 1 Januari s/d berakhir jatuh tempo SKTJM ke-1 pada Juli 2014 Sdr. SLBN telah dilakukan penyetoran yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 tgl 27 Januari 2014 NTPN No. 1409101113021506, sehingga sisa TGR saat berakhir jatuh tempo SKTJM ke-1 sebesar Rp.47.000.000,00.

Kemudian pada **Agustus 2014** telah dilakukan **perpanjangan SKTJM** tersebut

**No.1046/I/KU.403/B3/2015** yang berisi bahwa beliau akan melunasi dengan cara mengangsur selama 22 bulan (sampai berakhir batas usia pensiunnya) @sebesar Rp.2.136.364,00 terhitung mulai bulan Agustus 2014 sd. Mei 2016.

Setelah melakukan perpanjangan SKTJM beliau telah melakukan penyetoran sebesar Rp.13.700.000,00 ke Kas Negara dengan rincian sbb :

- Sebesar Rp.10.000.000,00 Tgl 21-08-2014 NTPN No. 0203150908050906
- Sebesar Rp.3.700.000,00 Tgl 20-11-2014 NTPN No. 1307040613060510;
- Sehingga sisa bagian lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2014 seharusnya sebesar Rp. 33.300.000,00 (Rp. 50.000.000,00 - Rp. 16.700.000,00).

Namun pada Laporan Keuangan Audited 2014 setoran sebesar Rp.3.700.000,00 kurang dicatat dalam perhitungan Bagian Lancar TGR BKKBN sehingga Neraca Audited BKKBN TA 2014 pada pos Bagian Lancar TGR BKKBN lebih saji sebesar Rp.3.700.000,00. Lebih saji tersebut telah dilakukan koreksi serta penyesuaian pada Neraca BKKBN TA 2015 yang berpengaruh pada Laporan Perubahan Ekuitas BKKBN.

Selama Tahun Anggaran 2015 TGR an. Sdr. SLBN sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 13.500.000,00 melalui potongan gaji setiap bulan pada Bendahara Gaji dengan rincian sbb :

- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 17-04-2015 NTPN. B964D7P605CCAB0P
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-05-2015 NTPN. 0E5B81JS59M2CFB9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-06-2015 NTPN. 6F84C00IONSQ9ET9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 14-07-2015 NTPN. F27D26NA1TQK3QD9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 20-08-2015 NTPN. 8C3033GEOMCC5KI9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 16-09-2015 NTPN. BF099076MGM2B329
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 19-10-2015 NTPN. A78652L4EONQMOK9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-11-2015 NTPN. 65AE83073TTHI0UP
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 17-12-2015 NTPN. 4AD383R6ALFOVGGP
- Sehingga sisa TGR an. SLBN per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp. 19.800.000,00 (Rp. 33.300.000,00 - Rp. 13.500.000,00)

Pada bulan Juni 2016 telah jatuh tempo SKTJMnya untuk dilakukan perpanjangan dan sudah dilakukan pembaharuan SKTJM dengan Nomor pada Tanggal 01 Juni 2016. Selama Tahun Anggaran 2016 TGR an. Sdr. SLBN sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 19.500.000,00 melalui potongan gaji setiap bulan pada Bendahara Gaji dengan rincian sbb :

- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 21-01-2015 NTPN. 19AF814TD1IDQ2KP

- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 19-02-2015 NTPN. D99F30P7POSF1FT9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 15-03-2015 NTPN. 737A97H8JHM9DI5P
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-04-2015 NTPN. 638E942N7M9LL619
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 01-06-2015 NTPN. 0A9638AGEEB66Q4P
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 17-06-2015 NTPN. 00F5B736B3QKFCCP
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 13-07-2015 NTPN. F54CB5GDDAVDF6SP
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-08-2015 NTPN. 645E54BVA51QE299
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 15-09-2015 NTPN. C28ED49RV9TSV9HP
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 17-10-2015 NTPN. D99934EB1TJ9D1KP
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 15-11-2015 NTPN. F48010HSGJNTU9LP
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 09-12-2015 NTPN. 5263D50D6BDJUBKP
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 31-12-2015 NTPN. E83757BB6CETOFN9

Sehingga sisa TGR an. SLBN per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp.300.000,00 (Rp. 19.800.000,00 – Rp. 19.500.000,00)

2. Piutang TGR pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara merupakan piutang atas penggelapan pajak (fiktif) dengan nilai penetapan TGR sebesar Rp. 352.898.638,00 berdasarkan SKTJM an. AM No. 294/KU.403/J/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan jatuh tempo piutang per November 2014. Sampai dengan 31 Desember 2014 atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp.84.768.880,00 melalui pemotongan gaji setiap bulan dan pemotongan remunerasi sehingga sisa piutang TGR sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.268.129.758,00 (Rp.352.898.638,00 – Rp 84.768.880,00).

Sehubungan dengan jatuh temponya SKTJM an. AM pada bulan November 2014, maka telah dilakukan pembaharuan SKTJM tersebut dengan No.109/KU.403/J/2014 tanggal 27 November 2014.

Selama Tahun Anggaran 2015-2016 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui pemotongan gaji dan pemotongan remunerasi setiap bulan sebesar Rp.70.565.160,00 dan sehingga saldo TGR an. AM menjadi sebesar Rp.197.564.598,00.

Tanggal 31 Desember 2016 telah dilakukan jurnal reklasifikasi Piutang Tagihan TP/TGR ke bagian lancar Tagihan TP/TGR ke an. Sdr. AM sebesar Rp.38.504.280,00. Dasar perhitungan reklasifikasi neraca dari Piutang Tagihan TP/TGR ke Bagian Lancar Tagihan TP/TGR TGR per 31 Desember 2016 adalah nilai setoran lancar debitur selama Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.38.504.280,00. Sedangkan sisanya sebesar Rp.159.060.318,00 menjadi Piutang (Jangka Panjang) Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2016.

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tun-  
tutan Ganti Rugi  
Rp.194.021,00

### C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar 194.021,00 Rp.dan Rp.259.304,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BKKBN per 31 Desember 2016 terdiri dari :

No.	KUALITAS	Jumlah Debitur (Orang)	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	2	38,804,280.00	0.50%	194,021.00
2	Kurang Lancar	-	-	10.00%	-
3	Diragukan	-	-	50.00%	-
4	Macet	-	-	100.00%	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>38,804,280.00</b>		<b>194,021.00</b>

Persediaan Rp.  
1.063.457.992.221,00

### C.7 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp.1.063.457.992.221,00 dan Rp.666.877.937.048,00.

Mutasi Persediaan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Akun	Nama Perkiraan	Per 31-12-2015	Mutasi	Per 31-12-2016
117111	Barang Konsumsi	2.479.333.806,00	15.487.393,00	2.494.821.199,00
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	59.624.500,00	(6.586.100,00)	53.038.400,00
117114	Suku Cadang	705.070.575,00	(698.694.865,00)	6.375.710,00
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	490.000,00	490.000,00
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8.986.358.529,00	1.083.655.641,00	10.070.014.170,00
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.800.000,00	-	1.800.000,00
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.740.625,00	-	3.740.625,00
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	569.741.189.917,00	480.092.812.405,00	1.049.834.002.322,00
117131	Bahan Baku	-	2.457.200,00	2.457.200,00
117199	Persediaan Lainnya	84.900.819.096,00	(83.909.566.501,00)	991.252.595,00
	<b>TOTAL</b>	<b>666.877.937.048,00</b>	<b>396.580.055.173,00</b>	<b>1.063.457.992.221,00</b>

Persediaan Bahan baku BKKBN per 31 Desember 2016 terdiri dari:

- a. Sekretariat Utama (017326) senilai : Rp. 178.400,00 merupakan persediaan barang habis berupa bahan klinik berupa masker sebesar Rp.178.400,00 yang dicatat pada kode tabel barang "barang habis pakai bahan lainnya" di Aplikasi Persediaan dan ketika dilakukan pengiriman ke Aplikasi SAIBA, persediaan tersebut terposting ke dalam Persediaan Bahan Baku;
- b. Perwakilan BKKBN Prop. Maluku (631631) senilai : Rp. 858.800,00 merupakan persediaan barang habis pakai untuk keperluan diklat berupa 2 paket Sablon Tas @Rp.193.900,00 sebesar Rp.387.800,00 dan 1 paket Sablon Kaos sebesar Rp.471.000,00 yang dicatat pada kode tabel barang "barang habis pakai bahan lainnya" yang terposting sebagai bahan baku pada Aplikasi Persediaan;
- c. Inspektorat Utama (649505) senilai : Rp. 1.120.000,00 merupakan persediaan barang habis pakai berupa Juknis Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi sebesar Rp.1.120.000,00 yang dicatat pada kode tabel barang "barang habis pakai bahan lainnya" di Aplikasi Persediaan dan ketika dilakukan pengiriman ke Aplikasi SAIBA, persediaan tersebut terposting ke dalam Persediaan Bahan Baku.

- d. Kedeputian Pengendalian Penduduk (682061) senilai : Rp. 300.000,00 merupakan persediaan barang habis pakai berupa micro HDMI VGA sebesar Rp.300.000,00 yang dicatat pada kode tabel barang “barang habis pakai bahan lainnya” di Aplikasi Persediaan dan ketika dilakukan pengiriman ke Aplikasi SAIBA, persediaan tersebut terposting ke dalam Persediaan Bahan Baku.

Berdasarkan hasil analisa data *Stock Opname* persediaan di seluruh satker BKKBN pada pemeriksaan audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Unaudited BKKBN TA 2016 diketahui terdapat Persediaan yang dalam kondisi rusak/*expired*/usang per 31 Desember 2016 sebesar Rp.3.232.655.116,00 serta *expired* di April tahun 2017 sebesar Rp.3.256.242.964,00 sehingga total persediaan yang *Expired* per 7 April 2017 sebesar Rp.6.488.898.080,00 (Rp.3.256.242.964,00 + Rp.3.232.655.116,00).

Analisis lebih lanjut terhadap penyajian Persediaan *expired* per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.232.655.116,00 tersebut diketahui sebesar Rp2.950.763.518,00 tercatat di luar neraca dan sebesar Rp281.891.598,00 tercatat dalam neraca (Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Kep. Riau).

BKKBN belum melakukan koreksi atas Persediaan *expired* yang dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp281.891.598,00 dikarenakan akan dilakukan perbaikan di Tahun 2017.

## ASET TETAP

Tanah  
Rp.371.193.673.956,00

### C.8 Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.371.193.673.956,00 dan Rp.368.748.205.366,00 sehingga kenaikan Aset Tetap Tanah sebesar Rp.2.445.468.590,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah per 31 Desember 2016**

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp</b>	<b>368,748,205,366.00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
100 - Saldo Awal	Rp	1,222,301,000.00
103 - Hibah Masuk	Rp	23,472,502.00
107 - Reklasifikasi Masuk	Rp	181,256,000.00
108 - Pengembangan Melalui KDP	Rp	1,199,695,088.00
<b>Mutasi kurang:</b>		
304 - Reklasifikasi Keluar		(181,256,000.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>371,193,673,956.00</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2016		-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>371,193,673,956.00</b>

Rincian Satuan Kerja yang mengalami Mutasi pada Aset Tanah per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

NO.	Kode Satker	Satker	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang
			Saldo Awal (100)	Hibah Masuk (103)	Reklasifikasi Masuk (107)	Pngembangan Melalui KDP (108)	Reklasifikasi Keluar (304)
1	631606	Bangka Belitung	-	23,472,502.00	-	-	-
2	433036	Kalimantan Tengah	-	-	181,256,000.00	-	(181,256,000.00)
3	017621	Kepulauan Riau	1,222,301,000.00	-	-	1,199,695,088.00	-
		<b>TOTAL</b>	<b>1,222,301,000.00</b>	<b>23,472,502.00</b>	<b>181,256,000.00</b>	<b>1,199,695,088.00</b>	<b>(181,256,000.00)</b>

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 disajikan pada Lampiran A-1 Laporan Keuangan ini.

Mutasi pada aset Tanah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional TA 2016 berasal dari :

1. Hibah Masuk berupa Tanah seluas ±4.113 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pulau Bangka, Ds. Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah senilai Rp.23.742.502,00 yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 an. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 Mei 2009 dengan

berdasarkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/196/DPPKAD/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang pemindahtanganan berupa hibah tanah milik Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung kepada Perwakilan BKKBN Prop. Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Berita Acara Serah Terima barang milik daerah Prop. Kep. Bangka Belitung kepada BKKBN Prop. Bangka Belitung Nomor 030/03/DPPKAD/2016 tanggal 27 Maret 2016;
  - c. Naskah Perjanjian Hibah Nomor 030/003/DPPKAD/2016 dan 140/HK.102/J1/2016 tanggal 28 Maret 2016.
2. Reklasifikasi keluar pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah berupa tanah seluas ±1.112 M<sup>2</sup> merupakan tanah bangunan mess/wisma/asrama. Kemudian dilakukan reklas masuk ke dalam tanah bangunan rumah negara golongan II senilai Rp.181.256.000,00 berdasarkan SK KPA Nomor 1280/KU.401/2016 tanggal 01 September 2016;
  3. Penambahan Saldo Awal senilai Rp. 1.222.301.000,00 pada Perwakilan BKKBN Kep. Riau berupa tanah seluas ±11.867 M<sup>2</sup> @Rp.103.000,00 per M<sup>2</sup> yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai No.00018 tanggal merupakan pencatatan tanah yang belum pernah dicatat sebelumnya berdasarkan Bukti Perolehan Nomor 835-01/ADD-SPJ-A3.4/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang terletak di Jl. Dr.Cipto Mangunkusumo, Tj. Pinggir-Sekupang, Kota Batam;
  4. Pengembangan KDP Aset Tanah pada Perwakilan BKKBN Kep. Riau senilai Rp.1.199.695.088,00 merupakan pengadaan jasa konstruksi pematangan lahan, pembuatan batu miring dan pagar. Pengembangan KDP Aset Tanah senilai tersebut merupakan bagian dari total pengembangan KDP Aset Gedung dan Bangunan serta KDP Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	SPM		Nilai SPM	Alokasi Peruntukkan Aset			
	Nomor	Tanggal		KDP Tanah (KIB No.2)	KDP Gedung dan Bangunan (KIB No.3)	Jalan, Irigasi dan Jaringan KDP (KIB No.1)	Jalan, Irigasi dan Jaringan KDP (KIB No.2)
1	00315	12/11/2015	717.399.300	359.908.526	87.583.472	161.758.092	108.149.210
2	00356	07/12/2015	884.792.470	443.887.183	108.019.616	199.501.646	133.384.025
3	00391	21/12/2015	669.572.680	276.332.829	96.341.820	177.933.901	118.964.130
4	00392	22/12/2015	119.566.550	119.566.550	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>2.391.331.000</b>	<b>1.199.695.088</b>	<b>291.944.908</b>	<b>539.193.639</b>	<b>360.497.365</b>

## C.9 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.378.686.213.215,00 dan Rp.366.818.286.540,00 sehingga kenaikan aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp.11.867.926.675,00 atau 3,24 persen. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016

Saldo per 31 Desember 2015	Rp 366.818.286.540,00
<b>Mutasi tambah:</b>	
100 - Saldo Awal	Rp 92.341.250,00
101 - Pembelian	Rp 17.562.199.203,00
102 - Transfer Masuk	Rp 650.970.000,00
106 - Pembatalan Penghapusan	Rp 1.000.000,00
107 - Reklasifikasi Masuk	Rp 477.373.837,00
177 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 440.853.005,00
202 - Pengembangan Nilai Aset	Rp 61.870.671,00
204 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp 11.858.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	
188 - Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(4.723.221.162,00)
209 - Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(12.957.112,00)
301 - Penghapusan (BMN yg dihentikan)	(1.591.856.580,00)
302 - Transfer Keluar	(650.970.000,00)
304 - Reklasifikasi Keluar	(451.534.437,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 378.686.213.215,00</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2016	(306.535.032.923,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 72.151.180.292,00</b>

Sesuai dengan hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI terhadap LK BKKBN Unaudited TA 2016 telah dilakukan koreksi terhadap nilai peralatan dan mesin sebagai berikut :

- **Peralatan dan Mesin LK Unaudited** : **Rp. 378.606.188.215,00**
- Koreksi kurang catat Transfer Masuk KBKR berupa Laptop NUP 270 dan 271 : Rp. 16.100.000,00
- Koreksi kurang catat Transfer Masuk KBKR berupa LCD Proyektor 49 dan 50 : Rp. 18.510.000,00
- Koreksi kurang catat Transfer Masuk KBKR berupa PC 425 - 428 dari Sestama : Rp. 35.360.000,00
- Koreksi kurang catat Transfer Masuk Litbang berupa LCD Proyektor 54 : Rp. 8.050.000,00
- Koreksi kurang catat Transfer Masuk KBKR berupa PRINT 590 - 593 dari Sestama : Rp. 6.000.000,00

• Koreksi kurang catat Transfer Masuk KBKR berupa SCAN 60 - 63	: Rp.	8.760.000,00
• Koreksi Reklas Masuk BKKBN NTT yang belum dicatat sebesar	: Rp.	17.500.000,00
• Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk Irtama berupa Laptop	: (Rp.	9.255.000,00)
• Koreksi kelebihan catat Tranfer Masuk Kependudukan berupa Mesin-PRINT 584 - 587	: (Rp.	6.000.000,00)
• Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk Irtama berupa Mesin-PRINT 588 - 589	: (Rp.	3.000.000,00)
• Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk KSPK berupa Mesin-PRINT 594 - 596	: (Rp.	4.500.000,00)
• Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk Latbang berupa Mesin-PRINT 597 - 598	: (Rp.	3.000.000,00)
• Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk ADPIN berupa Mesin-PRINT 600 - 602	: (Rp.	<u>4.500.000,00</u> )
• <b>Peralatan dan Mesin LK Audited</b>	: Rp.	<b>378.686.213.215,00</b>

Transaksi **penambahan** peralatan dan mesin per satker dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kode Satker	Satker	Saldo Awal (100)	Pembelian (101)	Transfer Masuk (102)	Pembatalan Penghapusan (106)	Reklasifikasi Masuk (107)	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (A)
1	017326	Sestama	-	2.580.633.631		-		<b>2.580.633.631</b>
2	682054	Adpin	-	2.730.617.410	123.885.000	-		<b>2.854.502.410</b>
3	649505	KBKR	-	-	84.730.000	-		<b>84.730.000</b>
4	649512	KSPK	-	147.247.500	93.885.000	-		<b>241.132.500</b>
5	649526	Latbang	-	-	53.810.000	-		<b>53.810.000</b>
6	649530	Irtama	-	-	103.635.000	-		<b>103.635.000</b>
7	668419	Ditvok	-	-	20.580.000	-		<b>20.580.000</b>
8	668423	Puslitbang	-	318.037.066	48.915.000	-		<b>366.952.066</b>
9	682061	Dalduk	-	2.858.000	121.530.000	-		<b>124.388.000</b>
10	666781	DKI	-	-		-		-
11	017393	Jabar	-	186.173.910		-		<b>186.173.910</b>
12	017621	Jateng	-	603.009.875		-		<b>603.009.875</b>
13	017972	DIY	-	317.175.475		-	3.428.625	<b>320.604.100</b>
14	018030	Jatim	-	242.640.500		-		<b>242.640.500</b>
15	018377	Aceh	-	326.883.800		-	23.955.000	<b>350.838.800</b>
16	018381	Sumut	-	526.406.390		-		<b>526.406.390</b>
17	018398	Sumbar	-	679.898.000		-	19.189.400	<b>699.087.400</b>
18	433011	Riau	-	317.809.000		-	4.400.000	<b>322.209.000</b>
19	433020	Jambi	-	343.738.550		-		<b>343.738.550</b>
20	018403	Sumsel	-	893.665.069		-		<b>893.665.069</b>
21	018410	Lampung	-	402.630.460		-	73.032.712	<b>475.663.172</b>
22	018424	Kalbar	-	323.515.625		-		<b>323.515.625</b>
23	433036	Kalteng	-	93.793.820		1.000.000		<b>94.793.820</b>
24	018431	Kalsel	-	301.952.698		-	23.500.000	<b>325.452.698</b>
25	433042	Kaltim	500.000	742.879.321		-		<b>743.379.321</b>
26	018445	Sulut	-	206.916.800		-	84.458.000	<b>291.374.800</b>
27	433051	Sulteng	-	734.914.600		-		<b>734.914.600</b>
28	018452	Sulsel	-	292.995.679		-		<b>292.995.679</b>
29	433067	Sultra	-	189.477.250		-	33.520.100	<b>222.997.350</b>
30	433073	Maluku	-	244.180.000		-		<b>244.180.000</b>
31	018466	Bali	-	60.544.978		-		<b>60.544.978</b>
32	018562	NTB	-	372.162.625		-		<b>372.162.625</b>
33	433098	NTT	-	402.400.000		-	17.500.000	<b>419.900.000</b>
34	433082	Papua	-	406.224.500		-		<b>406.224.500</b>
35	433102	Bengkulu	-	254.010.313		-	25.235.000	<b>279.245.313</b>
36	631631	Malut	-	818.570.513		-		<b>818.570.513</b>
37	631610	Banten	-	192.510.000		-		<b>192.510.000</b>
38	631606	Babel	-	299.680.045		-	159.900.000	<b>459.580.045</b>
39	631627	Gorontalo	-	45.790.000		-		<b>45.790.000</b>
40	666798	Kepri	-	55.623.300		-		<b>55.623.300</b>
41	666700	Papua Barat	-	704.030.500		-		<b>704.030.500</b>
42	666803	Sulbar	91.841.250	200.602.000		-	9.255.000	<b>301.698.250</b>
		<b>Total</b>	<b>92.341.250</b>	<b>17.562.199.203</b>	<b>650.970.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>477.373.837</b>	<b>18.783.884.290</b>

No.	Kode Satker	Satker	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap(177)	Penambahan Nilai (202)	Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas (204)	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (B)
1	017326	Sestama	-	53,192,671	-	<b>53,192,671</b>
2	682054	Adpin	-	-	-	-
3	649505	KBKR	-	-	-	-
4	649512	KSPK	-	-	-	-
5	649526	Latbang	-	-	-	-
6	649530	Irtama	-	-	-	-
7	668419	Ditvok	-	-	-	-
8	668423	Puslitbang	-	-	-	-
9	682061	Dalduk	-	-	-	-
10	666781	DKI	-	-	-	-
11	017393	Jabar	-	-	-	-
12	017621	Jateng	-	-	-	-
13	017972	DIY	106,145,333	-	-	<b>106,145,333</b>
14	018030	Jatim	-	-	-	-
15	018377	Aceh	-	-	-	-
16	018381	Sumut	-	-	-	-
17	018398	Sumbar	-	-	-	-
18	433011	Riau	11,775,000	-	-	<b>11,775,000</b>
19	433020	Jambi	-	2,200,000	408,000	<b>2,608,000</b>
20	018403	Sumsel	-	-	-	-
21	018410	Lampung	-	-	-	-
22	018424	Kalbar	-	-	-	-
23	433036	Kalteng	-	-	-	-
24	018431	Kalsel	-	-	-	-
25	433042	Kaltim	-	6,478,000	-	<b>6,478,000</b>
26	018445	Sulut	-	-	-	-
27	433051	Sulteng	-	-	-	-
28	018452	Sulsei	-	-	-	-
29	433067	Sultra	-	-	-	-
30	433073	Maluku	-	-	-	-
31	018466	Bali	-	-	-	-
32	018562	NTB	10,000,000	-	-	<b>10,000,000</b>
33	433098	NTT	-	-	-	-
34	433082	Papua	-	-	-	-
35	433102	Bengkulu	56,250,000	-	-	<b>56,250,000</b>
36	631631	Malut	240,582,672	-	-	<b>240,582,672</b>
37	631610	Banten	-	-	-	-
38	631606	Babel	16,100,000	-	-	<b>16,100,000</b>
39	631627	Gorontalo	-	-	-	-
40	666798	Kepri	-	-	-	-
41	666700	Papua Barat	-	-	-	-
42	666803	Sulbar	-	-	11,450,000	<b>11,450,000</b>
		Total	440,853,005	61,870,671	11,858,000	<b>514,581,676</b>

No.	Kode Satker	Satker	Sub Total Transaksi Penambahan (A)	Sub Total Transaksi Penambahan (B)	Total Transaksi Penambahan (A + B)
1	017326	Sestama	2.580.633.631	53.192.671	<b>2.633.826.302</b>
2	682054	Adpin	2.854.502.410	-	<b>2.854.502.410</b>
3	649505	KBKR	84.730.000	-	<b>84.730.000</b>
4	649512	KSPK	241.132.500	-	<b>241.132.500</b>
5	649526	Latbang	53.810.000	-	<b>53.810.000</b>
6	649530	Irtama	103.635.000	-	<b>103.635.000</b>
7	668419	Ditvok	20.580.000	-	<b>20.580.000</b>
8	668423	Puslitbang	366.952.066	-	<b>366.952.066</b>
9	682061	Dalduk	124.388.000	-	<b>124.388.000</b>
10	666781	DKI	-	-	-
11	017393	Jabar	186.173.910	-	<b>186.173.910</b>
12	017621	Jateng	603.009.875	-	<b>603.009.875</b>
13	017972	DIY	320.604.100	106.145.333	<b>426.749.433</b>
14	018030	Jatim	242.640.500	-	<b>242.640.500</b>
15	018377	Aceh	350.838.800	-	<b>350.838.800</b>
16	018381	Sumut	526.406.390	-	<b>526.406.390</b>
17	018398	Sumbar	699.087.400	-	<b>699.087.400</b>
18	433011	Riau	322.209.000	11.775.000	<b>333.984.000</b>
19	433020	Jambi	343.738.550	2.608.000	<b>346.346.550</b>
20	018403	Sumsel	893.665.069	-	<b>893.665.069</b>
21	018410	Lampung	475.663.172	-	<b>475.663.172</b>
22	018424	Kalbar	323.515.625	-	<b>323.515.625</b>
23	433036	Kalteng	94.793.820	-	<b>94.793.820</b>
24	018431	Kalsel	325.452.698	-	<b>325.452.698</b>
25	433042	Kaltim	743.379.321	6.478.000	<b>749.857.321</b>
26	018445	Sulut	291.374.800	-	<b>291.374.800</b>
27	433051	Sulteng	734.914.600	-	<b>734.914.600</b>
28	018452	Sulsel	292.995.679	-	<b>292.995.679</b>
29	433067	Sultra	222.997.350	-	<b>222.997.350</b>
30	433073	Maluku	244.180.000	-	<b>244.180.000</b>
31	018466	Bali	60.544.978	-	<b>60.544.978</b>
32	018562	NTB	372.162.625	10.000.000	<b>382.162.625</b>
33	433098	NTT	419.900.000	-	<b>419.900.000</b>
34	433082	Papua	406.224.500	-	<b>406.224.500</b>
35	433102	Bengkulu	279.245.313	56.250.000	<b>335.495.313</b>
36	631631	Malut	818.570.513	240.582.672	<b>1.059.153.185</b>
37	631610	Banten	192.510.000	-	<b>192.510.000</b>
38	631606	Babel	459.580.045	16.100.000	<b>475.680.045</b>
39	631627	Gorontalo	45.790.000	-	<b>45.790.000</b>
40	666798	Kepri	55.623.300	-	<b>55.623.300</b>
41	666700	Papua Barat	704.030.500	-	<b>704.030.500</b>
42	666803	Sulbar	301.698.250	11.450.000	<b>313.148.250</b>
		<b>Total</b>	<b>18.783.884.290</b>	<b>514.581.676</b>	<b>19.298.465.966</b>

Transaksi pengurangan peralatan dan mesin per satker dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Satker	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (209)	Penghapusan (301)	Transfer Keluar (302)	Reklasifikasi Keluar (304)	Total Transaksi Pengurangan
1	017326	Sestama	-			-650.970.000		-650.970.000
2	682054	Adpin	-					-
3	649505	KBKR	-					-
4	649512	KSPK	-					-
5	649526	Latbang	-					-
6	649530	Irtama	-					-
7	668419	Ditvok	-					-
8	668423	Puslitbang	-					-
9	682061	Dalduuk	-					-
10	666781	DKI	-					-
11	017393	Jabar	-					-
12	017621	Jateng	-					-
13	017972	DIY	-539.635.150				-3.428.625	-543.063.775
14	018030	Jatim	-					-
15	018377	Aceh	-149.600.000		-497.972.357		-23.955.000	-671.527.357
16	018381	Sumut	-					-
17	018398	Sumbar	-		-455.466.600			-455.466.600
18	433011	Riau	-248.427.200	-11.466.000			-4.400.000	-264.293.200
19	433020	Jambi	-820.564.681	42.255.888	-106.992.244			-885.301.037
20	018403	Sumsel	-					-
21	018410	Lampung	-		-4.986.000		-73.032.712	-78.018.712
22	018424	Kalbar	-156.698.970					-156.698.970
23	433036	Kalteng	-13.100.000		-48.581.000			-61.681.000
24	018431	Kalsel	-267.523.000		-40.482.000		-23.500.000	-331.505.000
25	433042	Kaltim	-173.324.150					-173.324.150
26	018445	Sulut	-				-84.458.000	-84.458.000
27	433051	Sulteng	-198.618.650	-47.799.000	47.799.000			-198.618.650
28	018452	Sulsei	-137.619.300		-308.276.100			-445.895.400
29	433067	Sultra	-		-58.806.779		-33.520.100	-92.326.879
30	433073	Maluku	-					-
31	018466	Bali	-					-
32	018562	NTB	-53.550.000					-53.550.000
33	433098	NTT	-646.390.285				-17.500.000	-663.890.285
34	433082	Papua	-					-
35	433102	Bengkulu	-76.235.000		-56.250.000		-20.235.000	-152.720.000
36	631631	Malut	-222.420.876		-41.100.000			-263.520.876
37	631610	Banten	-494.619.300	4.052.000	-20.742.500			-511.309.800
38	631606	Babel	-32.200.000				-159.900.000	-192.100.000
39	631627	Gorontalo	-196.000.000					-196.000.000
40	666798	Kepri	-6.338.200					-6.338.200
41	666700	Papua Barat	-					-
42	666803	Sulbar	-290.356.400				-7.605.000	-297.961.400
		<b>Total</b>	<b>4.723.221.162</b>	<b>-59.265.000</b>	<b>-1.639.655.580</b>	<b>-650.970.000</b>	<b>-451.534.437</b>	<b>-7.430.539.291</b>

Berikut tabel Perolehan Peralatan dan Mesin dalam rangka penambahan nilai Peralatan dan Mesin serta kaitannya dengan penggunaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin terhadap aset lainnya periode 1 Januari sd. 31 Desember 2016 :

No.	Uraian	Mata Anggaran Belanja Modal Yang Digunakan					Jumlah	
		52	532111	532114	532121	533121		536111
	Peralatan dan Mesin							
1	101 - Pembelian Peralatan Mesin	28.558.000	16.006.645.383	-	17.750.000	492.283.000	1.016.962.820	17.562.199.203
2	102 - Penambahan Nilai Peralatan Mesin	-	61.870.671	-	-	-	-	61.870.671
3	Ekstrakomptabel Peralatan Mesin	-	66.508.320	-	-	-	-	66.508.320
4	Kembali Belanja Modal	-	2.210	-	-	-	-	2.210
	Pembelian lainnya dengan menggunakan MAK 532 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) :							
5	101 - Perolehan Jaringan	-	14.965.729	-	-	-	-	14.965.729
6	101 - Pembelian Aset Tetap Lainnya	-	19.985.000	-	-	-	-	19.985.000
7	101- Pembelian ATB (Lisensi)	-	165.110.000	-	-	-	-	165.110.000
8	Sewa Mesin Foto Copy	-	-	7.872.271	-	-	-	7.872.271
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>28.558.000</b>	<b>16.335.087.313</b>	<b>7.872.271</b>	<b>17.750.000</b>	<b>492.283.000</b>	<b>1.016.962.820</b>	<b>17.898.513.404</b>

Perolehan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sd. 31 Desember 2016 terdiri dari penggunaan Belanja Barang MAK 52 senilai Rp.28.558.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin MAK 532 senilai Rp.16.360.709.984,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan MAK 533 senilai Rp.492.283.000,00 dan Belanja Modal Lainnya MAK 536 senilai Rp.851.852.820,00.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan penggunaannya yaitu :

**A. Pembelian Peralatan dan Mesin tidak menggunakan MAK 532111 dan Pengembangan Nilai Peralatan dan Mesin tidak menggunakan MAK 532121**

1. Pembelian Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 52 senilai Rp.28.558.000,00, dimana para satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111), yaitu antara lain:

- a. Penggunaan Belanja MAK 521111 senilai Rp.8.000.000,00 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Nusa Tenggara Barat (018562) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa 1 set Gordyin/Krey senilai

Rp.8.000.000,00;

b. Penggunaan Belanja MAK 521219 senilai Rp.17.700.000,00 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Barat (666803) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :

- 3 buah Papan Visual/Papan Nama  
@Rp.3.300.000,00 = Rp. 9.900.000,00
- 3 unit External/Portable Hardisk  
@Rp.2.600.000,00 = Rp. 7.800.000,00

c. Penggunaan Belanja MAK 521811 senilai Rp.2.858.000,00 pada satuan kerja Kedeputusan Bidang Pengendalian Penduduk (682061) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa 1 unit Dispenser senilai Rp.2.858.000,00.

2. Pembelian Peralatan dan Mesin dengan menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (MAK 532121) dimana seharusnya satker menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111). Penggunaan Belanja MAK 532121 senilai Rp.17.750.000,00 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Bengkulu (433102) digunakan untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :

- 1 unit Audio Mixing Portable = Rp. 5.350.000,00
- 1 unit Audio Monitor Passive = Rp. 3.975.000,00
- 1 unit Microphone Wireless/MIC = Rp. 1.150.000,00
- 1 unit Wireless = Rp. 1.125.000,00
- 1 unit Router = Rp. 2.150.000,00
- 1 unit Rak Kayu = Rp. 4.000.000,00

3. Pembelian Peralatan dan Mesin dengan menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121). Penggunaan Belanja MAK 533121 senilai Rp.492.283.000,00 pada Satuan Kerja Sekretariat Utama BKKBN (017326) digunakan untuk Pembelian Peralatan dan Mesin untuk mendukung penambahan nilai gedung dan bangunan Pusdiklat KKB berupa :

- 3 unit Televisi @Rp.12.980.000,00 = Rp. 38.940.000,00
- 1 set Kabel = Rp. 6.490.000,00
- 1 set Bracket Standing Peralatan = Rp. 6.490.000,00
- 6 unit AC Split @Rp.33.198.000,00 = Rp. 199.188.000,00
- 8 buah Kursi @Rp.1.870.000,00 = Rp. 14.960.000,00
- 250 buah kursi @Rp.737.000,00 = Rp. 184.250.000,00

- 7 unit AC Split @ Rp.5.995.000,00 = Rp. 41.965.000,00

4. Pembelian Peralatan dan Mesin dengan menggunakan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111) senilai Rp.1.016.962.820,00, dimana para satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111), yaitu antara lain:

a. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.725.791.000,00 pada satuan kerja Kedeputian Advokasi Penggerakkan dan Informasi/ADPIN (682054) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :

- 1 unit Focussing Screen/Layar LCD Projector = Rp. 197.900.000,00
- 1 unit Wireless = Rp. 126.420.000,00
- 1 unit Rak Server = Rp. 92.719.000,00
- 6 unit Laptop @Rp.14.834.000,00 = Rp. 89.004.000,00
- 1 unit Laptop = Rp. 13.399.000,00
- 1 unit Laptop = Rp. 13.849.000,00
- 80 unit Battery UPS @Rp.2.200.000,00 = Rp. 176.000.000,00
- 1 unit Rak Battery UPS = Rp. 16.500.000,00

b. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.197.378.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Barat (018398) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :

- 1 buah Papan Visual (Tiang Billboard) = Rp. 64.950.000,00
- 1 buah Papan Visual (Standing Frame) = Rp. 46.928.000,00
- 36 unit Telephone Mobile @Rp.2.002.411,00 = Rp. 72.086.796,00
- 36 unit Local Battery Telephone @Rp.372.589,00 = Rp. 13.413.204,00

c. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.93.793.820,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah (433036) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :

- 3 buah Lemari Kayu @Rp.6.950.000,00 = Rp. 20.850.000,00
- 1 unit Telephone Mobile = Rp. 10.800.000,00
- 24 unit Telephone Mobile @Rp.2.390.147,00 = Rp. 57.363.528,00
- 2 unit Telephone Mobile @Rp.2.390.146,00 = Rp. 4.780.292,00

5. Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.61.870.671,00, dimana para satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (MAK 532121), yaitu antara lain:

- a. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.2.200.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Jambi (433020) untuk Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin berupa :
- 1 set asesoris kendaraan = Rp. 1.100.000,00
  - 1 unit CCTV = Rp. 1.100.000,00
- b. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.6.478.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Timur (433042) untuk Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin berupa 1 set asesoris kendaraan operasional kantor senilai Rp.6.478.000,00;
- c. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.53.192.671,00 pada Satuan Kerja Sekretariat Utama (017326) untuk Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin berupa :
- 5 buah Lemari Kayu @Rp.2.258.377,00 = Rp. 11.291.885,00
  - 4 buah Meja Kerja Kayu @Rp.2.258.377,00 = Rp. 9.033.508,00
  - 6 buah Kursi @Rp.2.258.377,00 = Rp. 13.550.262,00
  - 1 buah Rak Kayu = Rp. 2.258.377,00
  - 3 buah Nakas @Rp.2.258.377,00 = Rp. 6.775.131,00
  - 1 buah Whiteboard = Rp. 2.258.377,00
  - 2 buah Sice @ Rp.2.258.377,00 = Rp. 4.516.754,00
  - 1 buah Tempat Tidur Kayu = Rp. 2.258.377,00
  - 1 set asesoris kendaraan operasional = Rp. 1.250.000,00

**B. Belanja Modal MAK 5321 tidak menambah “Perolehan Peralatan dan Mesin”**

1. Pembelian Jaringan berupa Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.14.965.729,00, pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat (017393) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Jaringan (MAK 534131).
2. Pembelian Aset Tetap Lainnya berupa 1 set Alat Musik dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.19.985.000,00, pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Bali (018466) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111);
3. Pembelian Aset Tak Berwujud berupa 1 buah Lisensi dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.165.110.000,00, pada Satuan Kerja Kedepuitan Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi (682054) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111);
4. Sewa Mesin Fotocopy selama 12 bulan dengan menggunakan MAK 532114

senilai Rp.7.872.271,00 pada Satuan Kerja Kedepuitan Pengendalian Penduduk (682061) yang seharusnya menggunakan Belanja Sewa (MAK 522141)

5. Pembelian Aset Ekstrakomptable Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.66.508.320,00 dan karena nilai satuannya dibawah nilai kapitalisasi asset peralatan dan mesin maka tidak menambah nilai asset peralatan dan mesin. Satuan Kerja BKKBN yang menghasilkan asset ekstrakomptable dari Belanja MAK 532111 antara lain :

- a. Riau (433011) sebesar ..... : Rp. 9.009.660,00  
berupa :
  - Pembelian 34 unit Power Bank @Rp.264.990,00 untuk Kegiatan Survey Indikator RPJMN Tahun 2016 dengan total nilai Rp.9.009.660,00;
- b. Jambi (433020) sebesar..... : Rp. 6.284.000,00  
berupa :
  - Biaya ATK Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Tahun 2016 Rp.200.000,00;
  - Biaya ATK Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2016 Rp.208.000,00; dan
  - Pembelian 26 unit Power Bank @Rp.226.000,00 untuk Kegiatan Survey Indikator RPJMN Tahun 2016 dengan total nilai Rp.5.876.000,00.
- c. Kalimantan Timur (433042)..... : Rp. 6.823.780,00  
berupa :
  - Pembelian 22 unit Power Bank @Rp.264.990,00 untuk Kegiatan Survey Indikator RPJMN Tahun 2016 dengan total nilai Rp.5.829.780,00; dan
  - Pembelian 4 buah kursi @Rp.240.000,00 serta 1 unit alat rumah tangga lain dengan total nilai Rp.994.000,00.
- d. Sulawesi Tengah (433051)..... : Rp. 6.496.380,00  
berupa :
  - Pembelian 22 unit Power Bank @Rp.295.290,00 untuk Kegiatan Survey Indikator RPJMN Tahun 2016 dengan total nilai Rp.6.496.380,00
- e. NTB (018562)..... : Rp. 28.209.500,00  
berupa :
  - Pembelian 185 buah Kotak Surat @Rp.13.500,00 dengan total nilai Rp.2.497.500,00;
  - Pembelian 24 unit Power Bank @Rp.250.000,00 untuk Kegiatan Survey Indikator RPJMN Tahun 2016 dengan total nilai Rp.6.000.000,00; dan
  - Pembelian 88 buah kursi @Rp.224.000,00 dengan total nilai Rp.19.712.000,00.
- f. Maluku (631631) ..... : Rp. 9.685.000,00  
Berupa beraneka ragam peralatan rumah tangga lainnya dengan total nilai Rp.9.685.000,00.

Selain ketidaksesuaian antara belanja modal dengan penggunaannya seperti yang telah dijelaskan diatas, pada tabel diatas juga terlihat ada pengembalian belanja modal MAK 532111 senilai Rp.2.210,00 pada Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Selatan.

Gedung dan Bangunan  
Rp.304.683.725.802,00

#### C.10 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp.304.683.725.802,00 dan Rp.290.848.130.308,00 sehingga kenaikan terjadi aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.13.835.595.494,00 atau 4,76 persen. Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Penambahan dan Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 290,848,130,308.00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
101 - Pembelian	Rp 131,000,000.00
103 - Hibah Masuk	Rp 76,815,000.00
107 - Reklasifikasi Masuk	Rp 7,438,615,735.00
202 - Pengembangan Nilai Aset	Rp 10,098,079,850.00
204 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp 99,296,800.00
208 - Pengembangan Melalui KDP	Rp 4,414,610,645.00
<b>Mutasi kurang:</b>	
209 - Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(896,240,000.00)
304 - Reklasifikasi Keluar	(7,526,582,536.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 304,683,725,802.00</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2016	(101,495,508,861.00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 203,188,216,941.00</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan per satker dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Kode Satker	Satker	Pembelian (101)	Hibah Masuk (103)	Reklasifikasi Masuk (107)	Penambahan Nilai (202)	Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas (204)	Sub Total Kenaikan/ Penurunan
1	017326	Sestama	-	-	-	6,154,990,500	-	6,154,990,500
2	682054	Adpin	-	-	-	-	-	-
3	649505	KBKR	-	-	-	-	-	-
4	649512	KSPK	-	-	-	-	-	-
5	649526	Latbang	-	-	-	-	-	-
6	649530	Irtama	-	-	-	-	-	-
7	668419	Ditvok	-	-	-	-	-	-
8	668423	Puslitbang	-	-	-	-	-	-
9	682061	Dalduk	-	-	-	-	-	-
10	666781	DKI	-	-	-	-	-	-
11	017393	Jabar	-	-	-	-	-	-
12	017621	Jateng	-	-	454,433,000	-	-	454,433,000
13	017972	DIY	-	-	458,265,000	-	-	458,265,000
14	018030	Jatim	-	-	670,754,000	620,093,250	-	1,290,847,250
15	018377	Aceh	86,000,000	-	1,223,843,400	484,000,000	-	1,793,843,400
16	018381	Sumut	-	-	410,857,377	-	-	410,857,377
17	018398	Sumbar	-	-	718,828,209	1,042,640,000	-	1,761,468,209
18	433011	Riau	-	-	252,700,000	-	-	252,700,000
19	433020	Jambi	45,000,000	-	177,370,000	54,800,000	11,330,000	288,500,000
20	018403	Sumsel	-	-	51,295,000	-	-	51,295,000
21	018410	Lampung	-	-	-	-	-	-
22	018424	Kalbar	-	-	218,142,879	-	-	218,142,879
23	433036	Kalteng	-	-	249,089,799	146,400,000	-	395,489,799
24	018431	Kalsel	-	-	574,083,400	-	87,966,800	662,050,200
25	433042	Kaltim	-	-	261,458,000	-	-	261,458,000
26	018445	Sulut	-	-	156,580,000	86,000,000	-	242,580,000
27	433051	Sulteng	-	76,815,000	-	71,066,000	-	147,881,000
28	018452	Sulsei	-	-	270,850,000	372,823,000	-	643,673,000
29	433067	Sultra	-	-	359,917,000	-	-	359,917,000
30	433073	Maluku	-	-	-	154,670,000	-	154,670,000
31	018466	Bali	-	-	196,534,671	52,663,000	-	249,197,671
32	018562	NTB	-	-	733,614,000	-	-	733,614,000
33	433098	NTT	-	-	-	115,530,000	-	115,530,000
34	433082	Papua	-	-	-	-	-	-
35	433102	Bengkulu	-	-	-	407,997,100	-	407,997,100
36	631631	Malut	-	-	-	-	-	-
37	631610	Banten	-	-	-	155,407,000	-	155,407,000
38	631606	Babel	-	-	-	54,000,000	-	54,000,000
39	631627	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
40	666798	Kepri	-	-	-	-	-	-
41	666700	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
42	666803	Sulbar	-	-	-	125,000,000	-	125,000,000
		<b>TOTAL</b>	<b>131,000,000</b>	<b>76,815,000</b>	<b>7,438,615,735</b>	<b>10,098,079,850</b>	<b>99,296,800</b>	<b>17,843,807,385</b>

No.	Kode Satker	Satker	Sub Total Kenaikan/ Penurunan	Pengembangan Melalui KDP (208)	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (209)	Reklasifikasi Keluar (304)	Total Kenaikan/ Penurunan
1	017326	Sestama	6,154,990,500	1,817,278,845	-	-	7,972,269,345
2	682054	Adpin	-	-	-	-	-
3	649505	KBKR	-	-	-	-	-
4	649512	KSPK	-	-	-	-	-
5	649526	Latbang	-	-	-	-	-
6	649530	Irtama	-	-	-	-	-
7	668419	Ditvok	-	-	-	-	-
8	668423	Puslitbang	-	-	-	-	-
9	682061	Dalduk	-	-	-	-	-
10	666781	DKI	-	-	-	-	-
11	017393	Jabar	-	-	-	-	-
12	017621	Jateng	454,433,000	-	-	(454,433,000)	-
13	017972	DIY	458,265,000	-	-	(458,265,000)	-
14	018030	Jatim	1,290,847,250	-	-	(670,754,000)	620,093,250
15	018377	Aceh	1,793,843,400	-	-	(1,223,843,400)	570,000,000
16	018381	Sumut	410,857,377	-	-	(410,857,377)	-
17	018398	Sumbar	1,761,468,209	-	(896,240,000)	(718,828,209)	146,400,000
18	433011	Riau	252,700,000	-	-	(252,700,000)	-
19	433020	Jambi	288,500,000	-	-	(177,370,000)	111,130,000
20	018403	Sumsel	51,295,000	-	-	(51,295,000)	-
21	018410	Lampung	-	-	-	-	-
22	018424	Kalbar	218,142,879	865,415,000	-	(218,142,879)	865,415,000
23	433036	Kalteng	395,489,799	290,867,000	-	(249,089,800)	437,266,999
24	018431	Kalsel	662,050,200	-	-	(662,050,200)	-
25	433042	Kaltim	261,458,000	563,311,800	-	(261,458,000)	563,311,800
26	018445	Sulut	242,580,000	-	-	(156,580,000)	86,000,000
27	433051	Sulteng	147,881,000	-	-	-	147,881,000
28	018452	Sulsel	643,673,000	-	-	(270,850,000)	372,823,000
29	433067	Sultra	359,917,000	-	-	(359,917,000)	-
30	433073	Maluku	154,670,000	-	-	-	154,670,000
31	018466	Bali	249,197,671	509,607,000	-	(196,534,671)	562,270,000
32	018562	NTB	733,614,000	199,559,000	-	(733,614,000)	199,559,000
33	433098	NTT	115,530,000	-	-	-	115,530,000
34	433082	Papua	-	-	-	-	-
35	433102	Bengkulu	407,997,100	-	-	-	407,997,100
36	631631	Malut	-	-	-	-	-
37	631610	Banten	155,407,000	-	-	-	155,407,000
38	631606	Babel	54,000,000	-	-	-	54,000,000
39	631627	Gorontalo	-	168,572,000	-	-	168,572,000
40	666798	Kepri	-	-	-	-	-
41	666700	Papua Barat	-	-	-	-	-
42	666803	Sulbar	125,000,000	-	-	-	125,000,000
		<b>TOTAL</b>	<b>17,843,807,385</b>	<b>4,414,610,645</b>	<b>(896,240,000)</b>	<b>(7,526,582,536)</b>	<b>13,835,595,494</b>

Berikut tabel Perolehan Gedung dan Bangunan dalam rangka penambahan nilai Gedung dan Bangunan serta kaitannya dengan penggunaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terhadap aset lainnya periode 1 Januari sd. 31 Desember 2016 :

No.	Uraian Transaksi	Mata Anggaran Belanja Modal Yang Digunakan				Jumlah Mutasi Aset terkait MAK 533
		523111	533111	533115	533121	
	<b>Gedung dan Bangunan</b>					
1	101 - Perolehan/Pembelian Gedung dan Bangunan	-	-	-	131,000,000	131,000,000
2	102 - Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	27,000,000	647,093,250	-	9,423,986,600	10,098,079,850
3	208 - Pengembangan Melalui KDP	-	199,559,000	114,065,000	2,283,707,800	2,597,331,800
4	502 - Perolehan/Penambahan KDP	-	-	-	320,752,000	320,752,000
5	503 - Pengembangan KDP	-	-	-	763,873,000	763,873,000
6	Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	-	-	11,330,000	11,330,000
	Pembelian lainnya dengan menggunakan MAK 533 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan) :					
7	101 - Pembelian Peralatan dan Mesin	-	-	-	492,283,000	492,283,000
8	202 - Penambahan Nilai Jaringan	-	-	-	49,500,000	49,500,000
9	202 - Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	272,000,000	19,315,000	-	291,315,000
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>27,000,000</b>	<b>1,118,652,250</b>	<b>133,380,000</b>	<b>13,476,432,400</b>	<b>14,755,464,650</b>

Perolehan dan penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan BKKBN periode 1 Januari sd. 31 Desember 2016 terdiri dari penggunaan Belanja Barang MAK 52 senilai Rp.27.000.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan MAK 533 senilai Rp.14.728.464.650,00.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan penggunaannya yaitu :

**A. Pengadaan/Pengembangan Gedung dan Bangunan tidak menggunakan MAK 533**

1. Pengadaan Aset yang menambah transaksi Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan menggunakan MAK 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) senilai Rp.27.000.000,00 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Bangka Belitung (631606) untuk pembuatan conblock taman yang menambah nilai aset gedung dan bangunan. Atas transaksi ini telah dilakukan jurnal penyesuaian “Koreksi Beban – Aset”. Belanja Modal yang seharusnya digunakan adalah Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121);
2. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan menggunakan MAK 533111 senilai Rp.647.093.250,00 dimana seharusnya satuan kerja tersebut

dibawah ini menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121), yaitu antara lain :

- a. Penggunaan Belanja MAK 533111 senilai Rp.620.093.250,00 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Timur (018030) untuk Penambahan Nilai Gedung Pertemuan senilai Rp.620.093.250,00;
  - b. Penggunaan Belanja MAK 533111 senilai Rp.27.000.000,00 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Bangka Belitung (631606) berupa penyediaan sarana pendukung gedung berupa railing tangga yang merupakan pengadaan dari optimalisasi sisa pagu kontrak rehab gedung kantor tahap 2 senilai Rp.27.000.000,00.
3. Pengadaan Pembelian/Perolehan Gedung dan Bangunan menggunakan MAK 533121 senilai Rp.131.000.000,00 dimana seharusnya satuan kerja tersebut dibawah ini menggunakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (MAK 533111), yaitu antara lain :
- a. Penggunaan Belanja MAK 533121 senilai Rp.86.000.000,00 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Aceh (018377) berupa peremajaan pagar kantor;
  - b. Penggunaan Belanja MAK 533121 senilai Rp.45.000.000,00 pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Jambi (433020) berupa rehab bangunan pos jaga kantor.

#### **B. Belanja Modal MAK 533 tidak menambah nilai Aset Gedung dan Bangunan**

1. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121) pada beberapa satuan kerja tersebut dibawah ini digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
  - a. Perolehan Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptable) sebesar Rp.11.330.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Jambi (433020) sehingga tidak dapat menambah nilai asset gedung dan bangunan, antara lain berupa :
    - Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Pagar dan Pos Satpam Rp.3.350.000,00;
    - Jasa Konsultan Perencana Renovasi Pagar dan Pos Satpam tahun 2016 Rp.6.380.000,00; dan
    - Biaya Honor dan ATK Pengadaan Pos Satpam yang dicatat di SIMAK BMN sebagai Koreksi Pencatatan Nilai Rp.1.600.000,00.
  - b. Pembelian Peralatan dan Mesin yang dibelanjakan dengan menggunakan

Belanja MAK 533121 senilai Rp.492.283.000,00 pada Satuan Kerja Sekretariat Utama BKKBN (017326). Pembelian Peralatan dan Mesin tersebut digunakan untuk mendukung penambahan nilai gedung dan bangunan Pusdiklat KKB berupa :

- 3 unit Televisi @Rp.12.980.000,00 = Rp. 38.940.000,00
- 1 set Kabel = Rp. 6.490.000,00
- 1 set Bracket Standing Peralatan = Rp. 6.490.000,00
- 6 unit AC Split @Rp.33.198.000,00 = Rp. 199.188.000,00
- 8 buah Kursi @Rp.1.870.000,00 = Rp. 14.960.000,00
- 250 buah kursi @Rp.737.000,00 = Rp. 184.250.000,00
- 7 unit AC Split @ Rp.5.995.000,00 = Rp. 41.965.000,00

- c. Penambahan Nilai Jaringan berupa instalasi lain-lain pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Utara (018445) yang dibelanjakan dengan menggunakan MAK 533121 senilai Rp.49.500.000,00, dan seharusnya menggunakan Belanja Modal Jaringan (MAK 534131);
2. Penambahan nilai Aset Jalan dan Jembatan berupa pada Perwakilan BKKBN Prop. Papua (433082), yang dibelanjakan dengan menggunakan MAK 533111 dan MAK 533115 masing-masing senilai Rp.272.000.000,00 dan Rp.19.315.000,00, dalam hal ini seharusnya satker menggunakan Belanja Modal Jalan dan Jembatan (MAK 534111).

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*

*Rp.25.105.750.410,00*

### **C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.25.105.750.410,00 dan Rp.24.571.657.281,00 sehingga terjadi kenaikan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.534.093.129,00 atau 2,17 persen.

Mutasi nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, sesuai dengan pengelompokan jenis transaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 24.571.657.281,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
101 - Pembelian	Rp 181.973.929,00
177 - Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 17.091.900,00
202 - Penambahan Nilai	Rp 422.930.500,00
<b>Mutasi kurang:</b>	
304 - Reklasifikasi Keluar	(19.189.400,00)
401 - Penghentian Aset dari penggunaannya	(68.713.800,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 25.105.750.410,00</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2016	(11.419.589.895,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 13.686.160.515,00</b>

Transaksi reklasifikasi keluar BKKBN per 31 Desember 2016 sebesar Rp.19.189.400,00 merupakan salah penggunaan kodefikasi alat instalasi pertahanan pada Perwakilan BKKBN Sumatera Barat.

Mutasi nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirinci masing-masing transaksi per satker sebagai berikut :

No.	Kode Satker	Satker	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		Kenaikan/ Penurunan
			Pembelian (101)	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap(177)	Penambahan Nilai (202)	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)	Reklasifikasi Keluar (304)	
1	017326	Sestama	-	-	-	-	-	-
2	682054	Adpin	-	-	-	-	-	-
3	649505	KBKR	-	-	-	-	-	-
4	649512	KSPK	-	-	-	-	-	-
5	649526	Latbang	-	-	-	-	-	-
6	649530	Irtama	-	-	-	-	-	-
7	668419	Ditvok	-	-	-	-	-	-
8	668423	Puslitbang	-	-	-	-	-	-
9	682061	Dalduk	-	-	-	-	-	-
10	666781	DKI	-	-	-	-	-	-
11	017393	Jabar	22.465.729	-	-	-	-	22.465.729
12	017621	Jateng	-	-	14.963.500	-	-	14.963.500
13	017972	DIY	39.841.200	-	-	-	-	39.841.200
14	018030	Jatim	89.700.000	-	-	-	-	89.700.000
15	018377	Aceh	-	-	-	-	-	-
16	018381	Sumut	-	-	-	-	-	-
17	018398	Sumbar	29.967.000	-	-	-	(19.189.400)	10.777.600
18	433011	Riau	-	-	-	-	-	-
19	433020	Jambi	-	-	-	(51.621.900)	-	-51.621.900
20	018403	Sumsel	-	-	-	-	-	-
21	018410	Lampung	-	-	-	-	-	-
22	018424	Kalbar	-	-	-	-	-	-
23	433036	Kalteng	-	-	-	-	-	-
24	018431	Kalsel	-	-	-	-	-	-
25	433042	Kaltim	-	-	-	-	-	-
26	018445	Sulut	-	-	49.500.000	-	-	49.500.000
27	433051	Sulteng	-	-	-	-	-	-
28	018452	Sulsei	-	-	-	-	-	-
29	433067	Sultra	-	-	-	-	-	-
30	433073	Maluku	-	-	-	-	-	-
31	018466	Bali	-	-	-	-	-	-
32	018562	NTB	-	-	-	-	-	-
33	433098	NTT	-	-	67.152.000	-	-	67.152.000
34	433082	Papua	-	-	291.315.000	-	-	291.315.000
35	433102	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
36	631631	Malut	-	17.091.900	-	(17.091.900)	-	-
37	631610	Banten	-	-	-	-	-	-
38	631606	Babel	-	-	-	-	-	-
39	631627	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
40	666798	Kepri	-	-	-	-	-	-
41	666700	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
42	666803	Sulbar	-	-	-	-	-	-
			181.973.929	17.091.900	422.930.500	(68.713.800)	(19.189.400)	534.093.129

Berikut tabel Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dan pengembangan nilai asetnya serta kaitannya dengan penggunaan Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai asset perolehannya, periode 1 Januari sd. 31 Desember 2016 :

No.	Uraian Transaksi	Mata Anggaran Belanja Modal Yang Digunakan						Jumlah Mutasi Aset terkait MAK 534
		532111	533111	533115	533121	534131	534161	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan							
1	101 - Perolehan Pemasangan Jaringan	14.965.729	-	-	-	129.541.200	37.467.000	181.973.929
2	102 - Penambahan Nilai Jaringan	-	272.000.000	19.315.000	64.463.500	-	67.152.000	422.930.500
	JUMLAH BELANJA MODAL	14.965.729	272.000.000	19.315.000	64.463.500	129.541.200	104.619.000	604.904.429

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2016, terdiri dari penggunaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532) senilai Rp.14.965.729,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan (MAK 533) senilai Rp.340.815.000,00 serta Belanja Modal Jaringan dan Penambahan Nilainya (MAK 534) senilai Rp.234.160.200,00.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan penggunaannya yaitu :

**A. Pembelian/Pengembangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak menggunakan MAK 534**

Adanya pencatatan transaksi pemasangan dan penambahan nilai instalasi listrik biasa ke dalam Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan kodefikasi pencatatan aset pada SIMAK BMN belum mengakomodir adanya instalasi listrik biasa yang melekat pada pada nilai Aset Gedung dan Bangunan. Jadi sampai saat ini, seluruh transaksi pemasangan dan penambahan nilai instalasi listrik biasa masih termasuk ke dalam Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Berikut rincian pengadaan pemasangan instalasi listrik biasa (yang seharusnya termasuk ke dalam penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan), yang masuk ke dalam Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada satuan kerja BKKBN, antara lain :

1. Pemasangan jaringan berupa pemasangan instalasi listrik kantor pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat (017393), yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111) senilai Rp.14.965.729,00, yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121);

2. Penambahan Nilai Aset Jaringan pada Perwakilan BKKBN Prop. Papua (433082), yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (MAK 533111) dan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (MAK 533115) masing-masing senilai Rp.272.000.000,00 dan Rp.19.315.000,00;
3. Penambahan Nilai Aset Jaringan pada Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Utara (018445), yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121) senilai Rp.49.500.000,00;
4. Sesuai dengan hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terdapat koreksi yang mempengaruhi Penambahan Nilai Aset Jaringan pada Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah (017621) yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121) senilai Rp.14.963.500,00 berupa :
  - Biaya perubahan daya Gudang perwakilan BKKBN Prov Jateng senilai Rp. 14.611.000,00 berdasarkan SP2D No.161341301012567 tanggal 17-11-2016; dan
  - Sertifikat layak operasi (SLO) senilai Rp. 352.500,00 berdasarkan SP2D No. 161341701001804 tanggal 15-12-2016.

Aset Tetap Lainnya  
Rp.2.893.797.140,0  
0

## C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp.2.893.797.140,00 dan Rp.2.865.600.871,00 sehingga terjadi kenaikan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.28.196.269,00 atau 0,98 persen.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 terdiri dari :

- |                        |   |     |                  |
|------------------------|---|-----|------------------|
| 1. Aset Tetap Renovasi | : | Rp. | 91.120.000,00    |
| 2. Aset Tetap Lainnya  | : | Rp. | 2.802.677.140,00 |

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sesuai dengan pengelompokkan jenis transaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 2,865,600,871.00</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	-
101 · Pembelian	Rp 66,763,700.00
<b>Mutasi Kurang :</b>	
301 · Penghapusan	(215,931.00)
401 · Pengehentian Aset Tetap dari penggunaannya	(38,351,500.00)
Saldo per 31 Desember 2016	Rp 2,893,797,140.00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016	(40,459,375.00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 2,853,337,765.00</b>

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dirinci masing-masing transaksi per satker sebagai berikut :

No.	Kode Satker	Satker	Mutasi Kurang			Kenaikan/ Penurunan
			Pembelian (101)	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)	Penghapusan (301)	
1	017326	Sestama	-	-	-	-
2	682054	Adpin	14,941,300	-	-	14,941,300
3	649505	KBKR	-	-	-	-
4	649512	KSPK	-	-	-	-
5	649526	Latbang	-	-	-	-
6	649530	Irtama	-	-	-	-
7	668419	Ditvok	-	-	-	-
8	668423	Puslitbang	-	-	-	-
9	682061	Dalduk	-	-	-	-
10	666781	DKI	-	-	-	-
11	017393	Jabar	-	-	-	-
12	017621	Jateng	9,500,000	-	-	9,500,000
13	017972	DIY	-	(27,750,000)	-	(27,750,000)
14	018030	Jatim	-	-	-	-
15	018377	Aceh	-	-	-	-
16	018381	Sumut	-	-	-	-
17	018398	Sumbar	7,837,400	-	-	7,837,400
18	433011	Riau	-	(6,600,000)	-	(6,600,000)
19	433020	Jambi	-	-	-	-
20	018403	Sumsel	-	-	-	-
21	018410	Lampung	-	-	-	-
22	018424	Kalbar	-	-	-	-
23	433036	Kalteng	14,500,000	-	-	14,500,000
24	018431	Kalsel	-	-	-	-
25	433042	Kaltim	-	(1,500)	-	(1,500)
26	018445	Sulut	-	-	-	-
27	433051	Sulteng	-	(4,000,000)	-	(4,000,000)
28	018452	Sulsel	-	-	-	-
29	433067	Sultra	-	-	(215,931)	(215,931)
30	433073	Maluku	-	-	-	-
31	018466	Bali	19,985,000	-	-	19,985,000
32	018562	NTB	-	-	-	-
33	433098	NTT	-	-	-	-
34	433082	Papua	-	-	-	-
35	433102	Bengkulu	-	-	-	-
36	631631	Malut	-	-	-	-
37	631610	Banten	-	-	-	-
38	631606	Babel	-	-	-	-
39	631627	Gorontalo	-	-	-	-
40	666798	Kepri	-	-	-	-
41	666700	Papua Barat	-	-	-	-
42	666803	Sulbar	-	-	-	-
			66,763,700	(38,351,500)	(215,931)	28,196,269

Berdasarkan tabel diatas terlihat beberapa satker yang memiliki jenis transaksi Pembelian Aset Tetap Lainnya dan berikut dijelaskan penggunaan belanja modalnya terkait pembelian Aset Tetap Lainnya, yaitu :

1. Satuan Kerja Kedeputusan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (682054)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.14.941.300,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa Bahan-bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya;
2. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah (017621)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.9.500.000,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa Buku-buku dan Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya senilai Rp.9.500.000,00;
3. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Barat (018398)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.7.837.400,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa 73 buah Buku Lainnya @Rp.105.910,00 senilai Rp.7.731.430,00 dan 1 buah Buku Lainnya @Rp.105.970,00;
4. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah (433036)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.14.500.000,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa 1 buah Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya senilai Rp.14.500.000,00;
5. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Bali (018466)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 532111 senilai Rp.19.985.000,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa 1 set Alat Musik Modern/Band senilai Rp.19.985.000,00.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp.4.406.373.000,00

### **C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.4.406.373.000,00 dan Rp.4.855.304.933,00 sehingga terjadi penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp.448.931.933,00 atau 9,25 persen.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sesuai dengan pengelompokan jenis transaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>4.855.304.933,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
502 - Perolehan/Penambahan KDP	1.033.964.700,00
503 - Pengembangan dengan KDP	4.131.409.100,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	
208 - Pengembangan Melalui KDP	(5.614.305.733,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>4.406.373.000,00</b>

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per satker selama periode TA 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Kode Satker	Uraian Satker	Saldo Awal KDP per 1 Januari 2016	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang	Saldo Akhir KDP per 31 Desember 2016
				Perolehan Penambahan KDP (502)	Pengembangan KDP (503)	Pengembangan Melalui KDP (208)	
1	017326	SESTAMA	1.817.278.845,00	-	-	(1.817.278.845,00)	-
2	017621	JATENG	-	21.700.000,00	-	-	21.700.000,00
3	433042	KALBAR	-	41.195.000,00	824.220.000,00	(865.415.000,00)	-
4	433082	KALTENG	-	55.394.900,00	235.472.100,00	(290.867.000,00)	-
5	631631	KALTIM	-	432.836.700,00	130.475.100,00	(563.311.800,00)	-
6	631606	BALI	-	152.882.100,00	356.724.900,00	(509.607.000,00)	-
7	631627	NTB	-	9.204.000,00	190.355.000,00	(199.559.000,00)	-
8	666798	BABEL	983.864.000,00	-	1.461.717.000,00	-	2.445.581.000,00
9	666803	GORONTALO	406.052.000,00	320.752.000,00	932.445.000,00	(168.572.000,00)	1.490.677.000,00
10	666798	KEPRI	1.648.110.088,00	-	-	(1.199.695.088,00)	448.415.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.855.304.933,00</b>	<b>1.033.964.700,00</b>	<b>4.131.409.100,00</b>	<b>(5.614.305.733,00)</b>	<b>4.406.373.000,00</b>

Berdasarkan saldo akhir Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Audited BKKBN per 31 Desember 2016 diatas, dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil audit pemeriksaan BPK RI, Aset KDP pada Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah yang semula (Unaudited) sebesar Rp.14.963.500,00 telah dilakukan koreksi menjadi sebesar Rp.21.700.000,00.  
Koreksi tersebut disebabkan karena terdapat kesalahan pencatatan sebesar Rp.14.963.500,00 yang terdiri dari biaya perubahan daya gudang Perwakilan

BKKBN Prop. Jawa Tengah senilai Rp.14.611.000,00 dan biaya sertifikat layak operasi senilai (SLO) senilai Rp.352.500,00 (menggunakan MAK 533121) sebelumnya dicatat sebagai KDP, padahal seharusnya dicatat sebagai penambah nilai gedung dan bangunan. Sedangkan adanya biaya jasa konsultan perencana renovasi gudang yang direalisasikan dengan MAK 521219 senilai Rp.21.700.000,00 sudah dilakukan koreksi tambah pada Aset KDP BKKBN Jateng.

Timbulnya biaya jasa konsultan perencana renovasi gudang sewajarnya diikuti oleh perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi renovasi gudang. Namun sesuai dengan informasi dari Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah, bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut yang awalnya sudah direncanakan dalam RKAKL DIPA TA 2017 akan direvisi menjadi pengadaan kendaraan operasional kantor.

2. Terdapat KDP *Multiyears* pada Perwakilan BKKBN Prop. Bangka Belitung dengan nilai aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.445.581.000,00, sebagai berikut:
  - a. Pengadaan Rehab Gedung Kantor Tahap I pada Perwakilan BKKBN Prop. Bangka Belitung yang dilaksanakan pada TA 2015 senilai Rp.983.864.000,00;
  - b. Lanjutan Pengadaan Rehab Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Prop. Bangka Belitung yang dilaksanakan pada TA 2016 senilai Rp.1.461.717.000,00.
3. Aset KDP pada Perwakilan BKKBN Gorontalo sebesar Rp.1.490.677.000,00 terdiri dari KDP TAYL senilai Rp.406.052.000,00 dan KDP TA 2016 senilai Rp.1.084.625.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. KDP TAYL berupa pekerjaan pembangunan Gedung Diklat yang terdiri dari konsultan perencanaan dan pengawasan, penimbunan, pembuatan halaman dan tempat parkir Gedung Diklat. Aset tersebut belum dapat diakui sebagai Aset Tetap pada Neraca karena rencananya akan dibangun Gedung Diklat yang baru, akan tetapi terkendala anggaran untuk pembangunan Gedung Diklat masih belum tersedia;
  - b. Direncanakan Renovasi Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Prop. Gorontalo pada TA 2016, akan tetapi karena keterbatasan anggaran belanja modal yang tersedia setiap tahunnya maka renovasi tersebut direncanakan akan dilaksanakan dalam III (Tiga) Tahap mulai tahun 2016 sd. 2018;
  - c. KDP TA 2017 senilai Rp.1.084.625.000,00 berupa Renovasi Gedung Kantor Tahap I yang terlaksana pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor dengan SPK No.321/KU.806/J1/2016 tanggal 29 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.308.960.000,00 jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender mulai 29 April sd. 29 Juni 2016;
  - Renovasi Gedung Aula Kantor dengan SPK No.817/KU.807/B3/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.680.660.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 70 hari kalender mulai 18 Oktober sd. 27 Desember 2016;
  - Konsultan Pengawas dengan SPK No.822/KU.800/J1/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.45.975.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 70 hari kalender mulai tanggal 19 Oktober sd. 28 Desember 2016;
  - Biaya pengelolaan (honor/biaya rapat/perjadin terkait belanja modal) sebesar Rp.49.535.000,00.
- d. Aset yang terbentuk dari Renovasi Gedung Kantor Tahap I berupa Aula Gedung Kantor sudah dapat digunakan akan tetapi masih dicatat sebagai KDP karena masih berkaitan dengan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor yang belum selesai dilaksanakan sampai dengan TA 2018;
- e. Pelaksanaan Renovasi Gedung Kantor Tahp II sudah teranggarkan di TA 2017 dan sudah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan dan untuk Dana Renovasi Gedung Kantor Tahap III sudah diusulkan pada RKAKL TA 2018.
4. Saldo akhir per 31 Desember 2016 atas KDP Perwakilan BKKBN Kep. Riau senilai Rp.448.415.000,00 terdiri dari KDP TAYL senilai Rp.1.648.110.088,00 dan Penyelesaian KDP pada TA 2016 senilai Rp.1.199.695.088,00 berupa :
- Detail Engineering Design (DED) Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Prop. Kep.Riau ( pekerjaan mulai dilaksanakan pada TA 2014);
  - Batu Miring, Pagar dan Gorong-gorong (pekerjaan mulai dilaksanakan pada TA 2015)
  - Tanah dan Pematangan Lahan ( pekerjaan mulai dilaksanakan di TA 2016)
- Sementara Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor belum bisa dilaksanakan karena adanya Moratorium Pembangunan Kantor oleh Presiden RI dan tidak dianggarkan oleh BKKBN Pusat. Namun BKKBN Kep. Riau tetap mengajukan Pengadaan Gedung Kantor dalam RKBMN 2017 dan RKBMN 2018. Detail Engineering Design (DED) Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Prop. Kep.Riau walaupun sudah selesai pengerjaannya namun masih berupa KDP dikarenakan fisik gedung kantor belum dilaksanakan.

## C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp.419.508.583.914,00 dan Rp.382.894.649.801,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2016.

### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	378.686.213.215,00	(306.535.032.923,00)	72.151.180.292,00
2	Gedung dan Bangunan	304.683.725.802,00	(101.513.501.721,00)	203.170.224.081,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.105.750.410,00	(11.419.589.895,00)	13.686.160.515,00
4	Aset Tetap Lainnya	2.893.797.140,00	(40.459.375,00)	2.853.337.765,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>711.369.486.567,00</b>	<b>(419.508.583.914,00)</b>	<b>291.860.902.653,00</b>

Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan BKKBN Unaudited TA 2016 telah dilakukan koreksi terhadap nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yaitu koreksi kurang catat terhadap nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp.24.711.875,00 dan koreksi kurang catat nilai akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp. 113.877,00, dengan rincian sebagai berikut :

### Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin UNAUDITED			(306.510.321.048,00)
Satker	Koreksi kurang	Koreksi Tambah	
PUSLITBANG		(805.000)	
DALDUK	750.000		
IRTAMA	1.531.875		
KSPK	562.500		
LATBANG	375.000		
NTT		(17.500.000)	
ADPIN	562.500		
KBKR		(10.188.750)	
<b>Nilai Koreksi Tambah/Kurang</b>	<b>3.781.875</b>	<b>(28.493.750)</b>	<b>(24.711.875,00)</b>
<b>Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin AUDITED</b>			<b>(306.535.032.923,00)</b>

1. Akum. Penyusutan Peralatan Mesin atas Koreksi kurang catat Transfer Masuk di Satker Puslitbang berupa LCD Proyektor 54 dari Sestama senilai Rp. 850.000,- yang juga berpengaruh ke penambahan Akun Beban Penyusutan Akun Beban Penyusutan Peralatan Mesin;
2. Akum. Penyusutan Peralatan Mesin atas Koreksi kelebihan catat Tranfer Masuk di Satker Pengendalian Penduduk berupa Mesin-PRINT 584 - 587 dari Sestama senilai Rp. 750.000,- yang juga berpengaruh ke pengurangan Akun Beban Penyusutan Peralatan Mesin;
3. Akum. Penyusutan Peralatan Mesin atas Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk Mesin-PRINT 588 - 589 pada Satker Irtama dari Sestama (5.7) SERTA atas Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk Laptop di Irtama dari Sestama (5.2) senilai Rp. 1.531.875,00 yang juga berpengaruh ke pengurangan Akun Beban Penyusutan Peralatan Mesin;;
4. Akum. Penyusutan Peralatan Mesin atas Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk Mesin-PRINT 594 - 596 di KSPK dari Sestama senilai Rp. 562.500,00 yang juga berpengaruh ke pengurangan Akun Beban Penyusutan Peralatan Mesin;;
5. Akum. Penyusutan Peralatan Mesin atas Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk Mesin-PRINT 597 - 598 di Latbang dari Sestama senilai Rp. 375.000,00 yang juga berpengaruh ke pengurangan Akun Beban Penyusutan Peralatan Mesin;;
6. Akum. Penyusutan Peralatan Mesin atas Koreksi kelebihan catat Transfer Masuk Mesin-PRINT 600 - 602 di Adpin dari Sestama senilai Rp. 562.500,00 yang juga berpengaruh ke pengurangan Akun Beban Penyusutan Peralatan Mesin;;
7. Akum. Penyusutan Peralatan Mesin atas Koreksi kurang catat Transfer Masuk di KBKR senilai Rp. 10.188.750,00 yang juga berpengaruh ke penambahan Akun Beban Penyusutan Peralatan Mesin;
8. Penambahan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan atas Koreksi Reklas Masuk PM yang belum dicatat pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi NTT sebesar Rp17.500.000,00.

#### Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

<b>Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan UNAUDITED</b>			<b>(8.217.606.017,00)</b>
Satker	Koreksi Kurang	Koreksi Tambah	
Jateng		(113.877)	
Nilai Koreksi Tambah	-	(113.877)	(113.877,00)
<b>Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan,Irigasi dan jaringan AUDITED</b>			<b>(8.217.719.894,00)</b>

Penambahan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan atas Koreksi KDP ke jaringan yang belum dicatat pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 113.877,00.

Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi  
Rp.159.060.318,00

### C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.159.060.318,00 dan Rp.204.007.998,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

#### Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah Debitur (Orang)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2016 (Rp)
				Tambah	Kurang	
017326	SESTAMA	-	-	-	-	-
018445	BKKBN SULUT	1	204,007,998.00	32,060,880.00	77,008,560.00	159,060,318.00
	<b>JUMLAH</b>		<b>204,007,998.00</b>			<b>159,060,318.00</b>

Mutasi Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp. 204,007,998.00</b>
Mutasi Tambah :	-
- Reklasifikasi dari Bagian Lancar TGR BKKBN Sulawesi Utara ke Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)	Rp. 32,060,880.00
Mutasi Kurang :	
- Setoran an. AM 2016	(38,504,280.00)
- Reklasifikasi Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang) Satker BKKBN Sulawesi Utara menjadi Bagian Lancar TGR	(38,504,280.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp. 159,060,318.00</b>

Mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Piutang TGR pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara merupakan piutang atas penggelapan pajak (fiktif) dengan nilai penetapan TGR sebesar Rp. 352.898.638,00 berdasarkan SKTJM an. AM No. 294/KU.403/J/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan jatuh tempo piutang per November 2014. Sampai dengan

31 Desember 2014 atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp.84.768.880,00 melalui pemotongan gaji setiap bulan dan pemotongan remunerasi sehingga saldo piutang jangka panjang TGR per 31 Desember 2014 sebesar Rp.268.129.758,00 (Rp.301.719.978,00 – Rp 33.590.220,00).

Sehubungan dengan jatuh temponya SKTJM an. AM pada bulan November 2014, maka telah dilakukan pembaharuan SKTJM dengan Nomor No.109/KU.403/J/2014 tanggal 27 November 2014 dan sejak pembaharuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebagai berikut :

- Selama Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui pemotongan gaji dan pemotongan remunerasi setiap bulan sebesar Rp.32.060.880,00;
- Selama Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui pemotongan gaji dan pemotongan remunerasi setiap bulan sebesar Rp.38.504.000,00.

Sehingga saldo keseluruhan piutang TGR an. AM per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp.197.564.878,00 maka pada tanggal 31 Desember 2016 telah dilakukan penyesuaian piutang sesuai dengan kelompoknya dengan melakukan reklasifikasi dari Piutang Tagihan TGR ke Bagian Lancar Tagihan TGR sebesar Rp.38.504.000,00 sehingga total Piutang Tagihan TP/TGR an. Sdr. AM per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp. Rp.159.060.878,00.

Dasar perhitungan reklasifikasi tersebut diatas adalah berdasarkan perkiraan setoran lancar setiap bulan selama TA 2016 yaitu sebesar Rp.38.504.000,00

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tun-  
tutan Ganti Rugi  
(Rp.795.302,00)*

#### **C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar (Rp.795.302,00) dan (Rp.1.020.040,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Ringkasan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) disajikan pada Tabel berikut ini :

No.	KUALITAS	Jumlah Debitur (Orang)	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	159,060,318.00	0.50%	795,302.00
2	Kurang Lancar	0	-	10.00%	-
3	Diragukan	-	-	50.00%	-
4	Macet	-	-	100.00%	-
<b>JUMLAH</b>			<b>159,060,318.00</b>		<b>795,302.00</b>

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp. 8.427.673.414,-

### C.17 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo piutang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.8.427.673.414,00 dan Rp.8.499.808.374,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp.72.134.960,00. Piutan jangka panjang lainnya BKKBN ini merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang berupa dana bansos yang digulirkan kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

No.	Satuan Kerja	Jumlah Debitur (Orang)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2016 (Rp)
				Tambah	Kurang	
1.	KSPK	1	8.499.808.374,00	-	72.134.960,00	8.427.673.414,00
<b>JUMLAH</b>			<b>8.499.808.374,00</b>			<b>8.427.673.414,00</b>

#### Penjelasan :

- Sejak Tahun 2006 s/d Tahun 2009, BKKBN telah mendapatkan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.59.859.000.000,00 dengan rincian sbb :
  - Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000.000,00;
  - Tahun 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,00;
  - Tahun 2008 sebesar Rp. 23.970.000.000,00; dan
  - Tahun 2009 sebesar Rp. 15.925.000.000,00.
- Pada periode Tahun Anggaran 2006 dan 2007 merupakan belanja bantuan sosial, berdasarkan peraturan Kepala BKKBN nomor 332/HK.010/F3/2008 tanggal 22 Juli 2008 dana bantuan modal diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS.
- Realisasi jumlah pengiriman dana bantuan modal usaha ke kelompok UPPKS yang berasal dari APBN Pusat dan APBN Provinsi berdasarkan SPM/SP2D pada periode 22 Juli 2008 s/d 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 19.670.000.000,00.
- Perkembangan pengembalian sisa dana kelompok UPPKS yang sudah disetor ke kas Negara s/d tanggal 24 desember 2010 adalah Rp. 13.589.568.032,00 dari dana sebesar Rp. 19.670.000.000,00, sehingga dana UPPKS yang masih belum dikembalikan

sebesar Rp.6.080.431.968,00 (out standing) berada di provinsi dan SKPD kab/kota.

Berdasarkan hasil Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan BKKBN TA 2012 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemetaan I dan II UPPKS Perwakilan BKKBN Provinsi periode 22 Juli 2008 sd. 31 Agustus 2009, telah diperoleh perkembangan data terbaru sebagai berikut :

1. Jumlah Bansos menurut BPK yang menjadi Piutang Negara .....	Rp.	9.262.102.474,00
2. Provinsi yang dana Bansos tidak cair pada mapping II yaitu :		
• Provinsi NTT .....	(Rp.	32.500.000,00)
3. Provinsi setor dana ke Kas Negara		
• Lampung (Rp. ....	4.715.526,00)	
• Sumatera Barat .....	(Rp.	60.000.000,00)
• NTT .....	(Rp.	86.204.000,00)
• Riau .....	(Rp.	25.750.000,00)
• Banten .....	(Rp.	318.500,00)
• Jawa Tengah .....	(Rp.	245.596.100,00)
• Sumatera Utara .....	(Rp.	231.145.000,00)
• Sumatera Selatan .....	(Rp.	14.100.000,00)
• NTB.....	(Rp.	47.758.000,00)
• Papua .....	(Rp.	14.206.974,00)
Jumlah setor dana ke Kas Negara .....	(Rp.	<u>729.794.100,00</u> )
<b>SISA PIUTANG NEGARA .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.499.808.374,00</b>

Berdasarkan sisa piutang negara tersebut diatas, BKKBN telah melakukan pemantauan dana UPPKS dengan melakukan pemetaan di 7 propinsi dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil dana UPPKS yang berstatus macet adalah sebesar Rp.3.046.550.005,00;
- Dana UPPKS yang statusnya masih dikelola di kelompok UPPKS dan berpotensi tidak dapat tertagih adalah sebesar Rp.5.561.959.756,00.

Atas permasalahan ini BKKBN telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- Kepala BKKBN telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan RI Nomor 2077/KU.301/B3/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BKKBN TA 2011 yang isinya memohon kepada Menteri Keuangan untuk dapat menentukan perlakuan akuntansi terhadap pengelolaan dana UPPKS khususnya sisa piutang UPPKS yang tidak tertagih dapat dihapuskan;
- Deputi KSPK telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 474/KU.301/B3/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Permohonan Penghapusan Piutang Tak Tertagih dengan isi surat yang sama seperti surat sebelumnya
- Melalui Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PKN), DJKN telah

menjawab dengan Surat Nomor S-294/KN.4/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Permohonan penghapusan Piutang BKKBN yang berisi :

“Sesuai dengan PMK No.201/PMK.06/2010 bahwa sebagai bagian dari pengelolaan piutang, K/L perlu membentuk penyisihan piutang tidak tertagih agar saldo piutang di neraca mencerminkan nilai piutang yang dapat direalisasikan”.

Kemudian disebutkan pula bahwa, “pada tingkat pertama, piutang Negara diselesaikan sendiri oleh K/L sebagai pemilik piutang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika piutang tersebut tidak dapat diselesaikan dan telah dikategorikan sebagai piutang macet, maka berdasarkan ketentuan pasal 12 UU Nomor 49/Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, K/L wajib menyerahkan piutang yang telah macet ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang negara diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan melalui DJKN dan disampaikan secara tertulis yang dilampiri sekurang-kurangnya: (1) Daftar nominatif penanggung utang dan (2) Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang;

- d. BKKBN melalui Deputi KSPK telah mengirimkan Surat Nomor 2505/KS.300/F4/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Somasi Dana Bansos yang Macet kepada 19 Perwakilan BKKBN Propinsi, sesuai arahan DJKN. Somasi dilakukan kepada kelompok-kelompok yang dana bansosnya dinyatakan macet sebanyak 3 kali somasi dalam jangka waktu 3 bulan mulai bulan Oktober sd. Desember 2014. Jika sampai dengan somasi ketiga belum juga dapat melunasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka piutang tak tertagih tersebut akan diserahkan ke pihak PUPN Cabang di KPKNL setempat untuk dimintakan penghapusan dan diterbitkan PSBDT;
- e. BKKBN melalui Deputi KSPK telah mengirimkan surat ke Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Nomor 583/KS.3023/F4/2015 tanggal 18 Februari 2015 Perihal Permohonan Penghapusan Piutang yang isinya menyampaikan bahwa BKKBN telah melakukan somasi sebanyak 3 kali, namun pada akhirnya kelompok-kelompok UPPKS penerima dana bansos yang dinyatakan macet tidak mampu mengembalikan piutang tersebut, untuk selanjutnya agar piutang tersebut dapat dihapuskan;
- f. DJKN melalui Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain telah menjawab dengan Surat Nomor S-464/KN/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghapusan Piutang Dana Bergulir yang Berasal dari Anggaran Dana Bantuan Sosial, yang berisi bahwa :

“Penghapusan Piutang Negara dapat dilaksanakan setelah dilakukan pengurusan piutang negara oleh DJKN/PUPN dan dinyatakan belum dapat ditagih, yaitu dengan diterbitkannya Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN”. Surat tersebut juga menyatakan bahwa “Adapun syarat agar piutang dimaksud dapat diurus oleh PUPN/DJKN yaitu :

  1. Ada dan besarnya telah pasti menurut hukum disertai dengan dokumen pendukung;
  2. Penyerahan piutang telah melakukan upaya penagihan secara maksimal; dan
  3. Piutang dimaksud telah dicatat dalam laporan keuangan dan digolongkan sebagai piutang macet sesuai dengan PMK No.69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas

Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.”

- g. BKKBN akan mengajukan dan menyerahkan pengurusan piutang negara tidak dapat ditagih/macet kepada PUPN Cabang di KPKNL Jakarta I dengan tujuan agar dapat diterbitkan PSBDT sebagai salah satu syarat pengajuan usulan penghapusan piutang negara secara bersyarat ke Kementerian Keuangan melalui DJKN;
- h. Selama TA 2016 terdapat beberapa kabupaten/kota melalui Satker Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah yang melakukan penyetoran kembali ke kas Negara menggunakan MAP 423957 sebesar Rp.72.134.960,00. Adanya setoran tersebut mengakibatkan adanya transfer keluar Piutang UPPKS dari Satker KSPK (649512) ke Satker Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah (017621), sehingga mengurangi Piutang UPPKS menjadi senilai Rp.8.427.673.414,00.
- i. Rincian setoran UPPKS dari Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah antara lain:
- Setoran senilai Rp. 1.251.000,00 tanggal 29-12-2016 dengan NTPN Nomor B319E2UTJTOIURUP dari kelompok UPPKS Kab. Pekalongan;
  - Setoran senilai Rp. 69.999.960,00 tanggal 29-12-2016 dengan NTPN Nomor 66A662URSAU50KUP dari kelompok UPPKS Kab. Jepara;
  - Setoran senilai Rp. 884.000,00 tanggal 29-12-2016 dengan NTPN Nomor 968202V0BQBJCPUP dari kelompok UPPKS Kab. Kendal.

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang jangka panjang  
lainnya Rp.  
8.427.673.414,00

### C.18 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang jangka panjang lainnya Per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.8.427.673.414,00 dan Rp.8.499.808.374,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan audit BPK telah dilakukan koreksi transfer keluar penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang jangka panjang lainnya dari Satker KSPK (649512) ke Satker Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah (017621) sebesar Rp.72.134.960,00. Koreksi ini karena mengikuti adanya transaksi pada Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– piutang jangka panjang lainnya :

No.	Kualitas	Jumlah Debitur (Orang)	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1.	Macet	1	8.499.808.374,00	-100%	(8.499.808.374,00)
<b>JUMLAH</b>			<b>8.499.808.374,00</b>		<b>(8.499.808.374,00)</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp.32.297.196.201,00

### C.19 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.32.297.196.201,00 dan Rp.37.939.703.660,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Aset Tak Berwujud (ATB) BKKBN mengalami penurunan sebesar Rp. 5.642.507.459,00 atau sebesar 14,87 persen.

#### Mutasi Aset Tetap Tak Berwujud Periode Tahun Anggaran 2016

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 37.939.703.660,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
101 - Pembelian	Rp 1.032.744.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	
188 - Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(6.675.251.459,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 32.297.196.201,00</b>
Amortisasi Penyusutan sd. 31 Desember 2016	(18.388.234.379,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 13.908.961.822,00</b>

Mutasi ATB per jenis akun terinci sebagai berikut :

Kode Akun	Nama Akun	Nilai Perolehan per 31-12-2015	Mutasi		Nilai Perolehan per 31-12-2016
			Tambah	Kurang	
162151	Software	20.175.550.695,00	730.784.000,00	(1.534.675.729,00)	19.371.658.966,00
162161	Lisensi	17.764.152.965,00	301.960.000,00	(5.140.575.730,00)	12.925.537.235,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.939.703.660,00</b>	<b>1.032.744.000,00</b>	<b>(6.675.251.459,00)</b>	<b>32.297.196.201,00</b>

Penambahan dan Pengurang Aset Tetap Tak Berwujud per satker per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Satker	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Kenaikan/ Penurunan
			Pembelian Software (101)	Pembelian Lisensi (101)	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya - Software (188)	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya - Lisensi (188)	
1	017326	Sestama	-	-	(135.300.000)	(594.990.000)	(730.290.000)
2	682054	Adpin	639.284.000	301.960.000	(1.382.467.729)	(4.545.585.730)	(4.986.809.459)
3	649505	KBKR	-	-	-	-	-
4	649512	KSPK	-	-	-	-	-
5	649526	Latbang	-	-	-	-	-
6	649530	Irtama	-	-	-	-	-
7	668419	Ditvok	-	-	-	-	-
8	668423	Puslitbang	-	-	-	-	-
9	682061	Dalduk	-	-	-	-	-
10	666781	DKI	-	-	-	-	-
11	017393	Jabar	-	-	-	-	-
12	017621	Jateng	-	-	-	-	-
13	017972	DIY	-	-	(8.680.000)	-	(8.680.000)
14	018030	Jatim	-	-	-	-	-
15	018377	Aceh	-	-	-	-	-
16	018381	Sumut	-	-	-	-	-
17	018398	Sumbar	-	-	-	-	-
18	433011	Riau	-	-	-	-	-
19	433020	Jambi	-	-	(8.228.000)	-	(8.228.000)
20	018403	Sumsel	-	-	-	-	-
21	018410	Lampung	-	-	-	-	-
22	018424	Kalbar	-	-	-	-	-
23	433036	Kalteng	91.500.000	-	-	-	91.500.000
24	018431	Kalsel	-	-	-	-	-
25	433042	Kaltim	-	-	-	-	-
26	018445	Sulut	-	-	-	-	-
27	433051	Sulteng	-	-	-	-	-
28	018452	Sulsei	-	-	-	-	-
29	433067	Sultra	-	-	-	-	-
30	433073	Maluku	-	-	-	-	-
31	018466	Bali	-	-	-	-	-
32	018562	NTB	-	-	-	-	-
33	433098	NTT	-	-	-	-	-
34	433082	Papua	-	-	-	-	-
35	433102	Bengkulu	-	-	-	-	-
36	631631	Malut	-	-	-	-	-
37	631610	Banten	-	-	-	-	-
38	631606	Babel	-	-	-	-	-
39	631627	Gorontalo	-	-	-	-	-
40	666798	Kepri	-	-	-	-	-
41	666700	Papua Barat	-	-	-	-	-
42	666803	Sulbar	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>730.784.000</b>	<b>301.960.000</b>	<b>(1.534.675.729)</b>	<b>(5.140.575.730)</b>	<b>(5.642.507.459)</b>

1. Berikut tabel perolehan Aset Tak Berwujud dalam rangka penambahan nilai Aset Tak Berwujud serta kaitannya penggunaan Belanja Modal Aset Tetap Berwujud terhadap aset lainnya periode 1 Januari sd. 31 Desember 2016

No.	Uraian	Mata Anggaran Belanja Modal yang Digunakan		Jumlah
		532111	536111	
	<b>Aset Tak Berwujud</b>			
1	101 - Pembelian Software	-	730,784,000.00	730,784,000.00
2	101 - Pembelian Lisensi	165,110,000.00	136,850,000.00	301,960,000.00
	Pembelian lainnya dengan menggunakan MAK 536 (Belanja Modal Lainnya) :			
3	101 - Pembelian Peralatan dan Mesin	-	1,016,962,820.00	1,016,962,820.00
4	101 - Pembelian Aset Tetap Lainnya	-	46,778,700.00	46,778,700.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>165,110,000.00</b>	<b>1,931,375,520.00</b>	<b>2,096,485,520.00</b>

Perolehan Aset Tak Berwujud periode 1 Januari sd. 31 Desember 2016 terdiri dari penggunaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532) senilai Rp.165.110.000,00 dan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111) senilai Rp.1.931.375.520,00.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan penggunaannya yaitu :

**A. Pembelian/Pengembangan Nilai Aset Tak Berwujud tidak menggunakan MAK 536**

Pembelian Lisensi pada satuan kerja Kedepuitan Advokasi Penggerakkan dan Informasi (682054), yang dibelanjakan dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.165.110.000,00 dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111).

**B. Belanja Modal MAK 536111 tidak menambah transaksi "Pembelian Aset Tak Berwujud"**

1. Pembelian Aset Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 536111 senilai Rp.1.016.962.820,00 dimana satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111), yaitu antara lain:

a. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.725.791.000,00 pada satuan kerja Kedepuitan Advokasi Penggerakkan dan Informasi (682054) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :

- 1 unit Focussing Screen/Layar LCD Projector = Rp. 197.900.000,00
  - 1 unit Wireless = Rp. 126.420.000,00
  - 1 unit Rak Server = Rp. 92.719.000,00
  - 6 unit Laptop @Rp.14.834.000,00 = Rp. 89.004.000,00
  - 1 unit Laptop = Rp. 13.399.000,00
  - 1 unit Laptop = Rp. 13.849.000,00
  - 80 unit Battery UPS @Rp.2.200.000,00 = Rp. 176.000.000,00
  - 1 unit Rak Battery UPS = Rp. 16.500.000,00
- b. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.197.378.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Barat (018398) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :
- 1 buah Papan Visual (Tiang Billboard) = Rp. 64.950.000,00
  - 1 buah Papan Visual (Standing Frame) = Rp. 46.928.000,00
  - 36 unit Telephone Mobile @Rp.2.002.411,00 = Rp. 72.086.796,00
  - 36 unit Local Battery Telephone/power bank @Rp.372.589,00 = Rp. 13.413.204,00
- c. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.93.793.820,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah (433036) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :
- 3 buah Lemari Kayu @Rp.6.950.000,00 = Rp. 20.850.000,00
  - 1 unit Telephone Mobile = Rp. 10.800.000,00
  - 24 unit Telephone Mobile @Rp.2.390.147,00 = Rp. 57.363.528,00
  - 2 unit Telephone Mobile @Rp.2.390.146,00 = Rp. 4.780.292,00
2. Pembelian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111) senilai Rp.46.778.700,00 digunakan untuk Pembelian Bahan-bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya pada satuan kerja berikut ini:
- a. Kedeputian ADPIN (682054) = Rp. 14.941.300,00
  - b. BKKBN Prop. Jawa Tengah (017621) = Rp. 9.500.000,00
  - c. BKKBN Prop. Sumatera Barat (018398) = Rp. 7.837.400,00
  - d. BKKBN Prop. Kalimantan Tengah (433036) = Rp. 14.500.000,00

Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan BKKBN Unaudited TA 2016 telah dilakukan koreksi terhadap nilai Aset Tak Berwujud, dengan rincian sebagai berikut :

ASET TAK BERWUJUD UNAUDITED			33.027.486.201
	Software	Lisensi	
SESTAMA	(135.300.000)	(594.990.000)	
<b>Nilai Koreksi Tambah</b>	<b>(135.300.000)</b>	<b>(594.990.000)</b>	<b>(730.290.000)</b>
ASET TAK BERWUJUD AUDITED			32.297.196.201

Pengurangan nilai aset tak berwujud pada Satker Sestama berupa software dan lisensi senilai Rp. 730.290.000,- merupakan koreksi BMN ATB yang rusak/expired per 31 Desember 2016.

Aset Lain-lain  
Rp.17.975.214.997,  
00

## C.20 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.17.975.214.997,00 dan Rp.12.140.035.243,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BKKBN. Sedangkan nilai buku Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.3.710.362.107,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.14.264.852.890,00.

Mutasi nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 sesuai dengan pengelompokkan jenis transaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 12.140.035.243,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
188 - Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 11.497.309.921,00
<b>Mutasi kurang:</b>	
177 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(457.944.905,00)
299 - Transaksi Normalisasi BMN (BMN yg dihentikan)	(63.085.888,00)
391 - Penghapusan (BMN yg dihentikan)	(4.738.584.174,00)
394 - Reklasifikasi Keluar (BMN yg dihentikan)	(7.698.000,00)
396 - Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(394.817.200,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 17.975.214.997,00</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sd. 31 Desember 2016	(9.754.632.518,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sd. 31 Desember 2016	(4.510.220.372,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp 3.710.362.107,00</b>

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dirinci masing-masing transaksi per satker sebagai berikut :

No.	Kode Satker	Satker	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang					Kenalkan/ Penurunan	
			Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap(177)	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) (299)	Penghapusan (BMN yang dihentikan) (391)	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) (394)	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) (396)		
1	017326	Sestama	730.290.000	-	-	-	-	-	-	730.290.000
2	682054	Adpin	5.928.053.459	-	-	-	-	-	-	5.928.053.459
3	649505	KBKR	-	-	-	-	-	-	-	-
4	649512	KSPK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	649526	Latbang	-	-	-	-	-	-	-	-
6	649530	Irtama	-	-	-	-	-	-	-	-
7	668419	Ditvok	-	-	-	-	-	-	-	-
8	668423	Puslitbang	-	-	-	-	-	-	-	-
9	682061	Dalduk	-	-	-	-	-	-	-	-
10	666781	DKI	-	-	-	-	-	-	-	-
11	017393	Jabar	-	-	-	-	-	-	-	-
12	017621	Jateng	-	-	-	(132.260.000)	-	-	-	(132.260.000)
13	017972	DIY	576.065.150	(106.145.333)	-	-	-	-	-	469.919.817
14	018030	Jatim	-	-	-	(193.500.000)	-	-	-	(193.500.000)
15	018377	Aceh	149.600.000	-	-	-	-	(149.600.000)	-	-
16	018381	Sumut	-	-	-	-	-	-	-	-
17	018398	Sumbar	-	-	-	(299.509.550)	-	-	-	(299.509.550)
18	433011	Riau	255.027.200	(11.775.000)	-	-	-	(245.217.200)	-	(1.965.000)
19	433020	Jambi	872.186.581	-	(42.255.888)	(1.184.573.217)	-	-	-	(354.642.524)
20	018403	Sumsel	-	-	-	-	-	-	-	-
21	018410	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
22	018424	Kalbar	156.698.970	-	-	(321.602.930)	-	-	-	(164.903.960)
23	433036	Kalteng	13.100.000	-	(11.778.000)	(538.712.500)	-	-	-	(537.390.500)
24	018431	Kalsel	267.523.000	-	-	(195.342.000)	-	-	-	72.181.000
25	433042	Kaltim	173.325.650	-	-	(116.813.000)	-	-	-	56.512.650
26	018445	Sulut	-	-	-	-	(48.000)	-	-	(48.000)
27	433051	Sulteng	202.618.650	-	-	(328.526.000)	-	-	-	(125.907.350)
28	018452	Sulsel	137.619.300	-	-	(171.109.300)	-	-	-	(33.490.000)
29	433067	Sultra	-	-	-	(2.870.032)	-	-	-	(2.870.032)
30	433073	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
31	018466	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
32	018562	NTB	53.550.000	(10.000.000)	-	(53.550.000)	-	-	-	(10.000.000)
33	433098	NTT	646.390.285	-	-	(8.148.800)	(1.000.000)	-	-	637.241.485
34	433082	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
35	433102	Bengkulu	76.235.000	(56.250.000)	(5.000.000)	-	(5.000.000)	-	-	9.985.000
36	631631	Malut	239.512.776	(257.674.572)	-	-	-	-	-	(18.161.796)
37	631610	Banten	494.619.300	-	(4.052.000)	(590.190.300)	-	-	-	(99.623.000)
38	631606	Babel	32.200.000	(16.100.000)	-	-	-	-	-	16.100.000
39	631627	Gorontalo	196.000.000	-	-	(196.000.000)	-	-	-	-
40	666798	Kepri	6.338.200	-	-	-	-	-	-	6.338.200
41	666700	Papua Barat	-	-	-	(405.876.545)	-	-	-	(405.876.545)
42	666803	Sulbar	290.356.400	-	-	-	(1.650.000)	-	-	288.706.400
		<b>TOTAL</b>	<b>11.497.309.921</b>	<b>(457.944.905)</b>	<b>(63.085.888)</b>	<b>(4.738.584.174)</b>	<b>(7.698.000)</b>	<b>(394.817.200)</b>		<b>5.835.179.754</b>

Akumulasi  
Penyusutan/  
Amortisasi Aset  
lainnya  
Rp.  
32.653.087.269,00

### C.21 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.32.653.087.269,00 dan Rp.10.523.754.215,00. Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan senilai Rp. 22.129.333.054,00 atau sebesar 210,28 persen. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

#### Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Amortisasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud				
	1. Software Komputer	19.371.658.966	(11.998.746.114)	-	7.372.912.852
	2. Lisensi	12.925.537.235	(6.389.488.265)	-	6.536.048.970
	<b>Jumlah</b>	<b>32.297.196.201</b>	<b>(18.388.234.379)</b>	<b>-</b>	<b>13.908.961.822</b>
B	Aset Lainnya	17.975.214.997	(4.510.220.372)	(9.754.632.518)	3.710.362.107
	<b>Jumlah</b>	<b>17.975.214.997</b>	<b>(4.510.220.372)</b>	<b>(9.754.632.518)</b>	<b>3.710.362.107</b>
	<b>Total</b>	<b>50.272.411.198</b>	<b>(22.898.454.751)</b>	<b>(9.754.632.518)</b>	<b>17.619.323.929</b>

Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan BKKBN Unaudited TA 2016 telah dilakukan koreksi terhadap nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya UNAUDITED					(32.568.542.519)
	Akumulasi Amortisasi Software	Akumulasi Amortisasi Lisensi	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
ADPIN	67.604.250	21.940.500			
SESTAMA	(135.300.000)	(297.495.000)	432.795.000,00		
BENGGKULU				(5.000.000)	
<b>Nilai Koreksi Tambah/Kurang</b>	<b>(67.695.750)</b>	<b>(275.554.500)</b>	<b>432.795.000</b>	<b>(5.000.000)</b>	<b>84.544.750</b>
<b>Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya AUDITED</b>					<b>(32.653.087.269)</b>

1. Pada Satker Sekretariat Utama terdapat koreksi kurang atas nilai akumulasi amortisasi software dan lisensi senilai Rp. 432.795.000,00 yang merupakan reklas keluar ke aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
2. Penambahan nilai akumulasi amortisasi software dan lisensi yang belum dicatat pada satker ADPIN senilai Rp. 89.544.750,00;
3. Pengurangan nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dikarenakan adanya kesalahan catat Reklas Masuk Aset seharusnya Rp20.235.000,00 namun dicatat Rp25.235.000,00, sehingga nilai akumulasi penyusutan aset tetapnya berkurang senilai Rp. 5.000.000,-.

Utang Kepada Pihak  
Ketiga  
Rp.2.793.367.866,00

## C.22 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.793.367.866,00 dan Rp.5.405.878.401,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Utang kepada pihak ketiga BKKBN mengalami penurunan sebesar Rp.2.612.510.535,00 atau 48,32 persen dari TA 2015 yang disebabkan karena :

- Tidak adanya pencatatan akrual atas tunjangan kinerja dan uang makan pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Utama seperti halnya di TA 2015, dikarenakan tunjangan kinerja dan uang makan yang menjadi hak pegawai pada bulan Desember 2016 sudah dibayarkan pada bulan itu juga. Pencatatan akrual atas tunjangan kinerja dan uang makan pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, memiliki kontribusi prosentase yang cukup besar dalam pergerakan akun utang kepada pihak ketiga BKKBN;
- Telah dilunasinya jurnal akrual atas belanja barang yang masih harus dibayar kepada Universitas Terbuka sebesar Rp.626.400.000,00 pada tanggal 25 Oktober 2016 berdasarkan SP2D Nomor 161391301038709 yang merupakan Tagihan beasiswa Semester I TA 2015 pegawai BKKBN yang baru disampaikan oleh Universitas Terbuka pada 11 Februari 2016 kepada Satuan Kerja Kedeputian Bidang Pelatihan dan Pengembangan. Pencatatan jurnal akrual ini sesuai dengan rekomendasi hasil audit BPK RI terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan BKKBN TA 2015

Adapun rincian Utang pada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2016 dari hasil koreksi BPK RI adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Satker	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Belanja barang yang masih harus dibayar	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Satker
		(212111)	(212112)	(212191)	
1	Sekretariat Utama	-	308.018.256,00	-	308.018.256,00
2	Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Tengah	5.043.075,00	58.388.155,00	-	63.431.230,00
3	Perwakilan BKKBN Prov. DIY	-	-	375.023.660,00	375.023.660,00
4	Perwakilan BKKBN Prov. Jambi	304.819.373,00	14.647.893,00	-	319.467.266,00
5	Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Selatan	-	1.972.899,00	-	1.972.899,00
6	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Timur	258.777.833,00	2.336.957,00	-	261.114.790,00
7	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan	259.791.856,00	14.784.662,00	-	274.576.518,00
8	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Selatan	-	24.194.226,00	-	24.194.226,00
9	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Tenggara	244.766.162,00	1.673.000,00	-	246.439.162,00
10	Perwakilan BKKBN Prov. NTB	157.110,00	84.700,00	-	241.810,00
11	Perwakilan BKKBN Prov. Bengkulu	5.331.719,00	57.500,00	-	5.389.219,00
12	Perwakilan BKKBN Prov. Banten	-	12.422.514,00	205.958.375,00	218.380.889,00
13	Perwakilan BKKBN Prov. Kepulauan Riau	-	26.261.576,00	-	26.261.576,00
14	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Barat	659.480,00	8.273.835,00	-	8.933.315,00
15	Perwakilan BKKBN Prov. Maluku Utara	-	28.843.000,00	-	28.843.000,00
16	Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo	185.634.250,00	21.946.922,00	-	207.581.172,00
17	Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Utara	372.444.332,00	23.908.963,00	-	396.353.295,00
18	Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah	16.429.365,00	-	-	16.429.365,00
19	Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara	-	10.716.218,00	-	10.716.218,00
	<b>Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun</b>	<b>1.653.854.555,00</b>	<b>558.531.276,00</b>	<b>580.982.035,00</b>	<b>2.793.367.866,00</b>

### C.23 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.236.692.117,00 dan Rp.421.393.050,00. Pendapatan Diterima Dimuka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Per 31 Desember 2016 merupakan :

- a. Berdasarkan saldo awal Neraca 1 Januari 2016 pada Satuan Kerja 017326 tercatat akun pendapatan sewa diterima dimuka Bank BNI sebesar Rp.45.474.333,00 dan sesuai dengan periode masa sewa mulai dari 05-05-2013 sd. 04-05-2016, maka pada TA 2016 saldo awal atas akun tersebut diatas telah jatuh tempo dan telah diakui sebagai Pendapatan Sewa pada TA 2016 sebesar Rp.45.474.333,00.
- b. Sekretariat Utama (017326)  
Sewa Kantor dan ATM Bank BRI pada BKKBN Pusat yang dikelola melalui Biro Umum Satker 017326 memiliki periode/masa sewa selama 36 bulan yang terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2015 sd. 01 Agustus 2018 senilai Rp.395.179.800,00 yang dibayarkan dimuka dan sudah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN No.0401151407050505 tanggal 07-12-2015. Sewa Kantor dan ATM Bank BRI ini dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.  
Berdasarkan saldo awal Neraca 1 Januari 2016 pada Satuan Kerja 017326 tercatat akun pendapatan sewa diterima dimuka Bank BRI sebesar Rp.340.293.717.000,00, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 telah dilakukan penyesuaian atas pendapatan sewa yang diakui pada periode berjalan yaitu sebesar Rp.131.726.600,00 ( $12/36 \times \text{Rp.395.179.800,00}$ ), sehingga pada saldo akhir Neraca per 31 Desember 2016 tercatat pendapatan sewa diterima dimuka menjadi sebesar Rp.208.567.117,00;
- c. Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Tengah (433051)  
Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Lokasi ATM antara Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palu Nomor B.5674/KC.-XII/LOG/09/2015 tanggal 28 September 2015 terjadi kesepakatan bahwa Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Tengah (433051) setuju/bersedia untuk menyewakan lokasi/tempat bagi pembangunan ATM Bank BRI dengan periode sewa selama 5 tahun (60 bulan) terhitung mulai tanggal 28-09-2015 s.d 27-09-2020. Jumlah sewa yang disepakati dalam perjanjian adalah senilai Rp.41.250.000,00 termasuk PPN 10% sebesar Rp.3.750.000,00 sehingga Pendapatan Bersih atas Sewa Lokasi ATM adalah sebesar Rp.37.500.000,00 yang sudah disetorkan ke Kas Negara dengan

NTPN No. 0604050501151401 tanggal 30 Oktober 2015. Sewa lokasi ATM Bank BRI ini dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.

Berdasarkan saldo awal Neraca 1 Januari 2016 pada Satuan Kerja 433051 tercatat akun pendapatan sewa ATM Bank BRI diterima dimuka sebesar Rp.35.625.000,00, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 telah dilakukan penyesuaian atas Pendapatan Sewa yang diakui pada periode berjalan yaitu sebesar Rp.7.500.000,00 ( $12/60 \times \text{Rp.}37.500.000,00$ ), sehingga pada saldo akhir Neraca per 31 Desember 2016 tercatat pendapatan sewa diterima dimuka menjadi sebesar Rp.28.125.000,00.

#### Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka TA 2016:

Kode Satker	Uraian Satker	per 31-12-2015	Mutasi		per 31-12-2016
			Tambah	Kurang	
017326	Sekretariat Utama	385,768,050.00	-	(177,200,933.00)	208,567,117.00
433051	BKKBN Prop. Sulteng	35,625,000.00	-	7,500,000.00	28,125,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>421,393,050.00</b>	<b>-</b>	<b>(169,700,933.00)</b>	<b>236,692,117.00</b>

Uang Muka Dari KPPN  
Rp.1.058.400.673,00

#### C.24 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka Dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.1.058.400.673,00 dan Rp.4.231.553.016,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan dan sebagai penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Ekuitas  
Rp.1.747.911.159.450,  
00

#### C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.1.747.911.159.450,00 dan Rp.1.419.302.308.647,00 .

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan  
Operasional PNBP  
Rp.408.601.513,00

### D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.408.601.513,00 dan Rp.2.284.303.606,00 dengan rincian sebagai berikut :

#### *Perbandingan Rincian Pendapatan TA 31 Desember 2016 dan TA 31 Desember 2015*

URAIAN	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun)	
			Rp.	%
<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>				
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	310,809,992.00	407,661,613.00	(96,851,621.00)	(23.76)
Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	-	1,147,768.00	(1,147,768.00)	(100.00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5,844,719.00	2,691,759.00	3,152,960.00	117.13
Pendapatan Bunga Lainnya	-	1,420,403.00	(1,420,403.00)	(100.00)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	85,917,181.00	290,038,614.00	(204,121,433.00)	(70.38)
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	25,900.00	(25,900.00)	(100.00)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	439,812.00	-	439,812.00	∞
Pendapatan Anggaran Lain-lain	5,589,809.00	1,581,317,549.00	(1,575,727,740.00)	(99.65)
<b>Jumlah</b>	<b>408,601,513.00</b>	<b>2,284,303,606.00</b>	<b>(1,875,702,093.00)</b>	<b>(459.05)</b>

Beban Pegawai  
Rp.388.355.673.395,  
00

## D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.388.355.673.395,00 dan Rp.337.960.084.202,00.

Kode Akun	Uraian	Beban Operasional Pegawai TA 2016	Beban Operasional Pegawai TA 2015	Naik (Turun) %
511111	Beban gaji Pokok PNS	162.543.383.179,00	151.693.958.945,00	7,15
511119	Beban Pembulatan gaji PNS	2.198.956,00	3.130.639,00	-29,76
511121	Beban Tunj Suami/Istri PNS	10.715.114.717,00	10.718.581.701,00	-0,03
511122	Beban Tunj Anak PNS	2.671.232.356,00	2.714.482.663,00	-1,59
511123	Beban Tunj Struktural PNS	12.260.155.000,00	12.410.926.500,00	-1,21
511124	Beban Tunj Fungsional PNS	3.274.496.364,00	3.520.706.031,00	-6,99
511125	Beban Tunj PPh PNS	2.918.190.455,00	4.313.124.016,00	-32,34
511126	Beban Tunj Beras PNS	7.670.491.730,00	7.912.985.030,00	-3,06
511129	Beban Uang Makan PNS	18.407.799.500,00	20.268.010.690,00	-9,18
511138	Beban Tunj Khusus Papua PNS	575.375.000,00	568.825.000,00	1,15
511147	Beban Tunj Lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	0,00	55.344.000,00	-100,00
511151	Beban Tunj Umum PNS	4.611.635.000,00	4.701.595.000,00	-1,91
511192	Beban Tunj Lain-lain termasuk Uang Duka PNS TNI/Polri	0,00	23.357.700,00	-100,00
511512	Beban Tunj Pegawai Non PNS	0,00	40.150.000,00	-100,00
511519	Beban Tunj Lainnya Non PNS	71.500.000,00	-	∞
512211	Beban Uang lembur	179.756.800,00	154.896.000,00	16,05
512411	Beban Pegawai (Tunj Khusus/Kegiatan)	163.001.818.097,00	119.584.939.300,00	36,31
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>388.903.147.154,00</b>	<b>338.685.013.215,00</b>	<b>14,83</b>
	<i>Pengembalian Beban Pegawai</i>	<i>(547.473.759,00)</i>	<i>(724.929.013,00)</i>	<i>-24,48</i>
	<b>Jumlah Beban Operasional Pegawai (Net)</b>	<b>388.355.673.395,00</b>	<b>337.960.084.202,00</b>	<b>14,91</b>

### D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.22.648.328.417,00 dan Rp. 59.342.592.630,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp.36.934.627.963,00 atau sebesar 62,24 persen yang disebabkan karena pada TA 2016 terdapat penurunan pada pemakaian persediaan konsumsi sebesar Rp.37.203.302.078,00 serta tidak adanya beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.

Kode Akun	Uraian Akun	Beban Operasional Persediaan TA 2016	Beban Operasional Persediaan TA 2015	Naik (Turun) %
593111	Beban Persediaan Konsumsi	22.141.538.153,00	59.104.476.481,00	-62,54
593121	Beban Persediaan Pita, Cukai, Materai dan Leges	1.177.000,00	1.313.000,00	-10,36
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	113.300.050,00	50.710.750,00	123,42
593141	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	44.955.000,00	-100,00
593149	Beban Persediaan Lainnya	392.313.214,00	141.137.399,00	177,97
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>22.648.328.417,00</b>	<b>59.342.592.630</b>	<b>-61,83</b>
	<i>Pengembalian Beban Persediaan</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Beban Operasional Persediaan (Net)</b>	<b>22.648.328.417,00</b>	<b>59.342.592.630</b>	<b>-61,83</b>

Beban Persediaan Bahan Baku BKKBN per 31 Desember 2016 dijelaskan sebagai berikut :

- BKKBN Prop. Sumsel (Satker 018403) sebesar Rp. 851.000,00 merupakan pemakaian barang habis pakai bahan lainnya berupa kanvas rem, sabut cuci piring, pewangi AC dan pewangi mobil;
- BKKBN Prop. Bengkulu (Satker 433102) sebesar Rp. 32.462.140,00 merupakan pemakaian barang habis pakai bahan lainnya berupa keperluan kantor sehari-hari;
- BKKBN Prop. Papua (Satker 433082) sebesar Rp. 7.715.000,00 merupakan pemakaian barang habis pakai bahan lainnya berupa pelumas dan cat tembok;
- BKKBN Prop. Kaltim (Satker 433042) sebesar Rp. 57.061.074,00 merupakan pemakaian barang habis pakai bahan yang salah menggunakan kodefikasi tabel barang berupa umbul-umbul, plakat KB, asam mefenamat, handscoon dan bahan-bahan klinik lainnya;
- BKKBN Prop. Aceh (Satker 018377) sebesar Rp. 4.829.036,00

merupakan pemakaian barang habis pakai bahan bakar minyak (bensin dan solar) untuk generator;

- f. Sekretariat Utama (Satker 017326) sebesar Rp. 356.800,00 merupakan pemakaian barang habis pakai bahan lainnya berupa masker;
- g. BKKBN Prop. Malut (Satker 631631) sebesar Rp. 6.945.000,00 merupakan pemakaian barang habis pakai bahan lainnya berupa cat tembok, tiner, triplek, paku, grendel pintu, cook kunci, pisau potong rumput, bensin, papan dan kayu
- h. Inspektorat Utama (Satker 649530) sebesar Rp. 3.080.000,00 merupakan pemakaian barang habis pakai bahan lainnya berupa buku juknis Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Beban Barang dan Jasa **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jasa

Rp.798.821.573.582,  
00

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.798.821.573.582,00 dan Rp.1.160.505.887.346,00.

Kode Akun	Uraian Akun	Beban Operasional Barang dan Jasa TA 2016	Beban Operasional Barang dan Jasa TA 2015	Naik (Turun) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	26.158.222.036,00	16.397.019.183,00	59,53
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	204.980.400,00	177.040.000,00	15,78
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	466.719.601,00	698.764.536,00	-33,21
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	8.632.106.593,00	8.426.116.821,00	2,44
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	17.760.383.281,00	10.348.441.785,00	71,62
521211	Beban Bahan	127.377.591.286,00	171.953.282.668,00	-25,92
521213	Beban Honor Output Kegiatan	15.768.551.750,00	52.239.919.825,00	-69,82
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	431.357.525.723,00	693.294.711.343,00	-37,78
522111	Beban Langganan Listrik	9.833.524.942,00	10.429.217.691,00	-5,71
522112	Beban Langganan Telepon	1.368.944.993,00	1.592.429.926,00	-14,03
522113	Beban Langganan Air	768.059.089,00	752.701.051,00	2,04
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.703.980.876,00	1.789.328.903,00	-4,77
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	160.743.200,00	31.952.470,00	403,07
522131	Beban Jasa Konsultan	1.714.537.200,00	2.847.669.750,00	-39,79
522141	Beban Sewa	25.837.208.019,00	33.265.958.235,00	-22,33
522151	Beban Jasa Profesi	41.773.107.100,00	59.383.028.199,00	-29,65
522191	Beban Jasa Lainnya	88.564.292.953,00	97.864.975.338,00	-9,50
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	66.508.320,00	120.091.587,00	-44,62
595113	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	11.330.000,00	7.095.150,00	59,69
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>799.528.317.362,00</b>	<b>1.161.619.744.461,00</b>	<b>-31,17</b>
	<i>Pengembalian Beban Barang dan Jasa</i>	<i>(706.743.780,00)</i>	<i>(1.113.857.115,00)</i>	<b>-36,55</b>
	<b>Jumlah Beban Operasional Barang dan Jasa (Net)</b>	<b>798.821.573.582,00</b>	<b>1.160.505.887.346,00</b>	<b>-31,17</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp.  
28.400.584.090,00

## D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.28.400.584.090,00 dan Rp.26.791.245.958,00.

Kode Akun	Uraian Akun	Beban Pemeliharaan TA 2016	Beban Pemeliharaan TA 2015	Naik (Turun) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.375.066.532,00	10.331.313.476,00	10,10
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	575.287.128,00	946.647.880,00	-39,23
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.491.624.141,00	9.608.380.661,00	9,19
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	124.499.600,00	154.692.296,00	-19,52
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.639.567.968,00	5.030.606.859,00	-7,77
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	593.006.200,00	568.879.000,00	4,24
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	23.760.000,00	-	∞
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	438.080.775,00	172.833.200,00	153,47
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	140.903.200,00	430.000,00	32668,19
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>28.401.795.544,00</b>	<b>26.813.783.372,00</b>	<b>5,92</b>
	<i>Pengembalian Beban Pemeliharaan</i>	<i>(1.211.454,00)</i>	<i>(22.537.414,00)</i>	<i>-94,62</i>
	<b>Jumlah Beban Operasional Pemeliharaan (Net)</b>	<b>28.400.584.090,00</b>	<b>26.791.245.958,00</b>	<b>6,01</b>

Beban Perjalanan  
Dinas Rp.  
372.365.494.976,0  
0

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.372.365.494.976,00 dan Rp.321.650.076.277,00.

Kode Akun	Uraian	Beban Perjalanan Dinas TA 2016	Beban Perjalanan Dinas TA 2015	Naik (Turun) %
524111	Beban Perjalanan Biasa	166.041.715.108,00	141.738.858.321,00	17,15
524112	Beban Perjalanan Tetap	3.673.790.000,00	1.298.925.000,00	182,83
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.045.279.490,00	17.346.370.227,00	61,68
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	98.829.279.541,00	101.584.613.519,00	-2,71
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75.127.117.465,00	60.681.043.476,00	23,81
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.034.874.135,00	1.699.702.564,00	78,55
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>374.752.055.739,00</b>	<b>324.349.513.107,00</b>	<b>15,54</b>
	<i>Pengembalian Beban Perjalanan Dinas</i>	<i>(2.386.560.763,00)</i>	<i>(2.699.436.830,00)</i>	-11,59
	<b>Jumlah Beban Operasional Perjalanan Dinas (Net)</b>	<b>372.365.494.976,00</b>	<b>321.650.076.277,00</b>	<b>15,77</b>

Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat Rp.  
598.907.587.371,0  
0

## D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.598.907.587.371,00 dan Rp. 473.777.720.563,00.

Kode Akun	Uraian	Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat TA 2016	Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat TA 2015	Naik (Turun) %
526111	Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	5.500.000,00	-	∞
526112	Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.116.093.159,00	1.940.761.818,00	60,56
526115	Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	84.823.500,00	(100,00)
526311	Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	595.785.994.212,00	471.752.135.245,00	26,29
	<b>Jumlah Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat (Bruto)</b>	<b>598.907.587.371,00</b>	<b>473.777.720.563,00</b>	<b>26,41</b>
	<i>Pengembalian Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<b>Jumlah Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat (Net)</b>	<b>598.907.587.371,00</b>	<b>473.777.720.563,00</b>	<b>26,41</b>

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp.48.359.079.658  
,00  
00

## D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.48.359.079.658,00 dan Rp.46.903.784.700,00.

Kode Akun	Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016	Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2015	Naik (Turun) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.685.731.943,00	36.499.736.294,00	-7,71
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.540.130.033,00	8.522.129.704,00	-11,52
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	196.081.533,00	150.659.621,00	30,15
591312	Beban Penyusutan Irigasi	103.361.490,00	69.495.434,00	48,73
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.576.095.410,00	1.565.987.542,00	0,65
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.585.625,00	4.762.500,00	38,28
592115	Beban Amortisasi Software	3.242.286.683,00	0,00	∞
592116	Beban Amortisasi Lisensi	1.541.327.306,00	0,00	∞
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	265.632.008,00	0,00	∞
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	201.847.627,00	91.013.605,00	121,78
	<b>Jumlah Beban Operasional Penyusutan dan Amortisasi (Net)</b>	<b>48.359.079.658,00</b>	<b>46.903.784.700,00</b>	<b>3,10</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp.2.548.956,00

## D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.548.956,00 dan (Rp.3.761.305,00).

Kode Akun	Uraian	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2015	Naik (Turun) %
594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	2,838,977.00	-	∞
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0.00	250,304.00	-100.00
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	(290,021.00)	(4,011,609.00)	-92.77
	<b>Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>2,548,956.00</b>	<b>(3,761,305.00)</b>	<b>-167.77</b>

Kegiatan Non  
Operasional Surplus  
Rp.12.926.870.851,  
00  
00

## D.11. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

### Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Desember TA 2016 dan TA 31 Desember 2015

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun) %
<b>Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar</b>			
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar :</b>	<b>804.843.178,00</b>	<b>362.206.000,00</b>	<b>122,21</b>
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	122.050.000,00	97.326.000,00	25,40
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	682.793.178,00	264.880.000,00	157,77
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(136.202.537,00)</b>	<b>(907.635.890,00)</b>	<b>(84,99)</b>
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(136.202.537,00)	(907.635.890,00)	(84,99)
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>668.640.641,00</b>	<b>(545.429.890,00)</b>	<b>(222,59)</b>
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>48.926.124.471,00</b>	<b>5.847.998.566,00</b>	<b>736,63</b>
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	398.442.500,00	0,00	∞
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	373.171.788,00	1.173.415.470,00	(68,20)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	116.403.026,00	757.702.144,00	(84,64)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.188.883.039,00	3.652.834.485,00	(40,08)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	352.350.197,00	68.269.106,00	416,12
Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	-	(5.673.872,00)	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	72.134.960,00	0,00	∞
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	-	71.111.233,00	(100,00)
Pendapatan Sitaan/Rampasan	-	114.000.000,00	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	16.340.000,00	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	45.424.738.961,00	0,00	∞
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>(36.694.975.511,00)</b>	<b>(93.491.239,00)</b>	<b>39.149,64</b>
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(4.855.026.605,00)	(93.491.239,00)	5.093,03
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(31.839.948.906,00)	0,00	∞
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>12.231.148.960,00</b>	<b>5.754.507.327,00</b>	<b>112,55</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>12.899.789.601,00</b>	<b>5.209.077.437,00</b>	<b>147,64</b>

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas Awal Rp.  
1.419.302.308.647,0  
0

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal periode Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.1.419.302.308.647,00 dan Rp.1.169.339.201.202,00.

Defisit LO Rp.  
2.244.552.479.331,0  
0

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah defisit sebesar Rp.2.244.552.479.331,00 dan Rp.2.419.434.249.328,00.

Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.0,00

### E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah surplus sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Koreksi yang  
menambah/  
mengurangi Ekuitas  
(Rp.  
8.837.427.287,00)

### E.4 Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah koreksi kurang sebesar Rp. 8.837.427.287,00 dan koreksi tambah sebesar Rp.13.957.863.176,00. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan terdiri Koreksi akibat dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi akibat Selisih Revaluasi Tetap, Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain.

Penyesuaian Nilai  
Aset (Rp. 0,00)

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.0,00 dan sebesar Rp.11.979.353.967,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp7.580.777.221,00

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah koreksi tambah

sebesar Rp.7.580.777.221,00 dan Rp.67.552.323,00. Rincian koreksi nilai persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut.

#### Rincian Koreksi Persediaan TA 2016

No.	Uraian Persediaan	Koreksi
117111	Barang Konsumsi	2.153.750,00
117124	Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan ke Masyarakat	1.375.000,00
117128	Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan ke Masyarakat	4.485.102.610,00
117911	Persediaan yang Belum Diregister	3.092.145.861,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.580.777.221,00</b>

Koreksi nilai persediaan terbesar BKKBN per 31 Desember 2016 terdapat pada akun barang persediaan lainnya untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp.4.485.102.610,00 yang diakibatkan karena adanya barang persediaan yang berasal dari pengadaan TA 2015 namun baru dicatat pada TA 2016 melalui menu saldo awal;

Koreksi nilai persediaan pada akun persediaan yang belum diregister terdapat nilai koreksi sebesar Rp. 3.092.145.861,- yang terdiri dari :

- a. Rp.2.862.624.000,00 dimana nilai tersebut muncul akibat adanya pengadaan barang alokon berupa kondom pada satuan kerja KBKR (649505) yang sudah terdistribusi 100% ke daerah dan secara keseluruhan barang sudah tercatat dalam BAST TA 2016, sehingga keseluruhan barang telah dapat dicatat dalam Aplikasi Persediaan.

Namun karena terdapat barang yang tidak memenuhi syarat, maka satker tidak dapat memenuhi pembayaran 100% (saat ini transaksi pembayaran yang sudah dilakukan oleh satker kepada penyedia baru sebesar 78%). Barang yang tidak memenuhi syarat sedang dalam proses penarikan kembali oleh penyedia dari gudang BKKBN, sehingga untuk barang yang belum terbayarkan telah dilakukan koreksi nilai persediaan akun persediaan belum deregister pada Aplikasi SAIBA;

- b. Rp.226.904.842,00 dimana nilai tersebut adalah lebih catat di Aplikasi persediaan karena adanya double input.

*Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0,00* **E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp.16.616.187.608,00)* **E.4.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Jumlah koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah koreksi kurang sebesar Rp.16.616.187.608,00 dan koreksi tambah Rp.1.914.656.886,00.

Koreksi nilai aset non revaluasi per 31 Desember 2016 terdiri dari koreksi tambah akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp.1.237.379.728,00 dan koreksi kurang akun Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp.17.857.436.754,00.

*Koreksi Atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.197.983.100,00* **E.4.5 Lain-lain**

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.197.983.100,00 dan koreksi kurang Rp.3.700.000,00.

*Transaksi Antar Entitas Rp. 2.581.998.757.421,00* **E.5 Transaksi Antar Entitas**

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.581.998.757.421,00 dan Rp.2.655.439.493.597,00.

*Ditagihkan ke Entitas Lain Rp. 2.595.038.317.330,00* **E.5.1 Ditagihkan ke Entitas Lain**

Akun Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.595.038.317.330,00 dan Rp.2.598.683.878.980,00. Akun ini mencerminkan Arus Kas Keluar dari Kas Negara melalui pencairan SPM/SP2D kepada Entitas Lain.

*Diterima dari Entitas Lain Rp. 43.998.599.312,00* **E.5.2 Diterima dari Entitas Lain**

Akun Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.43.998.599.312,00 dan Rp.7.299.209.494,00. Akun ini mencerminkan Arus Kas Masuk ke Kas Negara melalui setoran pendapatan maupun setoran pengembalian belanja dari Entitas Lain.

Transfer Keluar Rp.  
1.114.780.775.657,0  
0

### **E.5.3 Transfer Keluar**

Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.1.114.780.775.657,00 dan Rp.623.790.641.850,00. Akun ini mencerminkan adanya transfer keluar aset tetap maupun persediaan dari satu entitas ke entitas lainnya dalam satu lingkungan kementerian/lembaga.

Transfer Masuk Rp.  
1.120.446.551.343,0  
0

### **E.5.4 Transfer Masuk**

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.1.120.446.551.343,00 dan Rp.662.151.224.320,00. Akun ini mencerminkan adanya transfer masuk aset tetap maupun persediaan yang diterima oleh satu entitas dari entitas lainnya dalam satu lingkungan kementerian/lembaga.

Pengesahan Hibah  
Langsung Rp.  
25.283.889.917,00

### **E.5.5 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.26.283.889.917,00 dan Rp.25.694.241.641,00. Selama periode Tahun Anggaran 2016 BKKBN menerima hibah langsung luar negeri dan hibah langsung dalam negeri baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang (Aset Tetap). Akun pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang selama periode tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Satker Kedeputan KBKR (649505)  
Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 161400000000066 tanggal 31 Desember 2016 tercatat akun pengesahan hibah langsung sebesar Rp. Rp.2.451.723.999,00.
2. Satker Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat (017393)
  - Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 160950000000006 tanggal 02 September 2016 tercatat akun pengesahan hibah langsung sebesar Rp.13.799.984.000,00;
  - Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 160950500340001 tanggal 31 Desember 2016 tercatat akun pengesahan hibah langsung sebesar Rp.8.412.129.800,00;
  - Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Nomor 160950500340002 tanggal 31 Desember 2016 tercatat akun

pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp. 987.886.200,00.

3. Satker Perwakilan BKKBN Prop. Banten (631610)

- Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 160200500390001 tercatat akun pengesahan hibah langsung sebesar Rp.383.900.000,00;
- Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 160200500390002 tercatat akun pengesahan hibah langsung sebesar Rp.78.010.000,00;
- Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 160200500390003 tercatat akun pengesahan hibah langsung sebesar Rp.35.350.000,00;
- Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Nomor **150200500330005** tercatat akun pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp.2.740.000,00.

*Kenaikan/Penurunan  
Ekuitas Rp.  
325.888.353.215,00*

#### **E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas**

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah defisit sebesar Rp.325.888.353.215,00 dan Rp.249.963.107.445,00. Kenaikan/penurunan Ekuitas BKKBN merupakan hasil akumulasi Defisit LO sebesar Rp.2.244.285.034.311,00, Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp.16.616.187.608,00 serta Transaksi Antar Ekuitas sebesar Rp.2.579.594.122.778,00.

*Ekuitas Akhir Rp.  
1.745.190.661.862,  
00*

#### **E.7 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir BKKBN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.1.745.190.661.862,00 dan Rp.1.419.302.308.647,00.

## F.1 Tindak lanjut konsep temuan BPK terhadap Laporan Keuangan TA. 2016

### F.1.1 Konsep Temuan BPK Tahap 1 nomor 3 : Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan BKKBN oleh PT. BNI Belum Diterima oleh Negara Minimal Sebesar Rp. 409.269.000,00

- Setelah periode sewa berakhir (5 Mei 2016) sampai dengan saat pemeriksaan, PT BNI masih menempati gedung dan bangunan BKKBN dan belum melakukan pembayaran sewa dikarenakan : 1) Perpanjangan sewa terkendala lamanya proses di KPKNL; 2) Ijin penetapan perpanjangan sewa dari Kementerian Keuangan baru terbit 22 Februari 2017
- Pendapatan yang masih harus diterima dicatat BKKBN per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.90.948.666,00. Pendapatan ini muncul sebagai akibat dari jatuh tempo masa sewa Bank BNI yang telah berakhir sejak tanggal 04 Mei 2016 dan seharusnya sudah dilakukan perpanjangan masa sewa. Nilai sewa yang harus diterima Negara yaitu sebesar Rp. 409.269.000,00 seperti yang tertuang di dalam konsep temuan tahap 1 nomor 3 merupakan harga sewa untuk jangka waktu 3 tahun.
- Sesuai dengan prinsip basis akrual BKKBN mengakui adanya pendapatan yang masih harus diterima, terhitung sejak 04 Mei 2016 sd. 31 Desember 2016 (8 bulan) dengan dasar perhitungan nilai rata-rata per bulan atas pendapatan diterima dimuka dari sewa kantor dan ATM Bank BNI periode sebelumnya yaitu  $Rp.11.368.583,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp.90.948.666,00$ . Namun pencatatan akrual ini tidak tercatat pada Neraca Laporan Keuangan Unaudited BKKBN TA 2016 dan sesuai rekomendasi BPK akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Audited BKKBN TA 2016.
- PT. BNI telah melakukan penyesuaian pembayaran sewa selama 1 tahun untuk periode tanggal 5 Mei 2016 – 4 Mei 2017 yaitu sebesar Rp. 136.423.000,00 dan telah menyetorkan ke kas Negara dengan NTPN nomor : 164956MLL4ED3BGP tanggal 17 April 2017.

- Pada tanggal 22 Februari 2017 melalui surat No. S-20/MK.6/WKN.07/KNL.01/2017, Menteri Keuangan memberikan persetujuan sewa BMN kepada PT. BNI untuk jangka waktu tiga tahun dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.019.994.000,00. Berdasarkan persetujuan sewa tersebut, BKKBN diminta untuk segera menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan selambatnya satu bulan sejak tanggal persetujuan tersebut. Pembayaran sewa untuk periode Mei 2017 s.d Februari 2020 dan kekurangan bulan Februari s.d Mei 2017 akan dibayarkan setelah perjanjian sewa antara BKKBN dengan PT BNI ditandatangani. Penetapan nilai sewa dari Kemenkeu dijadikan sebagai dasar penghitungan sewa pada periode 3 tahun berikutnya.
- Agar menjadi kepastian hukum atas nilai sewa periode-periode tersebut telah dibuatkan draft surat perjanjian sewa antara BKKBN dengan PT.BNI.

**F.1.2 Konsep Temuan BPK Tahap 1 nomor 6 poin c : Terdapat Tagihan Biaya Penggerakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang Belum Dibayarkan s.d 31 Desember 2016 Berpotensi Menjadi Utang Sebesar Rp. 1.233.090.000,00**

- Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menjelaskan melalui surat kepada Sestama Nomor : 168/KB.001/J3/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Kronologis Penundaan Pembiayaan Penggerakan Pelayanan KB MKJP dengan permasalahan inti yaitu ; (1) Anggaran awal kegiatan penggerakan dan pemantapan pelayanan KB baru MKJP sebesar Rp. 30.026.000.000,00, selanjutnya dilakukan revisi pengurangan anggaran akibat kebijakan *self blocking* menjadi Rp. 11.417.100.000,00. Meskipun anggaran berkurang namun target output peserta KB baru MKJP tahun 2016 sebanyak 199.510 tidak dikurangi; (2) Dikarenakan tagihan klaim biaya penggerakan menumpuk di bulan Desember 2016 menjadikan masih ada sebesar Rp. 1.233.090.000,00 tidak dapat dibayarkan s.d 31 Desember 2016

- Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Kanwil Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur dan merekomendasikan agar dilaksanakan pemeriksaan oleh APIP terlebih dahulu sebelum penundaan pembayaran tersebut dibayarkan.
- Inspektorat Utama (APIP) telah melakukan verifikasi secara sampel (30%) atas tagihan biaya penggerakan sebesar Rp 1.233.090.000,00 di Jawa Timur. Laporan verifikasi tersebut masih dalam proses.
- Telah disepakati pada saat Rekonsiliasi Tiga Pihak Lanjutan tanggal 17 April 2017 bahwa tagihan biaya penggerakan sebesar Rp 1.233.090.000,00 tidak dicatat sebagai Utang kepada Pihak Ketiga di Neraca dikarenakan dokumen sumber sebagai dasar penetapan utang tersebut belum diperoleh. Oleh karena itu cukup diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audited BKKBN TA 2016.

**F.1.3. Konsep Temuan BPK Tahap 1.2.2 : Penatausahaan Transfer Masuk dan Transfer Keluar Persediaan Belum Memadai dan Terdapat Transfer Masuk BMN Kurang Saji Sebesar Rp 92.780.000,- dan Lebih Saji Sebesar Rp 30.255.000,-**

- Selisih transfer keluar dan transfer masuk atas laporan keuangan BKKBN Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan Pemetaan, Pengklasifikasian, serta Analisis terhadap penyebab selisih transfer keluar dan transfer masuk dan telah dituangkan ke dalam matriks klasifikasi selisih transfer keluar dan transfer masuk;
- Dari beberapa penjelasan atau klasifikasi yang ada di dalam matriks tersebut telah disepakati bersama dengan BPK dan Kementerian Keuangan bahwa hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya selisih transfer keluar dan transfer masuk tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap Neraca BKKBN terutama Akun Persediaan, namun cukup dilakukan pengungkapan dan penjelasan secara memadai ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaK) BKKBN TA 2016 Audited dimana sesuai dengan PSAP bahwa CaK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BKKBN;

- Beberapa klasifikasi yang menyebabkan terjadinya selisih transfer keluar dan transfer masuk antara lain
  - a. perbedaan harga satuan;
  - b. perbedaan kuantitas;
  - c. perbedaan harga satuan dan kuantitas;
  - d. transfer keluar masuk yang melewati periode tahun anggaran; serta
  - e. transfer masuk barang tanpa didahului transfer keluar dari satker pemberi;
  - f. transfer keluar barang tanpa diikuti dengan transfer masuk pada satker penerima;
- Selisih transfer keluar dan masuk tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp 3.007.103.250,- (3 Miliar) jauh lebih kecil dari selisih transfer keluar dan masuk pada tahun anggaran 2015 yang mencapai 38 Miliar. Hal ini disebabkan karena BKKBN telah berusaha untuk meminimalisir terjadinya penyebab dan kesalahan yang menjadikan selisih transfer keluar masuk menjadi besar, melalui pendampingan terhadap satuan kerja yang paling dominan dalam melakukan transfer keluar;
- Dari selisih sebesar Rp 3 Miliar tersebut terdapat persediaan milik satker KBKR yang telah dikoreksi ke dalam neraca BKKBN sebesar Rp 2 miliar yang disebabkan karena terdapat kondisi dimana satker KBKR mengalami kurang dan lebih saji akun transfer keluar dan masuk ke beberapa satuan kerja dengan rincian :
  - a) Satker Sestama senilai Rp 1.947.993.278 lebih transfer keluar;
  - b) Satker BKKBN Kaltim senilai Rp 87.798.810 lebih transfer keluar;
  - c) Satker BKKBN Sumbar senilai Rp 192.633.210 lebih transfer keluar;
  - d) Satker BKKBN Lampung senilai Rp 192.633.210 kurang transfer keluar.

- Kondisi lebih dan kurang saji pada satker KBKR diperoleh dari hasil uji kebenaran atas input akun transfer keluar dan masuk yang dibandingkan dengan dokumen sumber, serta konfirmasi fisik melalui surat Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN nomor 733/KU-702/B3/2017 tentang Konfirmasi Persediaan melewati Tahun Anggaran. Kondisi pada satker KBKR tersebut termasuk ke dalam kondisi transfer keluar yang melewati tahun anggaran.

## F.2 Pengungkapan Lain-lain

### F.2.1 Pencairan Jaminan Pelaksanaan Wanprestasi Pekerjaan Pengembangan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKBPK Tahun Anggaran 2015 diselesaikan di TA 2017.

- Satuan Kerja 017326 pada Tahun Anggaran 2015 telah melakukan Pekerjaan Pengembangan Gedung Pusdiklat KKBPK melalui Penyedia yang dipilih secara lelang terbuka melalui LPSE BKKBN.
- Pada saat mendekati jangka waktu berakhirnya pekerjaan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) BKKBN melakukan telaah pelaksanaan pekerjaan pembangunan sesuai perjanjian kontrak tanpa addendum/amandemen hanya mencapai 29,90% pekerjaan, sehingga hasil telaah menyatakan bahwa pembangunan diklat tidak dapat dilanjutkan;
- Bulan Desember 2015 Penyedia mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Melalui surat Nomor 3452/TU.301/B5/2015, PPK BKKBN mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak dan kemudian melaporkan kepada KPA melalui Surat Pemberitahuan Nomor 3453/TU.301/B5/2015 sekaligus menolak permohonan perpanjangan waktu dari penyedia dengan berdasarkan pada dokumen kontrak pengadaan.
- Untuk mengetahui kemajuan pekerjaan yang sebenarnya dan membandingkan dengan laporan hasil opname fisik oleh Konsultan Pengawas, PPK telah bersurat kepada BPKP Nomor 3505/TU.301/B5/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Permohonan Audit Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Gedung Pusdiklat KKBPK Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan konsultasi dengan BPKP bahwa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan

perubahannya, apabila terjadi pemutusan kontrak maka Jaminan Pelaksanaan harus dicairkan ke Kas Negara.

- Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan ke Kas Negara sebesar Rp.302.923.300,00 telah diajukan oleh PPK BKKBN ke Kepala Divisi Marketing Pihak Penjamin Penyedia melalui Surat Nomor : 239/TU.301/B5/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Penjamin mensyaratkan beberapa hal dalam pencairan jaminan pelaksanaan tersebut, antara lain <sup>a)</sup> Progress pekerjaan yang ditandatangani bersama oleh Principal dan Obligee, <sup>b)</sup> Surat Black List (Daftar Hitam), <sup>c)</sup> Kontrak kerja antara Principal dan Obligee, <sup>d)</sup> Surat Pengakuan/pernyataan Principal perihal ketidaksanggupan dan <sup>e)</sup> Surat kesanggupan Principal mengembalikan dana yang dibayarkan oleh Surety.
- PPK telah mengadakan pertemuan kembali dengan Pihak Penjamin untuk meminta klarifikasi perihal isi klausul No.5 dalam Jaminan Pelaksanaan yang menyebutkan bahwa : “PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji” dan pihak penjamin akan meneruskan permintaan klarifikasi tersebut ke bagian klaim.
- PPK menerima surat dari Penjamin dengan Surat Nomor : 032/S/SB/BA-KCK/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 perihal klaim jaminan pelaksanaan yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Klaim Jaminan Pelaksanaan Penyedia/Terjamin sedang dalam proses;
  - b. Pihak Penjamin sedang berkoordinasi dengan PPK BKKBN untuk meminta kelengkapan dokumen pencairan jaminan pelaksanaan;
  - c. Pihak Penjamin sedang berkoordinasi dengan Pihak Terjamin, mengenai pencairan jaminan pelaksanaan tersebut
- PPK telah mengirimkan dokumen sebagai pelengkap persyaratan pada tanggal 29 Februari 2016 yang dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen;

- Penyedia telah menyetorkan pencairan jaminan pelaksanaan ke Kas Negara senilai Rp. Rp.302.923.300,00 tanggal 27 Maret 2017 dengan NTPN Nomor D4D546AN4KPK82JO

#### F.2.2 Pencairan Jaminan Pelaksanaan Wanprestasi Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Kontrasepsi Tahun Anggaran 2015 sampai saat ini belum terselesaikan.

- Satuan Kerja 649505 pada Tahun Anggaran 2015 melakukan Pengadaan Barang Alat Kontrasepsi melalui beberapa penyedia yang dipilih secara lelang terbuka melalui LPSE BKKBN;
- Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) No.2251/I/KU.803/E1/2015 dan No.2256/I/KU.803/E1/2015 tanggal 31 Desember 2015 menyatakan bahwa penyedia hanya sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 62,2% dan ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian tanggal 08 Januari 2016 PPK membuat Pemutusan Kontrak kepada Penyedia melalui Surat Nomor 56/I/KU.803/E1/2016 dan Nomor 56/I/KU.803/E1/2016;
- PPK telah membuat Surat Pernyataan Wanprestasi dan sesuai dengan Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 93 PPK dapat memutuskan kontrak yang disebabkan karena kesalahan penyedia dan akibatnya Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- Dalam rangka pencairan jaminan pelaksanaan untuk segera disetor ke Kas Negara sebesar Rp.4.924.294.451,00, PPK telah mengajukan surat permohonan pencairan jaminan pelaksanaan dilengkapi dengan dokumen-dokumen klaim yang disyaratkan oleh Bank maupun Asuransi Penerbit Jaminan Pelaksanaan;
- Tanggal 15 Januari 2016 Penyedia mengajukan Surat No.058/INST-S/I/2016 ke PPK BKKBN perihal permohonan untuk tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan;
- PPK telah mengirimkan surat Peringatan ke-1, 2 dan 3 kepada Penyedia sesuai dengan Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 93 dan PPK juga telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Asuransi Penerbit Jaminan Pelaksanaan;
- PPK telah bersurat ke LKPP perihal konsultasi pencairan jaminan pelaksanaan dan bersurat ke BPKP perihal permohonan telaahan terkait pencairan jaminan pelaksanaan;

- Sampai dengan laporan keuangan audited TA 2016 ini dibuat, PPK masih terus berkoordinasi secara internal dengan Biro Hukum dan APIP serta berkonsultasi secara eksternal dengan BPKP dan LKPP serta memantau pencairan jaminan pelaksanaan oleh Penjamin.

### F.2.3 Pencairan Klaim Jaminan Bank (Bank Garansi) atas Pekerjaan Pengadaan Pencetakan Kuesioner dan Pedoman SDKI TA 2016 pada Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS telah diselesaikan.

- Pada TA 2016 telah dilaksanakan pekerjaan pengadaan pencetakan kuesioner dan pedoman SDKI oleh Perum Percetakan Negara RI selaku penyedia yang dipilih melalui lelang terbuka;
- Sesuai dengan kontrak pengadaan Nomor 1145/PL.201/H3/2016 tanggal 28 November 2016 yang menyebutkan bahwa “jika ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya jaminan bank garansi, penyedia dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya maka jaminan bank garansi dapat dicairkan”;
- Dikarenakan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka penyedia juga dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Penyedia telah membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 62.495.782,00 melalui SPM Nomor: 00015/LS-PNRI/PUSDU/BKKBN/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan SP2D nomor : 171391303002054 tanggal 7 Maret 2017;
- Berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V Nomor KLAIM-359/WPB.12/KP.0521/2017 perihal klaim pencairan jaminan/garansi bank Nomor 020/BG-BMS/XII/2016 an. Perum Percetakan Negara RI TA 2016, telah diajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank ke Bank Mega Syariah selaku penjamin senilai Rp.567.795.361,00;
- Pencairan jaminan bank garansi sudah dilakukan pencatatan piutang bukan pajak pada Neraca BKKBN;

- Klaim pencairan Jaminan/Garansi Bank No.020/BG-BMS/XII/2016 atas nama Perum Percetakan Negara RI TA 2016 pada pengadaan Formulir SDKI Satker Puslitbang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp.567.795.361,00. dengan nomor NTPN 2DF18021JRAQKQ61.

**Kepala Badan Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Nasional,**

**Surya Chandra Surapaty**